



BANK INDONESIA

Laporan Perekonomian Provinsi Riau

NOVEMBER 2025



Laporan Perekonomian
Provinsi Riau

NOVEMBER 2025



BANK INDONESIA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Riau

www.bi.go.id





Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju

Misi

- 1** Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2** Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 3** Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 4** Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
- 5** Turut meningkatkan pendalamannya pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
- 6** Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
- 7** Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.





Nilai Nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia



Kejujuran dan integritas (*trust & integrity*)



Profesionalisme (*professionalism*)



Keunggulan (*excellence*)



Mengutamakan kepentingan umum (*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai

“
duduk di rumah memegang amanah
duduk di tanah memegang petuah
duduk di kampung menjadi payung
duduk di banjar bertunjuk ajar
duduk di ladang tenggang menenggang
duduk di negeri tahuhan diri
duduk di dusun ia penyantun
duduk beramai elok perangai

apa tanda melayu bertuah
tahu berguru pada yang sudah
tahu berbuat pada yang ada
tahu memandang jauh ke muka
apa tanda melayu terbilang
dada lapang pandangan panjang”



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI (LPP) RIAU ini merupakan kajian triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 dengan penekanan pada kondisi makroekonomi regional antara lain asesmen pertumbuhan ekonomi daerah, asesmen inflasi daerah, asesmen keuangan pemerintah daerah, asesmen pembiayaan daerah dan pengembangan akses keuangan UMKM, asesmen penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, asesmen ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian daerah tahun 2025 dan 2026 berdasarkan indikator terkini. Analisis dilakukan berdasarkan data bulanan bank umum, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, hasil survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, data perekonomian dan ketenagakerjaan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta data pendukung yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau dan instansi/lembaga lainnya, termasuk informasi anekdotal terkait.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada stakeholders tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 5 Desember 2025
Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Riau

Panji Achmad
Direktur



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih	xiii
Ringkasan Eksekutif	xvi

Bab 1 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1. Kondisi Umum	2
2. PDRB Sisi Penggunaan	3
2.1. Konsumsi	3
2.2. Investasi (PMTB)	4
2.3. Ekspor dan Impor	5
2.3.1. Ekspor Luar Negeri	5
2.3.2. Impor Luar Negeri	6
2.3.3. Net Ekspor Antardaerah	6
3. PDRB Lapangan Usaha	7
3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7
3.2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	8
3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8
3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9
3.5. Lapangan Usaha Konstruksi	9

Boks 1 Kawasan Industri Sebagai Pusat Hilirisasi Sektor Utama Provinsi Riau

1. Kondisi Umum	14
2. APBD Provinsi Riau Triwulan III 2025	15
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan III 2025	15
2.2. Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan III 2025	17
3. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Kabupaten / Kota	18
4. Strategi Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah	20



Bab 3 Perkembangan Inflasi Daerah

1. Kondisi Umum	22
2. Perkembangan Inflasi Riau	22
2.1. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	24
2.2. Analisis Inflasi Spasial Riau	26
3. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan IV 2025	28
4. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah	29

Boks 2

Capacity Building Poktan dan Usaha Ponpes Binaan ke Balai Lelang Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi (PPHPM) Sleman, D.I.Yogyakarta

Bab 4 Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

1. Perkembangan Kinerja Perbankan Riau	36
1.1. Pembiayaan Korporasi	37
1.2. Pembiayaan Rumah Tangga	38
1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum	40
1.4. Kualitas Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bank Umum	40
2. Total Aset Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)	41
2.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset	41
2.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)	41
3. Perkembangan Kinerja Perbankan Secara Spasial	43
Penyaluran Kredit Spasial	
4. Perkembangan Perbankan Syariah	43
5. Perkembangan Akses Keuangan Dan UMKM	44

Bab 5 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

1. Kondisi Umum	48
2. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai	48
2.1. Aliran Uang Masuk ke (<i>Inflow</i>) dan Keluar dari (<i>Outflow</i>) Bank Indonesia	48
2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	48
2.3. Temuan Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya	50
3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai	50
3.1. Transaksi SKNBI	50
3.2. Transaksi BI-RTGS	51
3.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	51
3.4. Transaksi Uang Elektronik	52
3.5. Pengembangan Layanan Keuangan Non-tunai	53
3.6. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)	54



Bab 6 Ketenagakerjaan & Kesejahteraan Daerah

1. Gambaran Umum	56
2. Kondisi Ketenagakerjaan Daerah	56
3. Kondisi Kesejahteraan Daerah	59
3.1. Kemiskinan	59
3.2. Garis Kemiskinan	60
3.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)	61
3.4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	62

Bab 7 Prospek Perekonomian Daerah

1. Prospek Ekonomi Global 2025 & 2026	64
2. Prospek Ekonomi Regional 2025	67
2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2025	67
2.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Permintaan	
2.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Lapangan Usaha	69
2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2026	71
2.3. Prospek Inflasi Provinsi Riau 2025	71
3. Risiko	72

Daftar Istilah

77





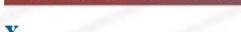
Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (% yoy)	2
Tabel 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Lapangan Usaha (% yoy)	7
Tabel 2.1.	Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Riau Tahun 2025.....	14
Tabel 2.2.	Anggaran Belanja APBD Provinsi Riau Tahun 2025.....	14
Tabel 2.3.	Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025.....	16
Tabel 2.4.	Komponen Pendapatan Pajak Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025	17
Tabel 2.5.	Realisasi Belanja Provinsi Riau Tahun 2024 dan 2025	18
Tabel 2.6.	Realisasi Pendapatan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025	19
Tabel 2.7.	Realisasi Belanja Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025.....	20
Tabel 3.1.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Tahunan Riau (%andil yoy).....	23
Tabel 3.2.	Perkembangan Inflasi Spasial Riau (%yoy)	27
Tabel 3.3.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Kab/Kota IHK Riau Triwulan III 2025 (%andil yoy)	27
Tabel 3.4.	Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Kab/Kota IHK Riau Triwulan III 2025 (%yoy)....	27
Tabel 3.5.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Riau Oktober 2025 (%andil yoy).....	29
Tabel 4.1.	Kredit Lokasi Proyek Menurut Lapangan Usaha (Rp Triliun).....	38
Tabel 4.2.	Perkembangan Kredit di Riau Secara Spasial.....	43
Tabel 5.1.	Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau.....	51
Tabel 5.2.	Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau	53
Tabel 6.1.	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Ribu Orang)	58
Tabel 6.2.	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Ribu Orang)	58
Tabel 6.3.	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	58
Tabel 6.4.	Garis Kemiskinan Provinsi Riau	61
Tabel 7.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Sejumlah Negara Maju dan Berkembang (% yoy)....	66
Tabel 7.2.	Perkembangan Harga Komoditas Eksport Indonesia (% yoy).....	67
Tabel 7.3.	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Riau Tahun 2025	74



Daftar Grafik

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Riau, Sumatera, Nasional Secara Tahunan (%yoy)	2
Grafik 1.2.	Nilai Tukar Petani.....	3
Grafik 1.3.	Kredit Konsumsi	3
Grafik 1.4.	Pengadaan Semen Riau	4
Grafik 1.5.	Kredit Investasi.....	4
Grafik 1.6.	PMDN Riau.....	4
Grafik 1.7.	PMA Riau.....	4
Grafik 1.8.	Ekspor Riau.....	5
Grafik 1.9.	Ekspor CPO	5
Grafik 1.10.	Ekspor Pulp & Paper	5
Grafik 1.11.	Impor Riau	6
Grafik 1.12.	Impor Barang Modal	6
Grafik 1.13.	Impor Barang Konsumsi.....	6
Grafik 1.14.	Perkembangan PDRB Net Ekspor AD	6
Grafik 1.15.	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	7
Grafik 1.16.	Harga TBS Riau.....	7
Grafik 1.17.	Kredit Pertambangan.....	8
Grafik 1.18.	Harga Minyak.....	8
Grafik 1.19.	Kredit Industri Pengolahan	8
Grafik 1.20.	Penjualan Kendaraan Bermotor	9
Grafik 1.21.	Kredit Perdagangan.....	9
Grafik 1.22.	Konsumsi Semen	9
Grafik 1.23.	Kredit Konstruksi.....	9
Grafik 2.1.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di wilayah Riau.....	15
Grafik 2.2.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di wilayah Riau	15
Grafik 2.3.	Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan III 2024 dan 2025	17
Grafik 3.1.	Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional (% yoy).....	22
Grafik 3.2.	Perkembangan Inflasi 4 Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Riau (% yoy)	22
Grafik 3.3.	Inflasi Seluruh Provinsi di Sumatera Bulan September 2025 (%yoy)	23
Grafik 3.4.	Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Riau (% yoy).....	24
Grafik 3.5.	Perkembangan Harga Emas Global	25
Grafik 3.6.	Perkembangan Inflasi Bulanan Riau dan Nasional (%yoy).....	28
Grafik 3.7.	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota/Kabupaten IHK (%yoy)	28





Grafik 4.1. Perkembangan Indikator Perbankan Riau	36
Grafik 4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik 4.3. Pertumbuhan Kredit RT.....	38
Grafik 4.4. Kredit Multiguna.....	39
Grafik 4.5. Kredit Perumahan	39
Grafik 4.6. Kredit Kendaraan Bermotor.....	39
Grafik 4.7. Kredit <i>Durable Goods</i>	39
Grafik 4.8. Suku Bunga Kredit Perbankan Riau	40
Grafik 4.9. Suku Bunga DPK Perbankan Riau.....	40
Grafik 4.10. Perkembangan NPL Kredit	41
Grafik 4.11. Perkembangan Aset Perbankan Riau.....	41
Grafik 4.12. Perkembangan DPK Perbankan Riau	42
Grafik 4.13. DPK Berdasarkan Kepemilikan.....	42
Grafik 4.14. DPK Perorangan per Kelompok Nominal	42
Grafik 4.15. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	44
Grafik 4.16. Perkembangan Aset Perbankan Syariah	44
Grafik 4.17. Perkembangan DPK Perbankan Syariah	44
Grafik 4.18. Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM.....	45
Grafik 4.19. Perkembangan NPL Kredit UMKM.....	45
Grafik 5.1. Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan	48
Grafik 5.2. Perkembangan Rasio UTLE terhadap Total <i>Inflow</i>	49
Grafik 5.3. Nominal Penukaran	49
Grafik 5.4. Nominal Kas Titipan	49
Grafik 5.5. Perkembangan Temuan Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau	50
Grafik 5.6. Perkembangan Transaksi Kliring (SKNBI) di Provinsi Riau.....	50
Grafik 5.7. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Riau	51
Grafik 5.8. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Riau	51
Grafik 5.9. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Debet di Riau	52
Grafik 5.10. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debet di Riau	52
Grafik 5.11. Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau.....	52
Grafik 5.12. Jumlah Uang Elektronik di Provinsi Riau.....	52
Grafik 5.13. Perkembangan Merchant QRIS di Riau.....	53
Grafik 5.14. Perkembangan Pembelian Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau	54
Grafik 5.15. Perkembangan Penjualan Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau.....	54



Grafik 6.1.	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau	56
Grafik 6.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatera (dalam %).....	57
Grafik 6.3.	Perkembangan TPT Nasional dan TPT Provinsi Riau.....	57
Grafik 6.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera (dalam %)	57
Grafik 6.5.	Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Dunia Usaha di Provinsi Riau.....	57
Grafik 6.6.	Perkembangan TPT Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	59
Grafik 6.7.	Jumlah Penduduk Miskin di Riau	59
Grafik 6.8.	Sebaran Penduduk Miskin di Riau	60
Grafik 6.9.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	61
Grafik 6.10.	Perkembangan Rasio Gini (Periode September).....	62
Grafik 6.11.	Nilai Tukar Petani Provinsi Riau	62
Grafik 7.1.	Perkembangan Inflasi Global	64
Grafik 7.2.	Indeks Ketidakpastian Global	65
Grafik 7.3.	Tren PDB Global	66
Grafik 7.4.	Indeks Ketidakpastian dan Volatilitas Global	66
Grafik 7.5.	Ekspektasi Inflasi	72





Tabel Indikator Ekonomi Terpilih

A. Inflasi dan PDRB

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Laju Inflasi Tahunan (%yoy) :													
- Provinsi Riau	5,54	2,37	1,96	2,60	2,60	3,57	3,56	1,38	1,25	1,25	0,68	0,98	5,08
- Kota Pekanbaru	5,54	2,35	1,82	2,50	2,50	2,86	3,12	1,25	1,24	1,24	0,90	1,08	4,63
- Kota Dumai	6,25	2,70	2,77	2,78	2,78	0,90	3,78	1,64	2,36	2,36	1,03	1,11	4,94
- Kota Tembilahan	3,49	1,73	1,45	1,53	1,53	3,16	3,14	1,75	2,61	2,61	2,91	2,19	6,34
- Kabupaten Kampar						4,89	4,38	1,46	0,69	0,69	(0,16)	0,57	4,68
PDRB - ADHB (Rp Juta)	251.305.954	249.717.903	261.230.074	264.218.120	1.026.472.051	264.231.260	274.062.519	284.929.278	289.246.643	1.112.481.615	293.409.835	293.048.130	307.013.745
PDRB - ADHK (Rp Juta)	134.324.941	136.036.225	140.660.846	140.806.474	551.828.486	138.918.429	141.063.626	145.534.084	145.758.171	571.233.590	145.335.676	147.545.761	152.771.601
Pertumbuhan PDRB (%yoy)	3,90	4,92	4,01	4,02	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52	3,52	4,65	4,59	4,98
Penggunaan													
- Konsumsi RT	3,95	4,66	4,47	4,13	4,30	4,91	4,74	4,63	4,84	4,78	4,86	4,69	4,73
- Konsumsi Pemerintah	8,62	8,89	(1,37)	15,38	7,94	17,34	7,58	2,53	(1,17)	6,99	4,06	(9,33)	2,50
- PMTB	2,68	2,71	7,20	7,07	4,89	3,69	3,24	5,55	0,50	3,25	1,17	2,47	2,15
- Ekspor LN	7,81	15,71	(12,92)	(8,68)	(1,61)	(7,38)	(0,49)	(11,55)	1,44	(4,34)	14,98	12,77	19,94
- Impor LN	7,77	(5,74)	(14,78)	(28,50)	(11,91)	(17,90)	(12,46)	9,42	(0,16)	(5,57)	(10,22)	1,63	(13,75)
Lapangan Usaha													
- Pertanian	2,90	2,85	3,40	3,74	3,23	2,09	3,84	0,79	1,94	2,23	5,15	4,38	5,39
- Pertambangan & Penggalian	3,33	3,03	2,58	1,14	2,52	(0,12)	(0,61)	1,63	0,94	0,36	0,44	(0,10)	0,27
- Industri Pengolahan	4,28	6,57	1,97	1,96	3,63	2,49	3,57	3,37	5,19	3,72	5,23	6,63	7,17
- Konstruksi	1,75	4,19	15,89	14,91	9,17	6,95	6,72	7,95	4,55	6,52	5,19	4,95	3,36
- Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi	6,61	6,76	6,64	4,60	6,12	8,82	4,61	6,51	5,07	6,05	6,13	5,94	4,59
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	4.731,35	4.418,15	4.964,46	4.759,65	18.873,61	4.118,77	4.302,53	4.590,21	4.864,27	17.875,78	4.808,84	4.678,53	5.468,87
Volume Ekspor Non Migas (ribu Ton)	6.627,97	6.516,35	7.468,98	7.333,73	27.947,03	6.201,48	6.315,92	6.434,28	6.190,50	25.142,18	5.849,43	5.894,18	7.538,79
Nilai Impor Non Migas (Juta USD)	708,89	579,61	551,94	537,04	2.377,48	517,54	422,71	545,27	296,49	1.782,01	351,44	414,56	260,39
Volume Impor Non Migas (ribu Ton)	1.172,66	1.238,00	1.198,84	1.248,59	4.858,09	1.198,50	1.663,06	1.830,64	1.001,19	5.693,39	1.360,78	1.450,06	1.213,10





B. Perbankan

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Bank Umum													
Total Aset (dalam Rp Juta)	140.941.529	139.449.301	143.252.659	146.749.842	146.749.842	147.357.803	149.444.952	153.958.854	156.987.316	156.987.316	157.288.004	158.684.719	162.347.697
Pertumbuhan DPK (%yoy)	0,35	-3,51	0,52	3,12	3,12	5,61	7,06	7,43	4,92	4,92	5,22	3,90	5,96
DPK (dalam Rp Juta)	114.558.059	114.450.129	117.329.599	121.165.499	121.165.499	120.985.149	122.524.924	126.050.301	127.123.381	127.123.381	127.300.940	129.958.149	134.943.523
- Giro	22.220.838	20.178.878	22.392.732	23.234.058	23.234.058	24.419.965	24.348.076	25.748.582	230.600.617	230.600.617	22.694.936	24.146.148	27.621.798
- Tabungan	62.353.023	63.311.090	63.677.203	65.674.728	65.674.728	64.339.719	65.661.136	67.617.522	695.827.203	695.827.203	70.832.182	71.960.109	73.811.149
- Deposito	29.984.198	30.960.161	31.259.664	32.256.712	32.256.712	32.225.464	32.515.712	32.684.197	34.480.600	34.480.600	33.773.822	33.851.892	33.510.577
Pertumbuhan Kredit Lok. Proyek (%yoy)	15,64	10,87	0,14	3,77	3,77	8,19	6,89	7,70	3,52	3,52	4,75	8,66	15,85
Kredit Lokasi Proyek (dalam Rp Juta)	139.999.141	144.539.016	138.117.349	148.414.423	148.414.423	151.466.514	154.498.339	148.746.756	153.641.769	153.641.769	157.506.258	167.875.608	172.317.127
- Modal Kerja	43.458.204	47.536.187	47.754.897	53.077.529	53.077.529	53.065.416	55.440.435	51.134.905	52.675.282	52.675.282	54.665.594	60.764.215	63.470.960
- Investasi	58.371.491	58.214.478	50.672.307	54.885.841	54.885.841	56.676.055	56.450.821	53.790.826	55.867.630	55.867.630	56.897.440	60.655.602	61.630.263
- Konsumsi	38.169.447	38.788.352	39.690.146	40.451.052	40.451.052	41.725.044	42.607.083	43.821.025	45.098.857	45.098.857	45.943.224	46.455.790	47.215.904
Pertumbuhan Kredit Lok. Bank (%yoy)	9,04	9,22	7,17	8,36	8,36	9,26	8,04	9,64	9,03	9,03	8,89	7,92	5,76
Kredit Lokasi Bank (dalam Rp Juta)	85.970.436	88.562.058	89.973.695	93.058.090	93.058.090	93.928.710	95.681.317	98.647.048	101.463.451	101.463.451	102.281.315	103.261.929	104.331.623
- Modal Kerja	27.271.828	28.130.675	27.730.236	28.425.489	28.425.489	27.221.902	27.539.557	28.498.974	29.230.224	29.230.224	29.092.583	28.637.023	28.407.921
- Investasi	25.064.729	26.446.046	27.565.128	29.571.724	29.571.724	30.649.476	31.456.923	32.518.966	33.564.412	33.564.412	33.999.608	35.139.615	35.888.027
- Konsumsi	33.633.879	33.985.337	34.678.331	35.060.877	35.060.877	36.057.332	36.684.837	37.629.108	38.668.815	38.668.815	39.189.124	39.485.291	40.035.675
- LDR (%)	75,05	77,38	76,68	76,80	76,80	77,64	78,09	78,26	79,81	79,81	80,35	79,46	78,11
- NPL (%)	1,37	1,68	1,82	1,66	1,66	1,61	1,60	1,69	1,60	1,60	1,70	1,62	1,55
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	11,83	11,37	12,22	12,64	12,64	13,44	10,67	10,30	6,49	6,49	4,50	4,64	2,13
Kredit UMKM (dalam Rp Juta)	33.373.094	35.293.358	36.274.976	37.934.965	37.934.965	38.508.538	39.059.809	40.009.704	40.398.699	40.398.699	40.241.659	40.870.748	40.863.163
- Mikro	14.305.949	16.906.144	17.824.409	19.031.610	19.031.610	19.394.065	19.611.154	19.658.561	19.793.761	19.793.761	19.581.172	19.453.423	19.276.318
- Kecil	13.549.959	12.885.582	13.119.392	13.384.651	13.384.651	13.553.245	13.891.846	14.767.258	15.000.301	15.000.301	15.252.751	15.730.046	15.970.943
- Menengah	5.517.186	5.501.632	5.331.175	5.518.704	5.518.704	5.561.227	5.556.809	5.583.885	5.604.638	5.604.638	5.407.736	5.687.279	5.615.902
NPL UMKM (%)	3,02	3,02	2,98	2,70	2,70	3,13	3,20	3,08	3,05	3,05	3,03	3,02	2,83
Bank Syariah													
Total Aset (dalam Rp Juta)	40.576.206	37.522.577	38.419.834	40.816.572	40.816.572	41.223.684	40.529.993	41.269.757	43.511.528	43.511.528	42.616.827	43.163.976	43.535.722
Pertumbuhan DPK (%yoy)	96,30	79,27	-3,85	11,31	11,31	8,47	7,70	5,28	-2,14	-2,14	-4,06	5,07	7,92
DPK (dalam Rp Juta)	24.274.498	23.702.849	24.588.841	26.125.665	26.125.665	26.331.563	25.528.011	25.887.964	25.565.986	25.565.986	25.263.534	26.822.878	27.939.204
- Giro	5.637.693	4.867.488	5.538.327	5.074.508	5.074.508	6.696.015	5.796.166	5.438.329	3.082.200	3.082.200	3.764.898	5.067.422	5.671.464
- Tabungan	10.449.176	10.451.864	10.934.743	12.023.940	12.023.940	11.432.845	11.380.728	11.671.334	12.343.125	12.343.125	12.493.009	12.147.468	12.596.746
- Deposito	8.187.629	8.383.497	8.115.771	9.027.217	9.027.217	8.202.703	8.351.117	8.778.301	10.140.660	10.140.660	9.005.627	9.607.988	9.670.994
Pertumbuhan Pembiayaan (%yoy)	123,21	103,65	7,55	6,84	6,84	7,00	7,08	8,27	9,58	9,58	8,59	7,30	5,14
Pembiayaan (dalam Rp Juta)	23.244.124	23.621.211	24.035.024	24.439.268	24.439.268	24.871.908	25.294.731	26.022.864	26.779.629	26.779.629	27.007.751	27.140.637	27.359.427
- Modal Kerja	2.205.582	2.327.129	2.435.315	2.386.910	2.386.910	2.371.841	2.392.348	2.453.342	2.445.079	2.445.079	2.331.438	2.239.708	2.145.311
- Investasi	4.208.275	4.399.979	4.446.073	4.644.570	4.644.570	4.801.135	5.005.336	5.197.403	5.352.199	5.352.199	5.417.485	5.428.187	5.438.414
- Konsumsi	16.830.267	16.894.103	17.153.636	17.407.787	17.407.787	17.698.932	17.897.047	18.372.120	18.982.350	18.982.350	19.258.828	19.472.742	19.775.702



C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Posisi Kas Gabungan (dalam Rp Juta)	2.821.133	(2.449.942)	(1.146.857)	(5.219.574)	(5.995.239)	133.446	(2.722.421)	(2.784.338)	(6.784.089)	(12.157.402)	(3.138.657)	(860.366)	(4.519.628)
Inflow (dalam Rp Juta)	5.080.304	3.640.412	1.925.762	1.172.379	11.818.856	3.595.941	3.423.613	1.270.836	533.999	8.824.389	2.104.683	2.482.847	674.180
Outflow (dalam Rp Juta)	2.259.171	6.090.353	3.072.619	6.391.952	17.814.096	3.462.495	6.146.034	4.055.174	7.318.088	20.981.791	5.243.340	3.343.213	5.193.808
Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)	1.052.193	1.381.804	1.020.786	810.717	4.265.500	1.015.687	374.700	89.156	184.556	1.664.099	72.576	110.709	2.164.941
Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar) *	43.230	41.640	45.389	62.802	193.061	35.830	40.733	43.460	51.741	171.764	43.607	41.318	466.684
Volume Transaksi RTGS (lembar) *	20.073	17.991	21.201	21.776	81.041	17.936	18.042	20.412	21.038	77.428	15.360	16.334	19.419
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	709	661	744	1.013	782	587	668	712	848	704	715	677	7.651
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (lembar)	329	286	348	351	328	294	296	335	345	317	252	268	318
Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar)	2.953	2.594	2.774	2.604	10.925	2.375	2.241	2.411	2.327	9.354	2.104	2.079	2.221
Volume Transaksi Kliring (lembar)	60.708	52.584	59.595	56.185	229.072	49.121	44.835	50.150	48.455	192.561	42.856	44.835	45.340
Rata-rata Harian Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar)	48	41	45	42	44	39	37	40	38	38	34	34	36
Rata-rata Harian Volume Transaksi Kliring (lembar)	995	835	977	906	928	805	735	822	794	789	703	735	743

D. Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan

INDIKATOR	2023				2023	2024				2024	2025		
	Feb/Mar	Feb/Mar	Agt/Sep	Agt/Sep		Feb/Mar	Feb/Mar	Agt/Sep	Agt/Sep		Feb/Mar	Feb/Mar	Agt/Sep
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	495,13	495,13	485,66	485,66	485,66	492,25	492,25	492,25	473,04	473,04	460,96	460,96	460,96
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,84	6,84	6,68	6,68	6,68	6,67	6,67	6,67	6,36	6,36	6,16	6,16	6,16
Gini Rasio	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	4,25	4,23	4,23	4,23	3,85	3,85	3,70	3,70	3,70	4,12	4,12	4,16



Ringkasan Eksekutif

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

NOVEMBER 2025

I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian Riau pada TW-III 2025 tumbuh sebesar 4,98% (yoy), lebih tinggi dari TW-II 2025 sebesar 4,59% (yoy).

- Perekonomian Riau pada triwulan III 2025 tumbuh positif. Ekonomi Riau pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,98% (yoy), lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 4,59% (yoy), yang disebabkan oleh penguatan konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan pelambatan dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 5,12% (yoy) menjadi 5,04% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan III 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Indonesia, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.
- Dari sisi pengeluaran, percepatan pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III 2025 terutama disebabkan oleh perbaikan kinerja Konsumsi RT dan Ekspor LN. Konsumsi RT tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025, hal tersebut disebabkan peningkatan pendapatan masyarakat ditengarai dari harga CPO dan harga TBS Kelapa Sawit yang membaik, tercermin dengan peningkatan NTP. Dari sisi ekspor LN pada triwulan III 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, diduga dari produksi TBS yang baik pada triwulan III 2025 di masa panen triwulan III.
- Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Pada triwulan III 2025, LU Pertanian tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga TBS yang lebih tinggi pada triwulan III 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditengarai harga *crude palm oil* (CPO) global yang meningkat menjadi penyebab perbaikan harga TBS. Selain itu, LU Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada triwulan III 2025, dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan disebabkan produksi CPO yang baik di masa panen triwulan III 2025 di tengah permintaan eksternal yang baik.





II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi APBD pada triwulan III 2025 lebih lambat dibandingkan triwulan III 2024.

- Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2024. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran pendapatan sebesar Rp9,45 triliun, menurun dibandingkan APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp11,11 triliun. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp6,78 triliun menjadi Rp5,18 triliun. Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 14,39% (yo), dari Rp11,19 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp9,58 triliun pada tahun 2025. Dilihat dari rincian per komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 41,24% (yo) menjadi senilai Rp1,44 triliun.
- Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan daerah didorong oleh turunnya realisasi PAD dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari PAD tercatat sebesar Rp3.012,54 miliar atau terkontraksi 14,45% (yo) dari triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.521,55 miliar. Sejalan dengan nominal penurunan, rasio realisasi PAD terhadap pagu anggaran tercatat turun dari 58,84% menjadi 58,11%.

III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Tekanan inflasi di Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,08% (yo)

- Pada triwulan III 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 5,08% (yo) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,98% (yo). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; serta Pendidikan. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga.
- Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran $2,5\pm1\%$ (yo), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking*, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta minimnya rencana penyesuaian tarif yang ditetapkan Pemerintah (*administered prices*), sehingga diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2025.



IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

Kinerja intermediasi perbankan Riau pada triwulan III 2025 terpantau masih kuat, sejalan dengan kinerja positif perekonomian.

- Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau tumbuh meyakinkan, mendukung aktivitas perekonomian Riau. Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan III 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya.
- Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat masih cukup baik, terindikasi dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau pada triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 78,11%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 79,46%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.

V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai di Provinsi Riau terus berkembang.

- Pada triwulan III 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi *net-outflow* yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pergerakan *net-outflow* dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp4,52 triliun, lebih tinggi dibandingkan *net-outflow* triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp860,37 miliar
- Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan III 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui BI-RTGS, kartu debit, Uang Elektronik (UE), dan QRIS. Di sisi lain, kinerja transaksi melalui SKNBI dan kartu kredit menunjukkan perlambatan. Kinerja BI-RTGS di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat membaik, dari sisi nominal maupun volume transaksi yang masing-masing tumbuh 7,42% (yoy) dan -4,86% (yoy), dari yang sebelumnya tercatat 1,44% (yoy) dan -9,47% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi melalui APMK khususnya kartu debit menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2025. Selain itu, kinerja transaksi melalui UE tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume pada triwulan laporan. Berdasarkan kategorinya, transaksi untuk berbelanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE, yaitu senilai Rp1,57 triliun atau dengan pangsa sebesar 71,29%.



Kesejahteraan masyarakat Riau menunjukkan penurunan sebagaimana tercermin pada peningkatan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

- Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Agustus 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Riau. Pada periode laporan, jumlah Angkatan Kerja meningkat di Riau, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengangguran yang berkontribusi pada peningkatan TPT.
- Sementara itu, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau terindikasi membaik, terlihat dari tingkat kemiskinan yang tercatat 6,16%, lebih rendah dari September dan Maret 2024 masing-masing 6,36% dan 6,67%. Berlanjutnya tren penurunan kemiskinan di Riau mengindikasikan kondisi kesejahteraan penduduk yang relatif membaik. Tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2025 sebesar 6,16% merupakan persentase penduduk miskin terendah setidaknya sejak tahun 2016. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2025 mencapai 460,96 ribu jiwa, menurun sebanyak 31,29 ribu jiwa dari Maret 2024.

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,20 – 5,00% (yo), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yo). Percepatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja net export LN. Namun demikian, potensi disrupti perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.
- Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan lebih tinggi pada tahun 2026. Dengan dukungan program stimulus pemerintah ditengah perbaikan keyakinan masyarakat, diprakirakan konsumsi domestik akan mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi.
- Inflasi Riau pada tahun 2025 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yo). Terkendalinya inflasi Riau didukung oleh komponen VF dan CI, sementara komponen AP diperkirakan mengalami peningkatan inflasi yang terkendali. Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya pengendalian inflasi VF melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana



produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, inflasi CI diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, inflasi AP diperkirakan mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.





BAB 1

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

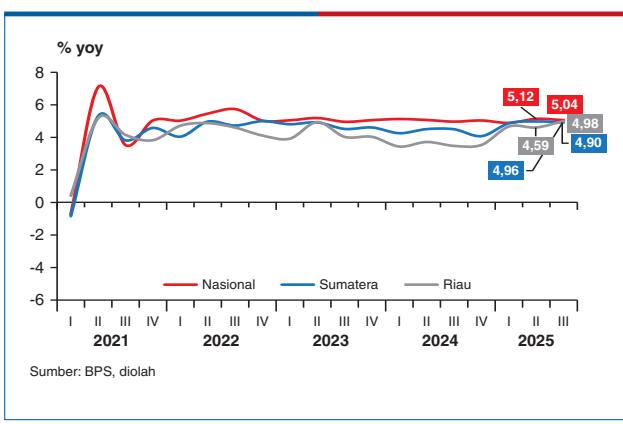
Ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025.

Penguatan ekonomi Riau disebabkan oleh perbaikan kinerja rumah tangga dan ekspor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha (LU), penguatan kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Riau untuk tumbuh lebih tinggi. Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tetap menjadi provinsi dengan PDRB terbesar keenam se-Nasional dengan kontribusi terhadap total PDRB Indonesia mencapai 5,14%.



1. KONDISI UMUM

Perekonomian Riau pada triwulan III 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,98% (yoY) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,59% (yoY), didorong oleh perbaikan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan pelambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 5,12% (yoY) menjadi 5,04% (yoY). Provinsi Riau pada triwulan III 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.



Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau, Sumatera, Nasional Secara Tahunan (%yoY)

Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III 2025 disebabkan oleh perbaikan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kinerja ekspor non-migas terutama komoditas lemak dan minyak nabati tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 30,18% (yoY) menjadi 42,41% (yoY). Lebih lanjut, kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT) juga mencatatkan perbaikan yaitu tumbuh 4,73% (yoY) dari 4,69% (yoY) pada triwulan sebelumnya seiring peningkatan aktivitas masyarakat yang tercermin dari perbaikan rata-rata TPK Hotel Berbintang dari 44,12% menjadi 45,23%.

Namun demikian, pelambatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menahan pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi. Pada triwulan III 2025, kinerja PMTB tumbuh sebesar 2,15% (yoY), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,47% (yoY) yang disebabkan pelambatan investasi bangunan.

Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Pada triwulan III 2025, LU Pertanian tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kinerja produksi Kelapa Sawit yang memasuki musim panen. Hal ini juga terindikasi dari peningkatan rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III dibandingkan

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (% yoY)

Komponen Penggunaan	Pertumbuhan (% yoY)										Kontribusi Pertumbuhan (% yoY)										
	2023	2024				2025			2023	2024				2025			2024	2025			
		I	II	III	IV	2024	I	II		I	II	III	IV	2024	I	II	III	I	II	III	
		4,30	4,91	4,74	4,63	4,84	4,78	4,86		1,49	1,67	1,67	1,57	1,69	1,65	1,68	1,67	1,62	1,60	1,60	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,30	4,91	4,74	4,63	4,84	4,78	4,86	4,69	4,73	1,49	1,67	1,67	1,57	1,69	1,65	1,68	1,67	1,62			
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,90	37,26	11,45	5,19	2,34	13,01	-1,25	-0,76	3,15	0,05	0,18	0,06	0,03	0,01	0,07	-0,01	0,00	0,02			
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,94	17,34	7,58	2,53	-1,17	6,99	4,06	-7,41	2,50	0,26	0,46	0,30	0,08	-0,05	0,23	0,13	-0,27	0,08			
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,89	3,69	3,24	5,55	0,50	3,25	1,17	2,47	2,15	1,51	1,15	1,01	1,71	0,17	1,01	0,37	0,77	0,68			
5. Ekspor Luar Negeri	-1,61	-7,38	-0,49	-11,55	1,44	-4,34	14,98	12,77	19,94	-0,59	-2,53	-0,16	-4,15	0,52	-1,50	4,62	3,92	6,11			
6. Impor Luar Negeri	-11,91	-16,54	-12,46	9,42	-0,16	-5,57	-10,22	1,63	-13,75	-0,90	-1,19	-0,77	0,56	-0,02	-0,36	-0,59	0,09	-0,88			
7. Net Ekspor	2,77	-0,15	2,82	0,15	6,10	2,02	20,73	18,36	28,77	0,85	-0,05	0,85	0,05	1,82	0,61	6,00	5,89	6,99			
PDRB	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52	3,52	4,65	4,59	4,98	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52	3,52	4,65	4,59	4,98			

Sumber : BPS





dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar 191,38, dari 186,27. Selain itu, LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan permintaan eksternal yang tinggi akan komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya yang terindikasi dari harga CPO di triwulan III 2025 yang sebesar \$1.011,63 USD per ton, atau tumbuh 12,32% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,49% (yoy).

Pertumbuhan kinerja lapangan usaha yang lebih tinggi terhantam oleh kinerja LU Konstruksi. Pelambatan LU Konstruksi ditengarai dari terhambatnya proyek konstruksi besar yang terindikasi dari pengadaan semen di Provinsi Riau yang pada triwulan III terkontraksi 12,80% (yoy), memburuk dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,57% (yoy).

2. PDRB SISI PENGGUNAAN

Pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi pada triwulan III 2025 dipengaruhi oleh net ekspor luar negeri serta konsumsi RT. Namun demikian, pelambatan PMTB menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.

2.1. Konsumsi

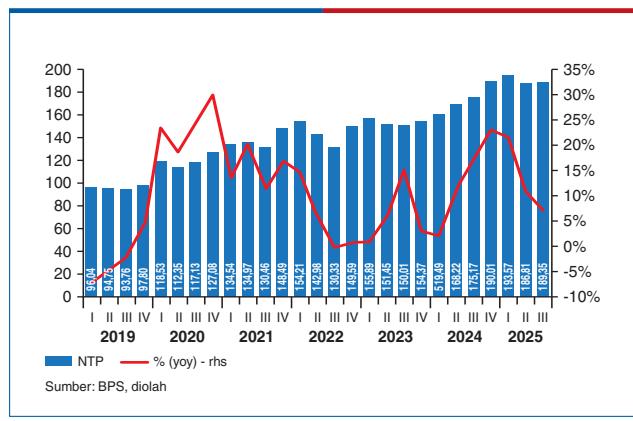
Konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2025, Konsumsi RT tumbuh 4,73% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh 4,69 (yoy). Peningkatan dipengaruhi oleh pola masyarakat yang meningkatkan belanjanya, terindikasi dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Perorangan yang tumbuh melambat, menunjukkan masyarakat menabung lebih sedikit, di tengah peningkatan pendapatan yang terindikasi dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

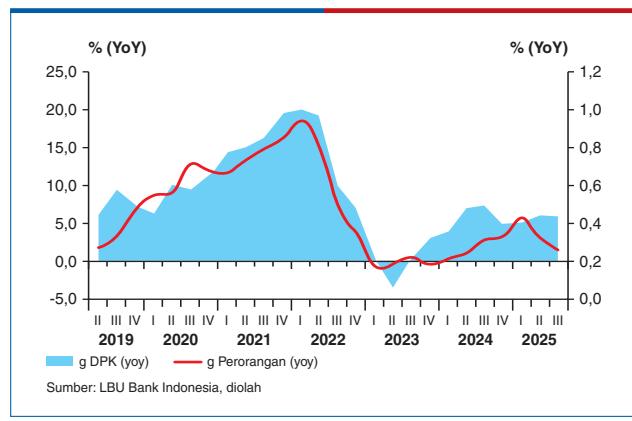
Daya beli masyarakat di Provinsi Riau masih menunjukkan perbaikan. Hal tersebut didukung oleh berlanjutnya tren kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sehingga mendorong peningkatan penerimaan petani di Riau. Kenaikan harga TBS mendorong kenaikan NTP Perkebunan sehingga NTP berada pada 189,35 pada triwulan III 2025. Dari sisi pembiayaan, kinerja konsumsi RT yang tetap baik tercermin dari penyaluran kredit konsumsi yang tetap tumbuh. Penyaluran kredit konsumsi masih tumbuh positif sebesar 7,75% (yoy), meski melandai dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,03% (yoy).

Sejalan dengan konsumsi RT, kinerja konsumsi pemerintah juga mengalami perbaikan dan masuk pada zona pertumbuhan. Pada triwulan III 2025, konsumsi pemerintah tumbuh 2,50% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,33% (yoy). Perbaikan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh peningkatan pencairan Transfer Ke Daerah (TKD) pada triwulan III.

Sementara itu, konsumsi LNPRT pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 3,15% (yoy), membaik dibandingkan triwulan II 2025 yang terkontraksi



Grafik 1.2. Nilai Tukar Petani



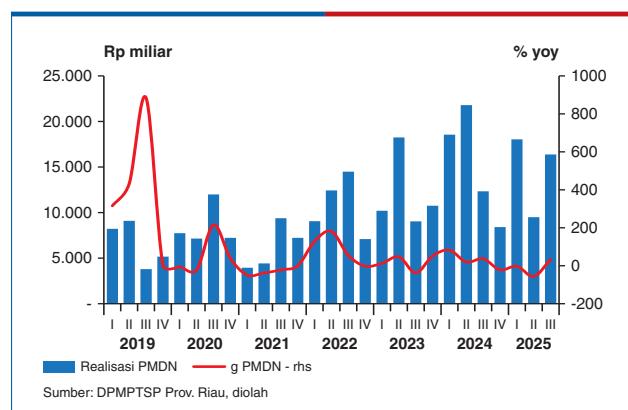
Grafik 1.3. Kredit Konsumsi



0,76% (yoY). Intensitas pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan yang lebih kuat dari triwulan sebelumnya serta ditenggarai menyebabkan pertumbuhan konsumsi LNPRT.

2.2. Investasi (PMTB)

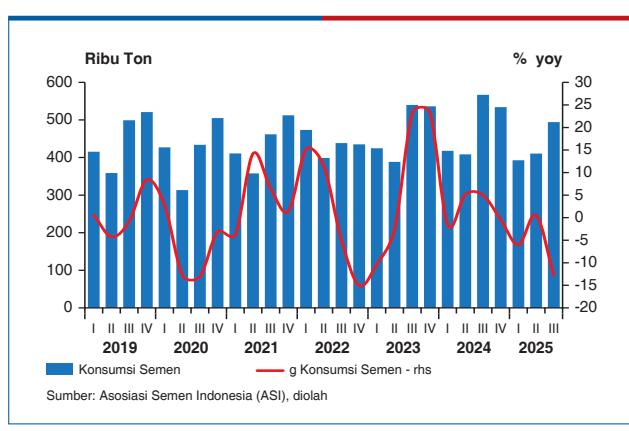
Kinerja investasi Riau yang tercermin pada komponen PMTB tumbuh sebesar 2,15% (yoY) pada triwulan III 2025, melandai dari triwulan II 2025 yang tumbuh 2,47% (yoY). Pelambatan kinerja investasi terjadi pada kelompok investasi bangunan seiring proyek pembangunan utama yang melambat. Hal tersebut terindikasi dari pengadaan semen di Provinsi Riau yang pada triwulan III terkontraksi 12,80% (yoY), memburuk dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,57% (yoY).



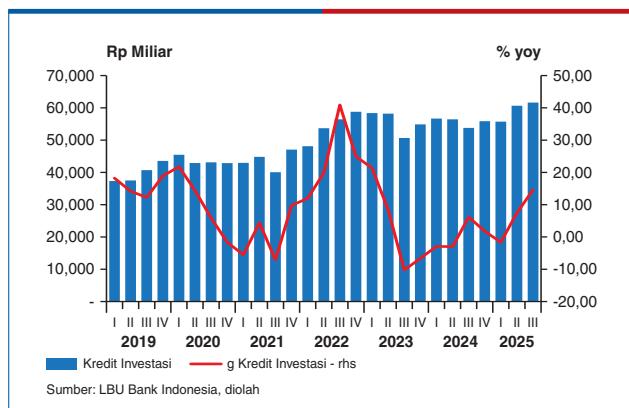
Grafik 1.6. PMDN Riau

Kinerja investasi nonbangunan mencatatkan peningkatan pada triwulan III 2025. Hal ini tercermin dari peningkatan impor pupuk (HS 29) dan perbaikan impor barang modal. Dari sisi pembiayaan, peningkatan investasi juga terindikasi dari penyaluran kredit investasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan. Kredit investasi tercatat tumbuh 14,57% (yoY), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,45% (yoY).

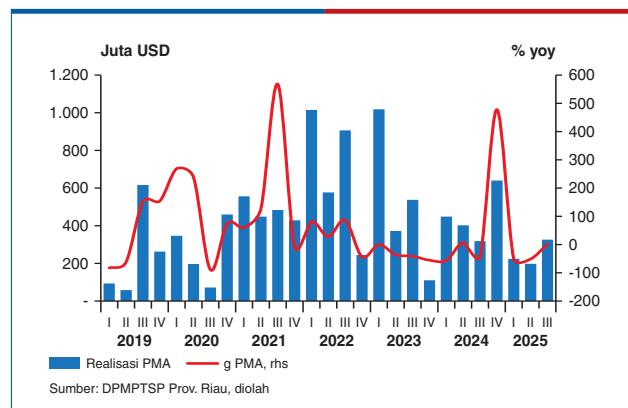
Pada triwulan III 2025, realisasi penanaman modal di Provinsi Riau tercatat Rp21,59 triliun atau 58,66% dari target BKPM RI selama tahun 2025. Pencapaian tersebut lebih rendah dari capaian triwulan III 2024 sebesar 66,03% dari target BKPM RI. Penurunan disebabkan pelambatan investasi dari modal asing. Kinerja investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat tumbuh 32,65% (yoY),



Grafik 1.4. Pengadaan Semen Riau



Grafik 1.5. Kredit Investasi



Grafik 1.7. PMA Riau



setelah terkontraksi 56,42% (yoY) pada triwulan sebelumnya.

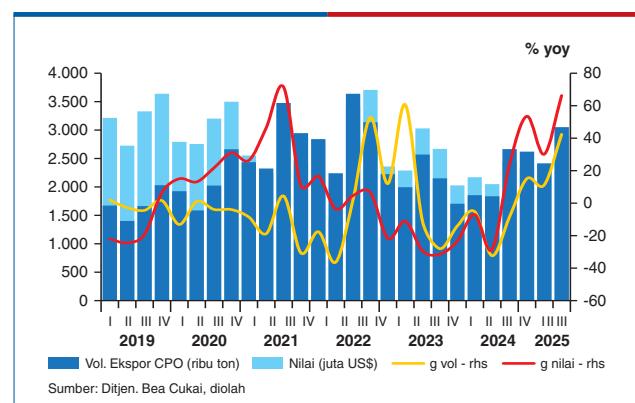
Mengacu pada data realisasi investasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, sektor usaha yang menyumbang capaian realisasi pada triwulan III 2025 adalah sektor Kehutanan sebesar Rp6,02 triliun atau 27,88%, Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp4,61 triliun atau 21,40%, industri makanan sebesar Rp3,86 triliun atau 17,88%, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar Rp2,39 triliun atau 11,06%.

Sementara itu, ditinjau dari negara asalnya, aliran modal asing yang masuk ke Provinsi Riau terutama berasal dari Malaysia sebesar US\$143,67 juta, Singapura sebesar US\$102,64 juta, dan Hongkong sebesar US\$49,18 juta masing-masing dengan pangsa sebesar 45%, 32%, dan 16% dari keseluruhan PMA di Riau.

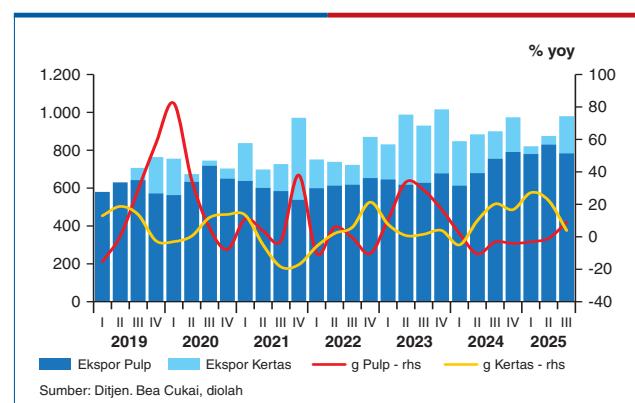
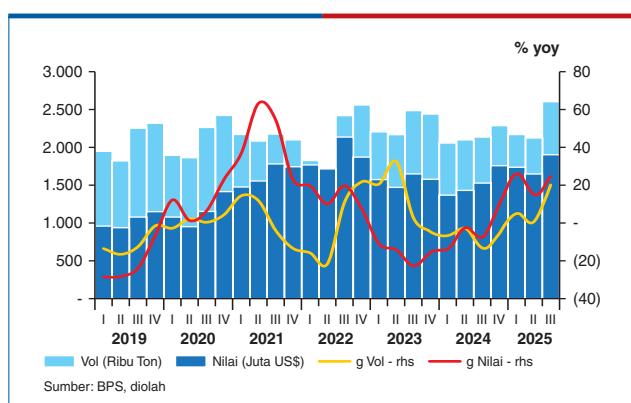
2.3. Ekspor dan Impor

2.3.1. Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Riau mengalami akselerasi pada triwulan III 2025. Berdasarkan data neraca perdagangan yang dirilis oleh BPS Provinsi Riau, nilai ekspor Riau pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 19,94% (yoY), meningkat dari 12,77% (yoY) pada triwulan III 2025. Berdasarkan perkembangan



Grafik 1.8. Eksport Riau





dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh -0,92% (yoy), ditengarai disebabkan oleh permintaan *pulp* dari Tiongkok untuk mendukung industri kertas.

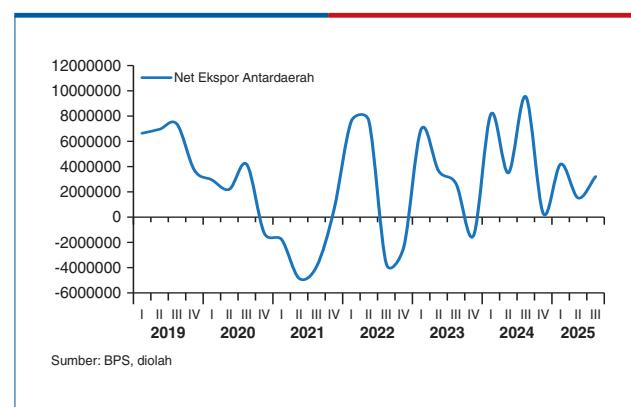
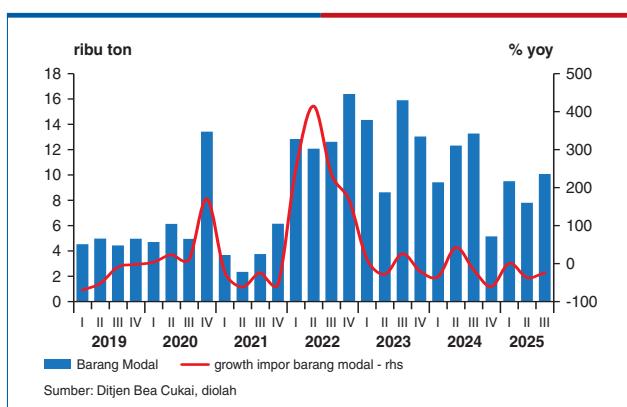
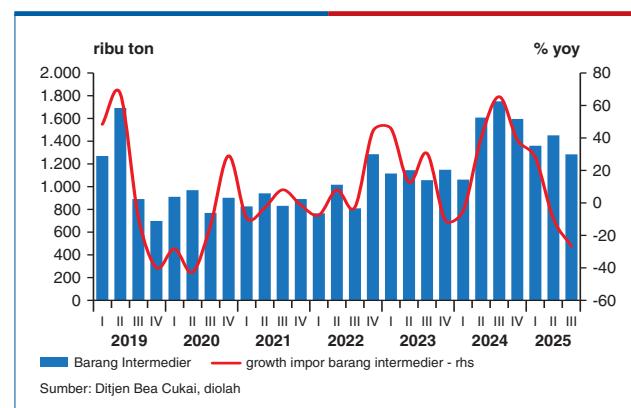
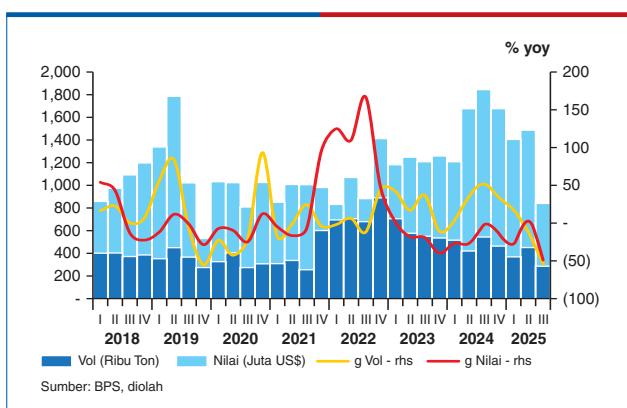
2.3.2. Impor Luar Negeri

Berbeda dengan kinerja ekspor luar negeri, kinerja impor luar negeri mengalami penurunan sebesar -13,75% (yoy) pada triwulan III 2025, setelah tumbuh sebesar 1,63% (yoy) pada triwulan II 2025. Penurunan impor luar negeri terkonfirmasi dari pertumbuhan nilai perdagangan impor BPS yang mencatatkan pertumbuhan yang menurun dari 3,49% (yoy) menjadi -47,12% (yoy). Sementara itu, volume impor tercatat terkontraksi 53,63% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,51% (yoy).

Jika ditinjau dari jenis barangnya, penurunan kinerja impor nonmigas didorong oleh impor barang antara. Pada triwulan III 2025, berdasarkan volumenya, impor barang antara tercatat terkontraksi 26,69% (yoy). Di sisi lain, impor barang modal menahan penurunan yang lebih dalam dengan kontraksi 24,07% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 36,73% (yoy).

2.3.3. Net Ekspor Antardaerah

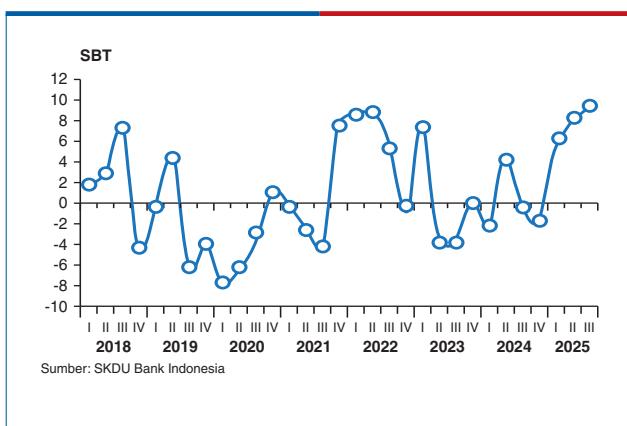
Pada triwulan III 2025, nominal PDRB neto ekspor Antardaerah atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencatat surplus sebesar Rp3,22 triliun, atau terkontraksi 66,28% (yoy). Penurunan net ekspor antardaerah ditengarai oleh penurunan ekspor antar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor LN.





3. PDRB LAPANGAN USAHA

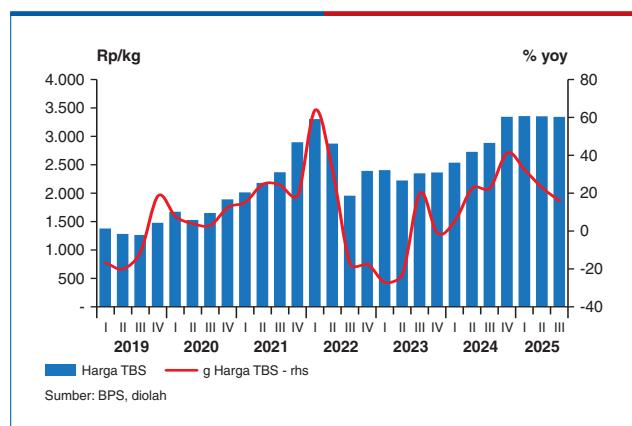
Dari sisi sektoral, meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 disebabkan oleh pertumbuhan kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Industri pengolahan akibat peningkatan produksi dan ekspor komoditas utama. Namun demikian, kinerja LU Konstruksi menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.



Grafik 1.15. Perkembangan Kegiatan Usaha LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 5,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebelumnya yang tumbuh 4,38% (yoy). Peningkatan rata-rata harga TBS dari sebelumnya Rp.3.356,11 menjadi Rp3.346,42 pada



Grafik 1.16. Harga TBS Riau

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Komponen Sektoral	Growth (% yoy)								Kontribusi Pertumbuhan (% yoy)									
	2023	2024				2024	2025			2023	2024				2024	2025		
		I	II	III	IV		I	II	III		I	II	III	IV		I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,23	2,09	3,84	0,79	1,94%	2,23%	5,15%	4,38%	5,39%	0,88	0,56	1,02	0,22	0,51%	0,60%	1,36%	1,17%	
Pertambangan dan Penggalian	2,52	-0,12	-0,61	1,63	0,94%	0,36%	0,44%	-0,10%	0,27%	0,38	-0,02	-0,09	0,23	0,13%	0,05%	0,06%	-0,01%	
Industri Pengolahan	3,63	2,49	3,57	3,37	5,19%	3,72%	5,23%	6,63%	7,17%	1,17	0,81	1,13	1,07	1,68%	1,19%	1,68%	2,09%	
Pengadaan Listrik, Gas	1,45	9,58	6,75	2,69	9,27%	6,99%	15,04%	-0,66%	3,41%	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	
Pengadaan Air	5,52	4,17	4,18	1,72	4,81%	3,71%	4,17%	7,66%	5,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Konstruksi	9,17	6,95	6,72	7,95	4,55%	6,52%	5,19%	4,95%	3,36%	0,77	0,59	0,57	0,73	0,42%	0,59%	0,46%	0,43%	
Perdagangan Besar, Eceran, Rep. Mobil Motor	6,12	8,82	4,61	6,51	5,07%	6,05%	6,13%	5,94%	4,59%	0,61	0,86	0,50	0,61	0,53%	0,63%	0,63%	0,65%	
Transportasi dan Pergudangan	8,31	9,85	7,56	9,92	5,27%	6,55%	5,25%	3,89%	2,62%	0,06	0,07	0,06	0,08	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,22	8,91	14,20	13,42	9,83%	10,70%	3,37%	2,39%	5,02%	0,02	0,04	0,06	0,06	0,05%	0,05%	0,02%	0,01%	
Informasi dan Komunikasi	7,67	8,88	6,73	8,91	6,70%	7,56%	5,07%	5,30%	6,02%	0,09	0,10	0,08	0,11	0,08%	0,09%	0,06%	0,07%	
Jasa Keuangan	4,07	1,63	5,79	6,12	-7,95%	1,30%	1,62%	1,45%	-1,33%	0,04	0,02	0,06	0,06	-0,07%	0,01%	0,02%	0,01%	
Real Estate	3,94	5,95	3,82	3,76	2,13%	3,85%	2,92%	5,36%	4,52%	0,04	0,05	0,04	0,04	0,02%	0,04%	0,03%	0,05%	
Jasa Perusahaan	6,58	7,47	7,41	9,28	9,36%	8,37%	7,62%	9,32%	10,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos.	5,40	15,62	9,29	11,28	4,77%	9,45%	8,81%	-0,79%	7,31%	0,09	0,24	0,17	0,17	0,09%	0,17%	0,15%	-0,02%	
Jasa Pendidikan	3,76	5,84	3,04	5,85	3,62%	4,42%	11,68%	7,56%	8,62%	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02%	0,02%	0,06%	0,04%	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,97	5,19	7,22	9,45	6,43%	6,62%	10,82%	7,71%	8,27%	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	
Jasa lainnya	6,26	8,56	8,85	8,14	4,81%	7,54%	8,90%	9,37%	13,95%	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%	
PDRB	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52%	3,52%	4,65%	4,59%	4,98%	4,21	3,42	3,70	3,46	3,52%	3,52%	4,65%	4,59%	

Sumber : BPS

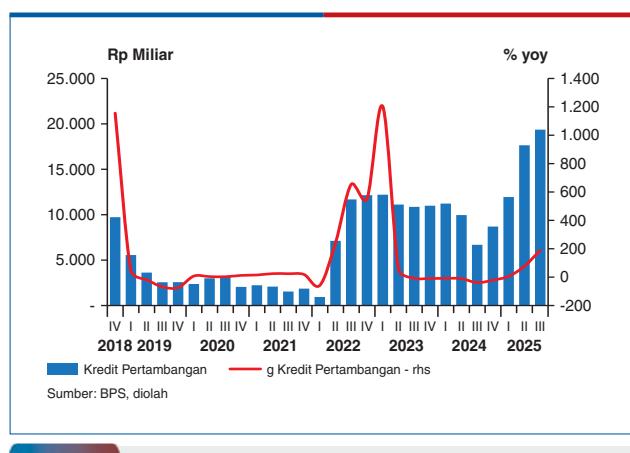




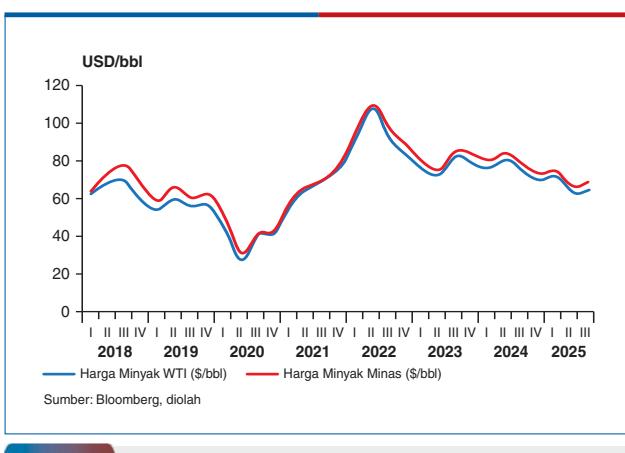
triwulan III 2025 atau tumbuh 15,89% (yoY) menjadi alasan utama peningkatan kinerja LU Pertanian. Peningkatan harga TBS sejalan dengan harga CPO yang lebih tinggi dari triwulan II 2025.

3.2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 0,27% (yoY), meningkat dari triwulan II 2025 yang terkontraksi 0,10% (yoY). Peningkatan disebabkan oleh perbaikan produksi dan investasi dalam rangka peningkatan produksi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR). Hal tersebut terindikasi dari peningkatan penyaluran kredit pertambangan yang tumbuh 189,69% (yoY), meningkat dari triwulan sebelumnya 77,17% (yoY).



Grafik 1.17. Kredit Pertambangan



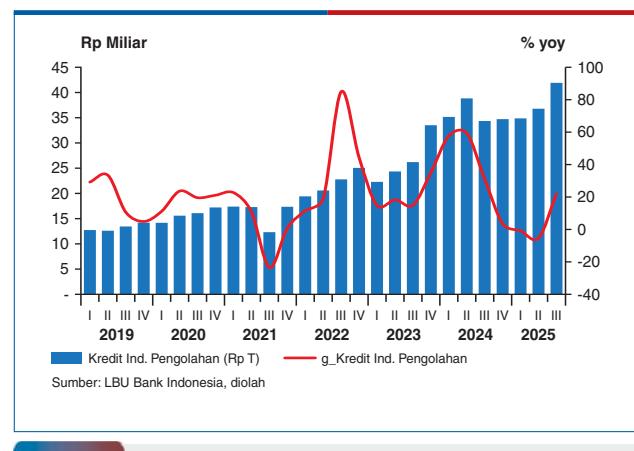
Grafik 1.18. Harga Minyak

Selain itu, harga minyak menunjukkan perbaikan. Harga minyak pada triwulan III 2025 tercatat sebesar US\$66,67 per barrel, meningkat dibandingkan triwulan II 2025 yang berada pada US\$64,99 per barrel.

3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan III 2025, LU Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,17% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 yang tumbuh 6,63% (yoY). Pertumbuhan industri pengolahan ditengarai disebabkan oleh peningkatan penjualan ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan oleochemical yang merupakan produk turunan CPO. Hal ini terindikasi dari peningkatan ekspor bahan kimia organik yang tumbuh 4,55% (yoY) pada triwulan III 2025.

Berdasarkan subsektornya, kinerja positif LU Industri Pengolahan juga didukung oleh kinerja positif subsektor *pulp & paper*. Kondisi tersebut terindikasi dari pertumbuhan nilai eksport bubur kertas sebesar 8,86% (yoY), dan pertumbuhan penyaluran kredit industri sebesar 22,01% (yoY).



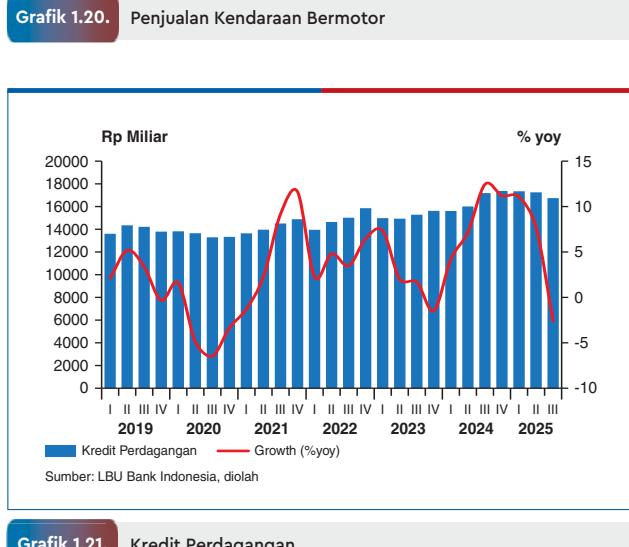
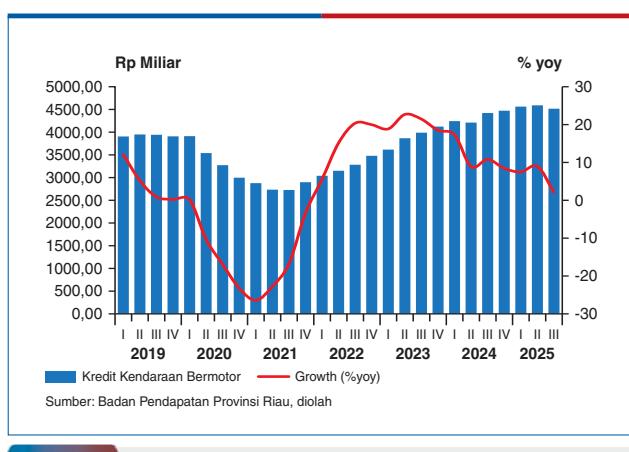
Grafik 1.19. Kredit Industri Pengolahan



3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada triwulan III 2025, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 4,59% (yo), tercatat melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,94% (yo). Hal tersebut terindikasi dari penyaluran kredit perdagangan yang terkontraksi 2,59% (yo), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,75% (yo).

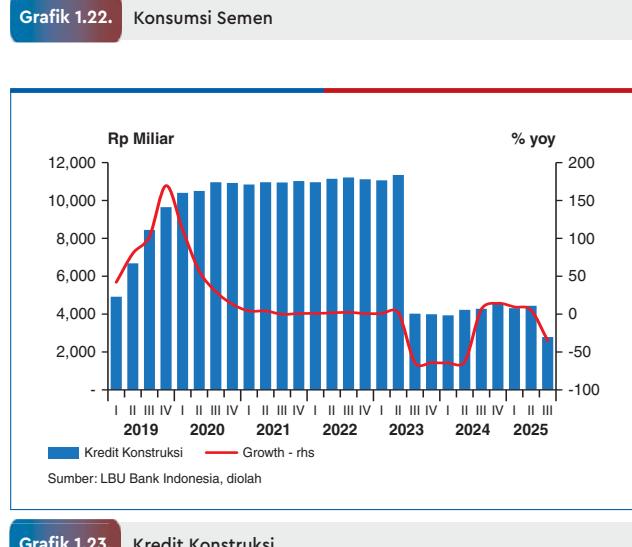
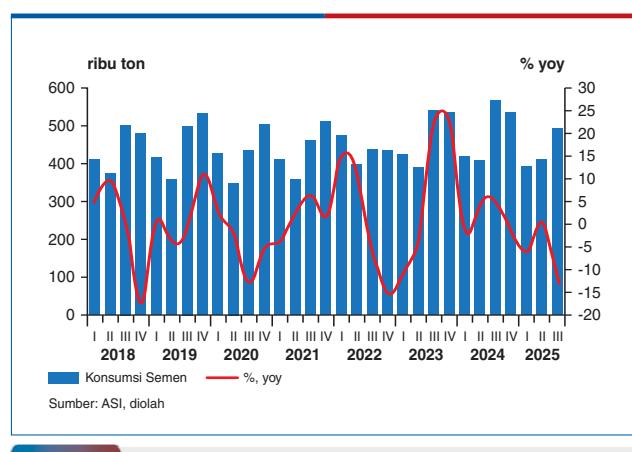
Pertumbuhan LU Perdagangan juga tertahan, ditengarai oleh melambatnya penjualan kendaraan bermotor. Hal tersebut terindikasi dari pelambatan kredit kendaraan bermotor pada triwulan III yang tumbuh 2,17% (yo), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,01% (yo), berkontribusi pada penurunan LU Perdagangan Besar & Eceran.



3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi Riau pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 3,36% (yo), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,95% (yo). Aktivitas konstruksi yang lebih rendah pada periode laporan serta pelambatan penyaluran kredit konstruksi menjadi -34,59% (yo) dari 5,18% (yo) mengindikasikan hal tersebut.

Pelambatan kinerja LU Konstruksi ini juga terindikasi dari konsumsi semen. Pada triwulan III 2025, konsumsi semen Provinsi Riau mengalami kontraksi 12,80% (yo), memburuk dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,57% (yo).





BOKS 1

Kawasan Industri Sebagai Pusat Hilirisasi Sektor Utama Provinsi Riau

Kawasan Industri

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri Dan Akreditasi Kawasan Industri, definisi dari kawasan industri adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa kawasan industri bukan saja aglomerasi dari beberapa perusahaan di bidang industri pengolahan, tapi merupakan aglomerasi yang saling terhubung dan berbagi infrastruktur dasar penunjang industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat empat Kawasan Industri yang terdaftar di Provinsi Riau, yaitu 1) Gerindo Eco Industrial Park; 2) Kawasan Industri Dumai; 3) Kawasan Industri Tanjung Buton, dan; 4) Kawasan Industri Tenayan.

No.	Kawasan	Pengelola	Luas Area
1	Gerindo Eco Industrial Park	PT. Gerindo Investa Internasional	105,02 Ha
2	Kawasan Industri Dumai	PT. Kawasan Industri Dumai	1.049,95 Ha
3	Kawasan Industri Tanjung Buton	PT. Kawasan Industri Tanjung Buton	57,55 Ha
4	Kawasan Industri Tenayan	PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru	265,00 Ha

Sumber: Kementerian Perindustrian

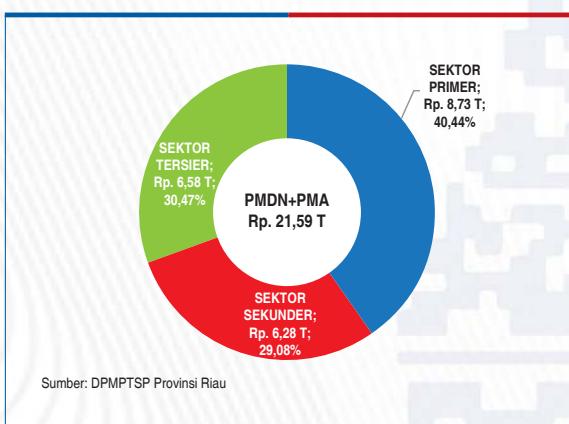
Hilirisasi Komoditas Utama Provinsi Riau

Pengembangan kawasan industri menjadi kunci untuk mendorong hilirisasi komoditas utama Provinsi Riau, seperti kelapa sawit dan *pulp & paper*, agar tidak hanya dieksport dalam bentuk bahan mentah. Dengan kawasan industri yang terencana baik—lengkap dengan infrastruktur, logistik, energi, dan pengelolaan lingkungan—proses pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber bahan baku, sehingga meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat basis industri daerah.

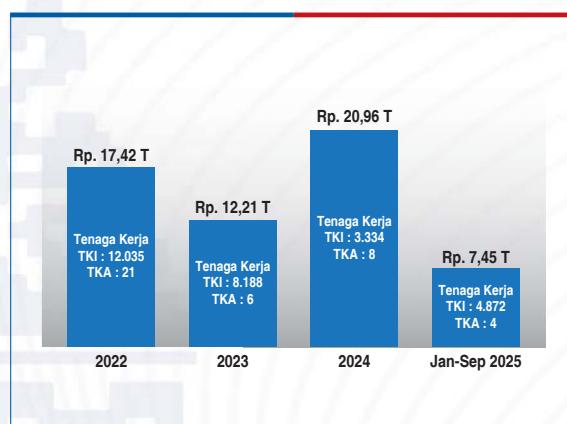


Investasi Penunjang Hilirisasi

Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Riau, pada triwulan III 2025, realisasi investasi di Provinsi Riau sebesar Rp21,59 Triliun atau tumbuh 26,03% (yoY). Sebesar Rp6,28 triliun atau 29,08% dari realisasi tersebut berada di sektor sekunder yang termasuk industri pengolahan. Dari Januari hingga September 2025, sebanyak Rp7,45 Triliun direalisasikan oleh pelaku usaha untuk investasi hilirisasi CPO.



Gambar 1. Realisasi Investasi Tw. III 2025



Gambar 2. Realisasi Investasi Hilirisasi CPO





Halaman ini sengaja dikosongkan





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BAB 2 Keuangan Pemerintah

Pada triwulan III 2025, realisasi Pendapatan APBD Provinsi Riau tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan didorong oleh penurunan realisasi di hampir seluruh komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkontraksi sejalan dengan turunnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi. Lebih lanjut, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga mencatatkan penurunan akibat turunnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Provinsi Riau. Sejalan dengan Pendapatan, Belanja APBD pada triwulan III 2025 juga mengalami perlambatan. Realisasi belanja pada triwulan III 2025 didominasi oleh penyerapan pada Belanja Operasi khususnya sub-komponen Belanja Pegawai.



1. KONDISI UMUM

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran sebesar Rp9.447 miliar, menurun dibandingkan APBD tahun 2024 sebesar Rp10.062 miliar. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp5.985 miliar menjadi Rp5.184 miliar (Tabel 2.1). Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 13,07% (yoj), menjadi Rp9.580 miliar pada tahun 2025 dari Rp11.020 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 32,65% (yoj) menjadi Rp1.492 miliar (Tabel 2.2).

Kinerja APBD secara agregat di Provinsi Riau tumbuh pada triwulan III 2025. Realisasi pendapatan daerah dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mencapai Rp23.851 miliar atau tumbuh 0,06% (yoj) dibandingkan triwulan III 2024 yang

Tabel 2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi Riau Tahun 2025

KOMPONEN BELANJA DAERAH	Rp Miliar			Perubahan (%)
	2024	2025	Selisih	
BELANJA OPERASI	6.535	6.514	-22	-0
Belanja Pegawai	2.942	2.962	20	1
Belanja Barang dan Jasa	2.981	3.126	145	5
Belanja Bunga	-	-	0	0
Belanja Subsidi	-	-	0	0
Belanja Hibah	568	406	-162	-29
Belanja Bantuan Sosial	44	19	-25	-56
BELANJA MODAL	2.216	1.492	-724	-33
Belanja Modal Tanah	4	2	-2	-60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310	450	140	45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	383	328	-55	-14
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.482	650	-832	-56
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37	62	25	69
Belanja Modal Aset Lainnya	0	1	1	203
BELANJA TIDAK TERDUGA	13	50	37	278
Belanja Tidak Terduga	13	50	37	278
BELANJA TRANSFER	2.256	1.524	-732	-32
Belanja Transfer Bagi Hasil	1.795	1.291	-504	-28
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	461	233	-228	-49
BELANJA DAERAH	11.020	9.580	-1440	-13
PEMBIAYAAN DAERAH	575	69	-506	-87,98
Penggunaan SiLPA	69	29	-41	-58,69

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, data posisi September 2025, diolah

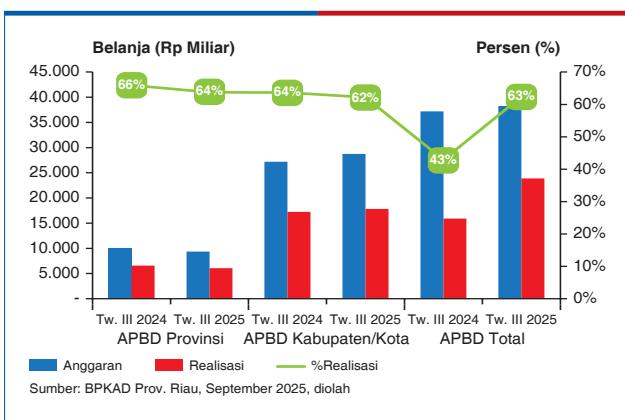
Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Riau Tahun 2025

URAIAN	Rp Miliar			Perubahan (%)
	2024	2025	Selisih	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.985	5.184	-801	-13
Pajak Daerah	4.382	3.725	-657	-15
Retribusi Daerah	26	15	-11	-42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.098	815	-282	-26
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	479	629	149	31
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.069	4.254	185	5
Dana Bagi Hasil	1.351	1.508	157	12
Dana Alokasi Umum	1.619	1.611	-8	-0
Dana Alokasi Khusus	1.099	1.135	36	3
Dana Insentif Daerah	-	-	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8	9	1	17
PENDAPATAN DAERAH	10.062	9.447	-615	-6

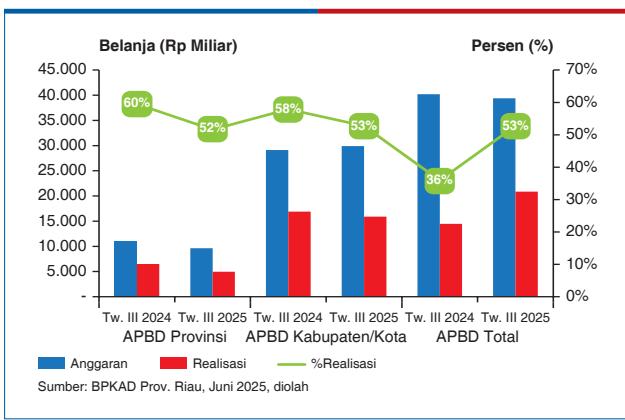
Sumber: BPKAD Provinsi Riau, data posisi September 2025, diolah



tercatat sebesar Rp23.836 miliar. Hingga periode laporan, rasio realisasi penerimaan pendapatan terhadap pagu juga meningkat dari 64,12% menjadi 62,54%. Berbeda dengan pendapatan, realisasi belanja daerah secara konsolidasi di Provinsi Riau terkontraksi 11,51% (yoY) menjadi Rp20.484 miliar pada triwulan III 2025 dari Rp23.559 miliar pada triwulan III 2024. Rasio realiasi belanja daerah terhadap pagu anggaran juga turun dari 58,49% menjadi 52,75%.



Grafik 2.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di wilayah Riau



Grafik 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di wilayah Riau

2. APBD PROVINSI RIAU TRIWULAN III 2025

Realisasi APBD Provinsi Riau untuk komponen pendapatan daerah pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun

persentase terhadap pagu anggaran. Komponen pendapatan daerah Provinsi Riau terealisasi sebesar Rp6.011 miliar atau terkontraksi 20,69% (yoY) dari realisasi triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp7.578 miliar. Rasio penerimaan pendapatan terhadap pagu pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 63,62%. Secara spasial, komponen Pendapatan Asli Daerah terkontraksi 14,45% (yoY) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terkontraksi 26,14% (yoY).

Selanjutnya, realisasi komponen belanja daerah Provinsi Riau mengalami perlambatan pada triwulan III 2025. Realisasi belanja daerah Provinsi Riau tercatat mencapai Rp4,970 miliar (51,98% dari pagu) atau terkontraksi 24,54% (yoY) dibandingkan triwulan III 2024 yang terealisasi Rp6,587 miliar (59,78% dari pagu). Perlambatan realisasi belanja daerah terjadi pada seluruh sub komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi yang terkontraksi 6,95% (yoY), Belanja Modal yang terkontraksi 84,17% (yoY), dan Belanja Transfer yang terkontraksi 33,84% (yoY).

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan III 2025

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan daerah didorong oleh kontraksi realisasi PAD dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari PAD tercatat sebesar Rp3.012 miliar atau terkontraksi 14,45% (yoY) dari triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.521 miliar. Sejalan dengan nominal penurunan, rasio realisasi PAD terhadap pagu anggaran tercatat turun dari 55,39% menjadi 58,11%.

Berdasarkan subkomponennya, lemahnya realisasi PAD disebabkan oleh melambatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi subkomponen Pajak Daerah pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp2.428 miliar atau terkontraksi 4,98% (yoY) dibanding triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.556 miliar.





Sementara berdasarkan komponen pembentuk pendapatan pajak daerah, penurunan penerimaan pajak daerah terjadi pada komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Realisasi penerimaan PKB pada triwulan III 2025 mencatatkan kontraksi sebesar 24,42% (yoY) dari yang sebelumnya senilai Rp946,78 miliar pada triwulan III 2024 menjadi Rp715,59 miliar pada triwulan III 2025.

Lebih lanjut, penerimaan pajak daerah dari komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga terpantau melambat pada triwulan III 2025. Penerimaan pajak daerah dari komponen BBNKB terealisasi sebesar Rp408,03 miliar, terkontraksi 36,20% (yoY) dibandingkan triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp639,59 miliar.

Di sisi lain, komponen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat tumbuh 26,76% (yoY) pada triwulan III 2025 atau senilai Rp933,98 miliar. PBBKB tersebut tumbuh dibandingkan triwulan III 2024 yang mencatatkan realisasi pendapatan senilai Rp736,81 miliar.

Sejalan dengan penerimaan dari Pajak Daerah, penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah juga mengalami perlambatan. Pada triwulan II 2025 realisasi penerimaan dari subkomponen ini tercatat senilai Rp8,35 miliar, lebih rendah dibanding realisasi triwulan III 2024 yang tercatat senilai Rp12,09 miliar atau melambat 30,91% (yoY).

Sejalan dengan realisasi PAD, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat mencatatkan kontraksi. Pada triwulan III 2025, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp2.993 miliar atau kontraksi 9,30% (yoY) dibandingkan realisasi triwulan III 2024 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp3,300 miliar. Rasio realisasi pendapatan transfer terhadap target tahunan juga mengalami peningkatan yang sebelumnya mencatatkan realisasi sebesar 60,89% dari pagu, menjadi 70,36% pada triwulan II 2025.

Berdasarkan komponennya, penurunan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disebabkan oleh turunnya realisasi dana perimbangan. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada triwulan III 2025 terkontraksi sebesar 1,70% (yoY) dari yang

Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025

Akun Anggaran (Satuan Miliar)	Tw. III 2024*			TW III 2025**			Growth (% yoY)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
PENDAPATAN DAERAH	11.412,98	6.825,92	59,81	9.447,26	6.010,66	63,62	-11,94
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.984,94	3.521,55	58,84	5.183,95	3.012,54	58,11	-14,45
Pajak Daerah	4.382,17	2.556,10	58,33	3.725,13	2.428,72	65,20	-4,98
Retribusi Daerah	25,97	12,09	46,55	15,01	8,35	55,65	-30,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.097,54	633,18	57,69	815,13	143,04	17,55	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	479,25	320,18	66,81	628,69	432,43	68,78	35,06
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.420,26	3.300,20	60,89	4.254,24	2.993,44	70,36	-9,30
DANA PERIMBANGAN	5.420,26	3.300,20	60,89	4.254,24	2.993,44	70,36	-9,30
Dana Bagi Hasil	1.351,08	1.089,46	80,64	1.508,32	1.019,97	67,62	-6,38
Dana Alokasi Umum	1.618,64	1.247,27	77,06	1.610,76	1.226,07	76,12	-1,70
Dana Alokasi Khusus	1.099,47	752,41	68,43	1.135,15	747,40	65,84	-0,67
Dana Alokasi Khusus - Fisik	255,63	91,59	35,83	137,17	31,74	23,14	-
Dana Alokasi Khusus - Non-Fisik	843,84	660,82	78,31	997,98	715,66	71,71	8,30
DANA INSENTIF DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
INSENTIF FISKAL	-	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	7,78	4,17	53,56	9,08	4,68	51,55	12,31

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

Keterangan: *) Data Posisi September 2024, **) Data Posisi September 2025

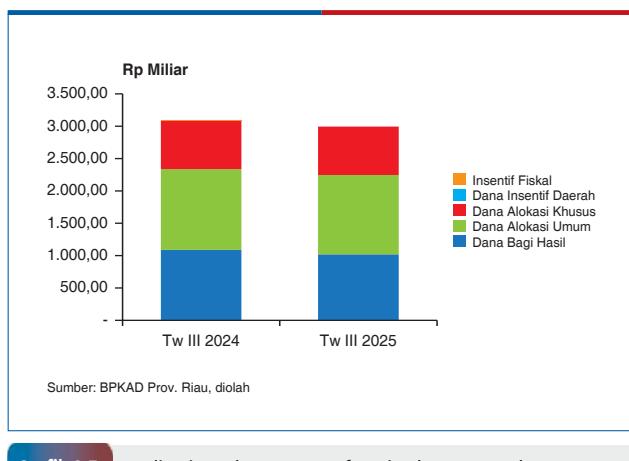


Tabel 2.4. Komponen Pendapatan Pajak Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025

Komponen Pembentuk Pendapatan Pajak Daerah	Tw III 2024*			Tw. III 2025**			Growth
	Realisasi (Rp miliar)	% Realisasi	Pangsa	Realisasi (Rp miliar)	% Realisasi	Pangsa	
Pajak Kendaraan Bermotor	946,78	63,46%	37,04%	715,59	79,83%	29,48%	-24,42
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	639,59	56,19%	25,02%	408,03	46,63%	16,81%	-36,20
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	736,81	64,11%	28,83%	933,98	70,51%	38,48%	26,76
Pajak Air Permukaan	29,03	61,18%	1,14%	38,87	73,11%	1,60%	33,92
Pajak Rokok	203,89	36,72%	7,98%	330,59	58,30%	13,62%	62,14

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

Keterangan: *) Data Posisi September 2024, **) Data Posisi September 2025



sebelumnya mencatatkan realisasi sebesar Rp1.247 miliar pada triwulan III 2024 menjadi Rp1.226 pada triwulan III 2025.

Sejalan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) mencatatkan realisasi sebesar Rp1,019 miliar atau kontraksi 6,38% (yoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp1,089 miliar.

2.2. Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Riau Triwulan III 2025

Kinerja belanja pemerintah Provinsi Riau juga mencatatkan perlambatan pada triwulan III 2025. Realisasi belanja daerah Provinsi Riau tercatat sebesar Rp4.970 miliar atau terkontraksi 24,54% (yoY)

dibandingkan triwulan III 2024 yang mencatatkan realisasi senilai Rp6.587 miliar. Sejalan dengan perlambatan nilai realisasi, rasio realisasi belanja daerah terhadap pagu anggaran juga melambat dari 59,78% menjadi 51,89%. Perlambatan realisasi belanja didorong oleh lemahnya realisasi pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer.

Realisasi belanja operasi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp3.954 miliar (60,71% dari pagu anggaran) atau terkontraksi 6,95% (yoY) dari triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp4.249 miliar (65,03% dari pagu anggaran). Berdasarkan subkomponennya, kontraksi dimaksud disumbang oleh belanja barang dan jasa yang tercatat mengalami perlambatan dari Rp1.641 miliar menjadi Rp1.356 miliar atau terkontraksi 17,34% (yoY). Selain itu, realisasi komponen belanja hibah juga turut menyumbang perlambatan tersebut. Belanja hibah terpantau menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Serapan belanja hibah pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp223 miliar, terkontraksi 45,21% (yoY) dari triwulan III 2024 yang terealisasi Rp407 miliar. Di sisi lain, perlambatan tersebut ditahan oleh komponen belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai pada triwulan III 2025 tercatat meningkat dari Rp2.192 miliar menjadi Rp2.366 miliar atau tumbuh 7,95% (yoY). Peningkatan didorong oleh realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN yang terealisasi sebesar Rp1.226 miliar atau mencapai 86,54% dari pagu anggaran.





Tabel 2.5. Realisasi Belanja Provinsi Riau Tahun 2024 dan 2025

Akun Anggaran (Rp. Miliar)	Tw. III 2024*			TW III 2025**			Growth (% yoy)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
BELANJA DAERAH	11.020,38	6.587,61	59,78	9.580,09	4.970,71	51,89	-24,54
BELANJA OPERASI	6.535,18	4.249,98	65,03	6.513,65	3.954,47	60,71	-6,95
Belanja Pegawai	2.941,77	2.192,43	74,53	2.961,78	2.366,65	79,91	7,95
Belanja Barang dan Jasa	2.981,39	1.641,31	55,05	3.126,44	1.356,72	43,39	-17,34
Belanja Hibah	567,89	407,10	71,69	406,04	223,03	54,93	-45,21
Belanja Bantuan Sosial	44,13	9,15	20,73	19,40	8,07	41,59	-11,80
BELANJA MODAL	2.215,90	1.053,71	47,55	1.492,31	166,84	11,18	-84,17
Belanja Modal Tanah	3,84	0,16	4,30	1,54	-	-	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310,38	125,54	40,45	450,08	54,42	12,09	-56,65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382,93	106,33	27,77	328,39	45,12	13,74	-57,57
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.481,87	782,68	52,82	649,67	66,21	10,19	-91,54
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36,61	38,93	106,31	61,82	0,96	1,56	-97,53
Belanja Modal Aset Lainnya	0,27	0,07	24,32	0,81	0,13	16,04	99,65
BELANJA TAK TERDUGA	13,33	-	-	50,34	-	-	-
Belanja Tak Terduga	13,33	-	-	50,34	-	-	-
BELANJA TRANSFER	2.255,97	1.283,91	56,91	1.523,80	849,40	55,74	-33,84
Belanja Transfer Bagi Hasil	1.794,97	955,63	53,24	1.290,89	817,50	63,33	-14,45
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	461,00	328,28	71,21	232,91	31,90	13,70	-90,28

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

Keterangan: *) Data Posisi September 2024, **) Data Posisi September 2025

Sejalan dengan serapan belanja operasi, realisasi belanja modal juga tercatat melambat pada periode laporan. Penyerapan belanja modal pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp166 miliar (11,18% dari pagu), turun 84,17% (yoy) dibandingkan triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.053 miliar. Berdasarkan jenisnya, penurunan belanja modal terutama terjadi pada realisasi belanja modal tanah dan belanja modal aset tetap lainnya.

3. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN / KOTA

Berbeda dengan pendapatan Pemerintah Provinsi Riau yang menurun, pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota secara agregat menunjukkan

peningkatan. Secara umum, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota tercatat sebesar Rp17.840 miliar, tumbuh 3,61% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi Rp17.218 miliar.

Secara spasial, peningkatan realisasi pendapatan terjadi pada mayoritas Kabupaten/Kota. Adapun realisasi pertumbuhan pendapatan paling lambat terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkontraksi sebesar 13,81% (yoy) dari realisasi pada triwulan III 2024. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tertinggi di Kabupaten Rokan Hilir yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 17,50% (yoy).



Tabel 2.6. Realisasi Pendapatan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025

(Rp Miliar)	Tw. III 2024*			Tw. III 2025**			Growth (% yoy)
	Kab/Kota	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	
Kampar	2.863	1.729	60,40	3.003	1.874	62,39	8,38
Bengkalis	3.929	2.510	63,86	4.132	2.633	63,72	4,91
Indragiri Hulu	1.637	1.103	67,38	1.652	1.221	73,88	10,67
Indragiri Hilir	2.171	1.543	71,06	2.201	1.486	67,54	-3,66
Pelalawan	1.848	1.280	69,25	1.896	1.187	62,59	-7,25
Rokan Hulu	1.807	1.349	74,64	1.941	1.455	74,98	7,89
Rokan Hilir	2.129	1.158	54,39	2.464	1.361	55,24	17,50
Siak	2.901	1.612	55,55	3.000	1.573	52,46	-2,38
Kuantan Singingi	1.519	783	51,59	1.642	856	52,13	9,24
Kep. Meranti	1.338	846	63,22	1.272	729	57,33	-13,81
Pekanbaru	2.996	1.908	63,67	3.209	2.026	63,12	6,18
Dumai	1.973	1.398	70,84	2.280	1.439	63,10	2,93
Provinsi Riau	10.062	6.618	65,77	9.447	6.011	63,62	-9,17
Realisasi Kab/Kota	27.113	17.218	63,51	28.692	17.840	62,18	3,61
Total Pendapatan	37.174	23.836	64,12	38.139	23.851	62,54	0,06

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

Keterangan: *) Data Posisi September 2024, **) Data Posisi September 2025

Akan tetapi, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp15.877 miliar atau melambat dibandingkan realisasi triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp16.971 miliar atau terkontraksi 6,45% (yoY). Rasio serapan belanja daerah terhadap pagu anggaran juga mengalami penurunan dari 42,13% menjadi 40,17%.

Perlambatan realisasi belanja terjadi hampir di seluruh Kab/Kota di Provinsi Riau. Perlambatan terdalam terjadi di Kabupaten Siak yang mencatatkan kontraksi realisasi belanja sebesar 16,19% (yoY). Sementara itu, masih ada daerah yang mengalami pertumbuhan penyerapan belanja daerah yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kab. Rokan Hulu dengan pertumbuhan masing-masing 18,70% (yoY) dan 1,53% (yoY). Pertumbuhan realisasi belanja daerah di kabupaten tersebut terutama didorong oleh tingginya belanja pegawai pada triwulan laporan.



Tabel 2.7. Realisasi Belanja Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Triwulan III 2024 dan 2025

(Rp Miliar)	Tw. III 2024*			Tw. III 2025**			Growth (% yoy)
	Kab/Kota	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Kampar	2.927	1.907	65,15	3.038	1.822	59,95	-4,47
Bengkalis	4.439	2.130	47,98	4.258	2.528	59,38	18,70
Indragiri Hulu	1.824	1.116	61,17	1.762	1.048	59,46	-6,12
Indragiri Hilir	2.568	1.411	54,94	2.405	1.175	48,85	-16,72
Pelalawan	2.122	1.140	53,72	2.000	939	46,95	-17,62
Rokan Hulu	1.823	1.177	64,57	1.967	1.195	60,78	1,53
Rokan Hilir	2.252	1.255	55,73	2.554	1.177	46,06	-6,25
Siak	3.107	1.813	58,36	3.201	1.520	47,48	-16,19
Kuantan Singingi	1.783	984	55,19	1.934	833	43,07	-15,34
Kep. Meranti	1.378	786	57,04	1.362	674	49,44	-14,29
Pekanbaru	2.986	1.916	64,18	3.189	1.698	53,23	-11,41
Dumai	2.050	1.336	65,20	2.270	1.270	55,94	-4,98
Provinsi Riau	11.020	6.588	59,78	9.580	4.971	51,89	-24,54
Realisasi Kab/Kota	40.279	16.971	42,13	39.521	15.877	40,17	-6,45
Total Belanja	40.279	23.559	58,49	39.521	20.848	52,75	-11,51

Sumber: BPKAD Provinsi Riau, diolah

Keterangan: *) Data Posisi September 2024, **) Data Posisi September 2025

4. STRATEGI KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan fiskal daerah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas perekonomian Riau. Pemerintah daerah melalui kebijakan fiskalnya, telah menempuh beberapa langkah strategis seperti (i) memberikan insentif kepada para pelaku usaha berupa insentif pajak terutama bagi pelaku usaha, (ii) meningkatkan belanja produktif sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah seperti untuk pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan (iii) melakukan penguatan pengawasan, manajemen keuangan, serta pemantauan pelaksanaan program yang tersebar di seluruh instansi daerah terkait agar belanja daerah dapat terealisasi tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan. Langkah strategis yang diambil diharapkan dapat bertindak sebagai katalis perekonomian Riau.

Pada tahun 2025, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Riau difokuskan pada peningkatan PAD melalui upaya optimalisasi

penerimaan dari sektor andalan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor. Terdapat dua strategi baru yang diimplementasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan PKB, yaitu (1) penyusutan nilai kendaraan bermotor sebesar 2% untuk keluaran tahun 2020 ke bawah; dan (2) keringanan denda keterlambatan bayar PKB sebesar 2% per bulan maksimal selama 15 bulan. Untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar PKB, Pemerintah Provinsi Riau juga terus memperkuat fasilitas pembayaran PKB melalui Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, maupun aplikasi Samsat Digital Nasional.

Selain itu, keberlanjutan implementasi elektronifikasi keuangan pemerintah daerah tetap diperkuat dan berlanjut hingga tahun 2025. Elektronifikasi keuangan pemerintah diharapkan dapat bertindak sebagai sarana efisiensi peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.



BAB 3

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,98% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; serta Pendidikan. Di sisi lain, peningkatan inflasi tersebut tertahan oleh deflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga. Secara spasial, seluruh Kab./Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami inflasi. Dengan sinergi TPID yang semakin solid, pada akhir tahun 2025, inflasi Riau diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$.



1. KONDISI UMUM

Pada triwulan III 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 5,08% (yoY) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,98% (yoY). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; serta Pendidikan. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga.

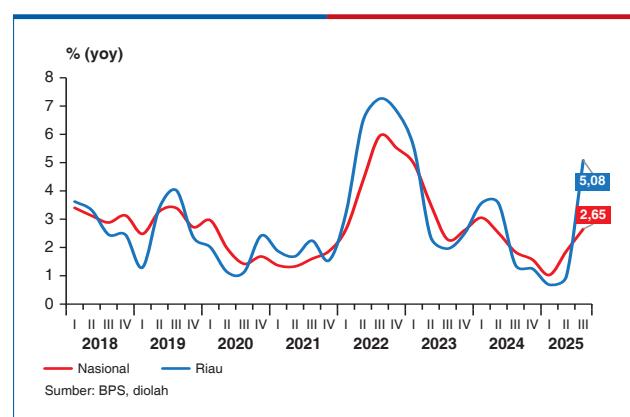
Ke depan, inflasi Riau pada triwulan IV 2025 diperkirakan lebih landai dibanding triwulan III 2025. Perkiraan inflasi yang lebih landai tersebut didukung oleh (i) normalisasi harga komoditas cabai merah pasca tingginya harga di triwulan sebelumnya serta peningkatan produksi di daerah sentra a.l. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh; (ii) stok beras SPHP yang terpantau aman dengan volume yang mencukupi; serta (iii) efektivitas upaya intervensi harga, peningkatan produksi, dan jaminan kelancaran distribusi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat (TPID dan TPIP), seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Kerjasama Antar Daerah (KAD), pembentukan kios pengendali inflasi di pasar pantauan, serta (iv) optimalisasi peran BUMD Pangan dalam pengendalian inflasi daerah melalui kehadiran Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN).

Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran $2,5\pm1\%$ (yoY), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking*, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta minimnya rencana penyesuaian tarif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau (*administered prices*) sehingga diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2025.

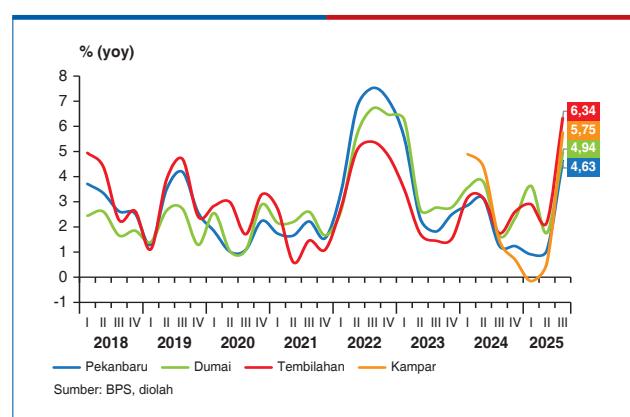
2. PERKEMBANGAN INFLASI RIAU

Pada triwulan III 2025, Riau mengalami inflasi sebesar 5,08% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 0,98% (yoY). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Nasional yang juga mengalami peningkatan dari 1,87% (yoY) pada triwulan II 2025 menjadi 2,65% (yoY) pada triwulan III 2025. Peningkatan tekanan inflasi tahunan Riau dipengaruhi oleh inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas cabai merah dan emas perhiasan.

Secara spasial, seluruh Kab/Kota sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami inflasi. Pada triwulan III 2025, Kota Tembilahan mengalami inflasi tertinggi yang mencatatkan inflasi sebesar 6,34% (yoY). Selanjutnya, diikuti oleh Kab. Kampar yang



Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional (% yoY)



Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi 4 Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Riau (% yoY)





mencatatkan inflasi sebesar 5,75% (yoy), kemudian Kota Dumai yang mencatatkan inflasi sebesar 4,94% (yoy), serta Kota Pekanbaru yang mencatatkan inflasi sebesar 4,63% (yoy).

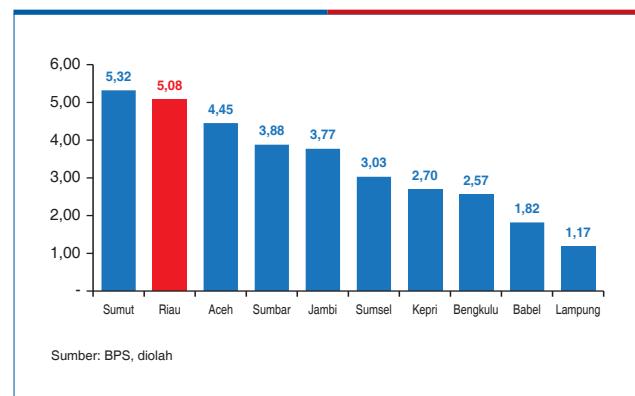
Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau pada triwulan III 2025 dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian & Alas Kaki; Kesehatan; Pendidikan; Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran; serta, Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tersebut tertahan oleh deflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga; Transportasi; Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan; serta, Rekreasi, Olahraga & Budaya.

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi Riau pada Triwulan III 2025 berada pada urutan kedua tertinggi setelah Sumatera Utara yang mencatatkan realisasi inflasi sebesar 5,32% (yoy).

Lebih lanjut, berdasarkan komoditas utama penyumbang inflasi/deflasi, inflasi Riau terutama didorong oleh komoditas Cabai Merah, Emas Perhiasan, Bawang Merah, Daging Ayam Ras, Ayam Hidup, dan Sigaret Kretek Mesin. Hal tersebut dipengaruhi oleh (i) gagal panen Cabai Merah akibat kondisi musim kemarau khususnya di daerah sentra produksi, yaitu Sumatera Barat, serta turunnya produksi Cabai Merah di Aceh dan Sumatera Utara; (ii) ketidakpastian kondisi geopolitik dunia yang

mendorong permintaan *safe-haven asset* berupa Emas; (iii) peningkatan harga komoditas ayam hidup dan daging ayam ras yang terjadi sejalan dengan peningkatan harga produksi akibat naiknya harga pakan ayam di tengah tingginya permintaan; serta, (iv) transmisi kenaikan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok pada 1 Januari 2025 (PMK 97/2024 HJE Rokok dengan rata-rata kenaikan 9,53% dan PMK 96/2024 HJE Rokok Elektrik dengan rata-rata kenaikan 11,34% dan Harga Pengolahan Tembakau dengan rata-rata kenaikan 6,19%.

Di sisi lain, peningkatan inflasi tertahan oleh deflasi kentang. Penurunan harga kentang menjadi penyumbang deflasi terbesar pada triwulan III 2025 melanjutkan deflasi dari triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh surplus produksi yang terjadi di sentra produksi a.l Sumatera Utara dan Pulau Jawa.



Grafik 3.3. Inflasi Seluruh Provinsi di Sumatera Bulan September 2025 (%yoy)

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Tahunan Riau (%andil yoy)

PENYUMBANG INFLASI			
TW II 2025		TW III 2025	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Emas Perhiasan	0,66	Cabai Merah	1,33
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,18	Emas Perhiasan	0,72
Minyak Goreng	0,16	Bawang Merah	0,35
Daging Ayam Ras	0,10	Daging Ayam Ras	0,25
Beras	0,09	Ayam Hidup	0,17
Nasi dengan Lauk	0,09	Sigaret Kretek Mesin	0,16

Sumber: BPS, diolah

PENYUMBANG DEFLESI			
TW II 2025		TW III 2025	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Cabai Merah	(0,98)	Kentang	(0,05)
Bawang Merah	(0,26)	Bawang Putih	(0,04)
Kentang	(0,06)	Sabun Cair/Cuci Piring	(0,03)
Cabai Rawit	(0,05)	Ikan Nila	(0,02)
Ikan Baung	(0,04)	Tarif Parkir	(0,02)
Cabai Hijau	(0,03)	Bensin	(0,02)

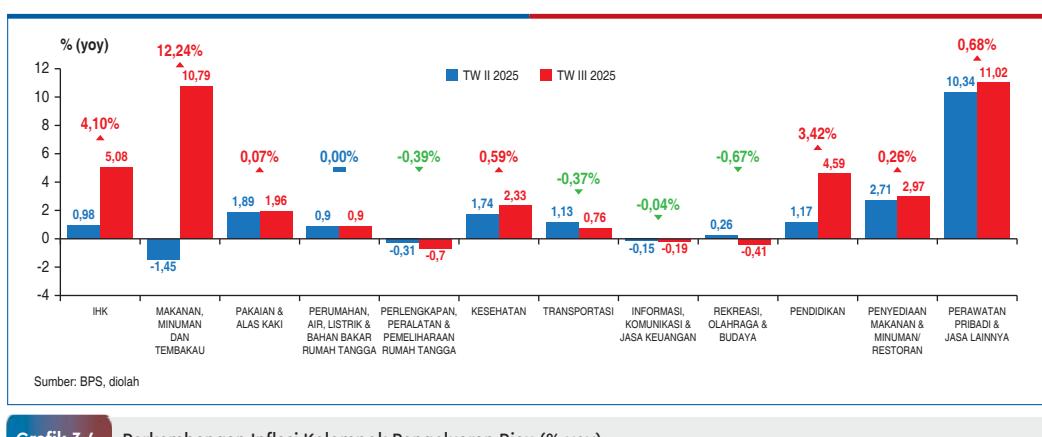


2.1. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan III 2025 terjadi pada 6 (enam) kelompok, yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian & Alas Kaki; Kesehatan; Pendidikan; Penyediaan Makanan & Minuman/ Restoran; serta, Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi ini tertahan oleh 4 (empat) kelompok pengeluaran yaitu Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga; Transportasi; Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan; serta, Rekreasi, Olahraga & Budaya. Sementara itu kelompok Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga berada pada level stabil.

ras sebesar 0,25% (yo), ayam hidup sebesar 0,17% (yo), sigaret kretek mesin sebesar 0,16% (yo), minyak goreng dan ikan serai yang masing-masing sebesar 0,14% (yo), beras sebesar 0,10% (yo), serta komoditas lainnya dengan andil di bawah 0,1%.

Hal ini sejalan dengan (i) penurunan produksi panen akibat kondisi musim kemarau khususnya di sentra produksi seperti Sumatera Barat dan turunnya produksi cabai merah di Aceh dan Sumatera Utara; (ii) peningkatan permintaan konsumsi daging ayam di tengah peningkatan harga produksi imbas kenaikan harga pakan ayam; serta (iii) transmisi kenaikan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok pada 1 Januari 2025 (PMK 97/2024 HJE Rokok dengan rata-rata kenaikan 9,53% dan PMK 96/2024 HJE Rokok



KELOMPOK PENDORONG PENINGKATAN TEKANAN INFLASI

1. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada triwulan III 2025, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 10,79% (yo), meningkat dari triwulan II 2025 yang mencatatkan deflasi 1,45% (yo). Hal ini tercermin dari kenaikan indeks dari 104,91 pada September 2024 menjadi 116,23 pada September 2025.

Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 3,42% (yo) dengan komoditas yang memberikan andil inflasi, yaitu cabai merah sebesar 1,33% (yo), bawang merah sebesar 0,35% (yo), daging ayam

Elektrik dengan rata-rata kenaikan 11,34% dan Harga Pengolahan Tembakau dengan rata-rata kenaikan 6,19%.

2. Pakaian dan Alas Kaki

Pada triwulan III 2025, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,96% (yo), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang mencatatkan inflasi sebesar 1,89% (yo) atau terjadi kenaikan indeks dari 102,86 pada September 2024 menjadi 104,88 pada September 2025. Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh komoditas sandal karet pria, baju anak stelan, baju muslim pria,





baju kaos kerah tanpa kerah/t-shirt pria, sepatu anak, baju kaos tanpa kerah/t-shirt anak yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,01% (yoy).

3. Kesehatan

Pada triwulan III 2025 kelompok Kesehatan mengalami inflasi sebesar 2,33% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 1,74% (yoy), atau terjadi kenaikan indeks dari 103,49 pada September 2024 menjadi 105,90 pada September 2025. Adapun subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu subkelompok jasa rawat inap yang mencatatkan inflasi sebesar 5,10% (yoy), diikuti subkelompok jasa kesehatan lainnya sebesar 2,85%, subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan lainnya sebear 2,85%, dan subkelompok jasa rawat jalan sebesar 0,84% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh komoditas tarif rumah sakit yang memberikan andil 0,05%, serta obat gosok dan obat dengan resep yang memberikan andil sebesar 0,01%.

4. Pendidikan

Kelompok Pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 1,17% (yoy). Pada September 2025, kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,21% (yoy) dengan komoditas utama yang memberikan andil inflasi, yaitu akademi/perguruan tinggi sebesar 0,15%, sekolah dasar sebesar 0,03%, taman kanak-kanak sebesar 0,02%, serta sekolah menengah pertama sebesar 0,01%.

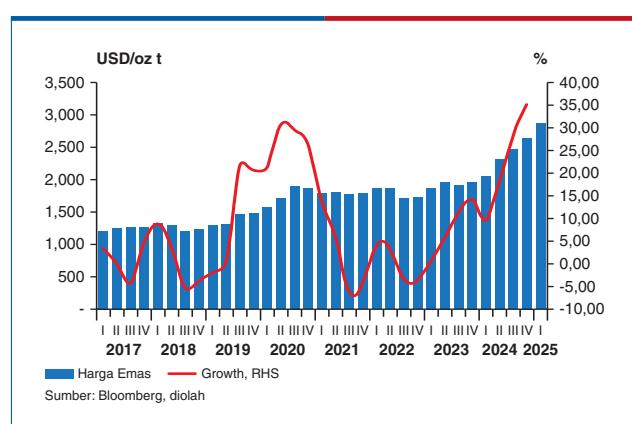
5. Penyedia Makanan & Minuman/Restoran

Pada triwulan III 2025, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 2,71% (yoy), atau terjadi kenaikan indeks dari 109,83 pada September 2024 menjadi 113,09

pada September 2025. Komoditas penyumbang utama tekanan inflasi secara *year on year* (yoy) pada kelompok ini, yaitu nasi dengan lauk yang memberikan andil sebesar 0,10%, ketupat/lontong sayur dengan andil 0,04%, sate sebesar 0,03%, bakso siap santap dan soto yang masing-masing sebesar 0,02%, serta komoditas lainnya yang memberikan andil sebesar 0,01%.

6. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok ini pada triwulan III 2025 mencatatkan inflasi sebesar 11,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,34% (yoy). Kelompok ini memberikan andil inflasi *y-on-y* sebesar 0,79% dengan dorongan inflasi terutama berasal dari komoditas emas perhiasan, yaitu sebesar 0,72%. Hal ini sebagai akibat dari peningkatan harga emas dunia yang tertransmisi ke kenaikan harga emas perhiasan domestik. Kenaikan harga ini terus menunjukkan tren peningkatan setiap triwulannya seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan, ketegangan geopolitik, dan ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral utama yang melemahkan nilai dolar AS. Kondisi ini mendorong investor beralih ke emas sebagai aset lindung nilai (*safe-haven*) untuk menjaga nilai kekayaan mereka sehingga permintaan naik dan harga emas terdorong lebih tinggi.



Grafik 3.5. Perkembangan Harga Emas Global



KELOMPOK PENAHAN PENINGKATAN TEKANAN INFLASI

1. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok ini pada triwulan III 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,70% (yoY), melanjutkan tren penurunan dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,31 (yoY). Penurunan tekanan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin serta subkelompok tekstil rumah tangga yang masing-masing mencatatkan deflasi sebesar 1,56% (yoY) dan 0,19% (yoY). Adapun komoditas utama yang memberikan andil deflasi di kelompok ini, yaitu sabun cair/cuci piring sebesar 0,03%, pengharum cucian/pelembut dan sabun detergen bubuk yang masing-masing sebesar 0,01%.

2. Transportasi

Kelompok Transportasi pada triwulan III 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,76% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 1,13% (yoY). Pada September 2025, kelompok ini memberikan andil sebesar 0,10% (yoY), dengan komoditas yang dominan memberikan andil, yaitu mobil sebesar 0,07%, sepeda motor sebesar 0,04%, serta tarif kendaraan travel, perbaikan ringan kendaraan, dan biaya pengiriman barang yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01%.

3. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok ini mencatatkan deflasi sebesar 0,19% (yoY) pada triwulan III 2025, lebih rendah dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,15% (yoY). Berdasarkan komoditas, penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh telepon seluler yang memberikan andil sebesar 0,01%.

4. Rekreasi, Olahraga & Budaya

Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya pada triwulan III 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,41% (yoY), berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,26% (yoY). Subkelompok yang mengalami penurunan, yaitu subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga sebesar 3,07% (yoY), sedangkan subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah mencatatkan inflasi sebesar sebesar 0,73%. Adapun komoditas yang memberikan andil pada kelompok ini yaitu makanan hewan peliharaan sebesar 0,01%.

5. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok ini berada pada level stabil dengan tingkat tekanan inflasi sebesar 0,90% (yoY) pada triwulan III 2025 atau sama seperti triwulan II 2025. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan adalah sewa rumah sebesar 0,08% dan bahan bakar rumah tangga dan iuran pembuangan sampah yang masing masing memberikan andil sebesar 0,01%.

2.2. Analisis Inflasi Spasial Riau

Pada triwulan III 2025, secara spasial seluruh Kab/Kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tembilahan yang mencatatkan inflasi sebesar 6,34% (yoY) dari yang sebelumnya sebesar 2,19% (yoY) pada triwulan II 2025. Kabupaten Kampar juga mencatatkan peningkatan inflasi dari triwulan II yang tercatat sebesar 0,57% (yoY) menjadi 5,75% (yoY). Kota Pekanbaru turut mengalami peningkatan inflasi dari 1,08% (yoY) menjadi sebesar 4,63% (yoY) serta Kota Dumai yang mengalami peningkatan inflasi dari 1,11% (yoY) menjadi 4,94% (yoY).

Berdasarkan 5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi, terdapat kemiripan pada seluruh kab/kota IHK. Komoditas cabai merah dan emas



Tabel 3.2. Perkembangan Inflasi Spasial Riau (%yoy)

Wilayah	TW II 2025	TW III 2025	Arah
Provinsi Riau	0,98	5,08	▲
Kota Pekanbaru	1,08	4,63	▲
Kota Dumai	1,11	4,94	▲
Kota Tembilahan	2,19	6,34	▲
Kab. Kampar	0,57	5,75	▲

Sumber: BPS, diolah

perhiasan terpantau menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di setiap kab/kota namun dengan andil inflasi yang bervariasi. Di sisi lain, kentang dan bawang putih terpantau menjadi komoditas utama penyumbang deflasi di setiap kab/kota, sejalan dengan melimpahnya pasokan pada periode panen raya yang didukung oleh distribusi yang lancar.

Tabel 3.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Kab/Kota IHK Riau Triwulan III 2025 (%andil yoy)

INFLASI	RIAU		PEKANBARU		DUMAI		TEMBILAHAN		KAMPAR	
	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
INFLASI	Cabai Merah	1,33	Cabai Merah	1,05	Cabai Merah	1,33	Emas Perhiasan	1,56	Cabai Merah	1,87
	Emas Perhiasan	0,72	Emas Perhiasan	0,83	Emas Perhiasan	0,65	Cabai Merah	1,15	Bawang Merah	0,61
	Bawang Merah	0,35	Akademi/Perguruan Tinggi	0,28	Bawang Merah	0,36	Daging Ayam Ras	0,57	Emas Perhiasan	0,41
	Daging Ayam Ras	0,25	Bawang Merah	0,21	Daging Ayam Ras	0,35	Bawang Merah	0,29	Daging Ayam Ras	0,33
	Ayam Hidup	0,17	Nasi dengan Lauk	0,18	Ikan Serai	0,24	Ikan Serai	0,25	Minyak Goreng	0,23
	Sigaret Kretek Mesin	0,16								
DEFLASI	Kentang	(0,05)	Kentang	(0,05)	Baju Muslim Wanita	(0,03)	Ikan Nila	(0,06)	Sabun Cair/Cuci Piring	(0,06)
	Bawang Putih	(0,04)	Tarif Parkir	(0,04)	Bensin	(0,03)	Bawang Putih	(0,04)	Bawang Putih	(0,06)
	Sabun Cair/Cuci Piring	(0,03)	Ikan Nila	(0,03)	Tahu Mentah	(0,03)	Ketimun	(0,03)	Kentang	(0,05)
	Ikan Nila	(0,02)	Bawang Putih	(0,03)	Masker	(0,02)	Kentang	(0,03)	Ikan Baung	(0,04)
	Tarif Parkir	(0,02)	Kangkung	(0,03)	Susu Cair Kemasan	(0,02)	Cabai Rawit	(0,03)	Wortel	(0,04)
	Benisn	(0,02)								

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Kab/Kota IHK Riau Triwulan III 2025 (%yoy)

Kelompok Pengeluaran	Riau	Pekanbaru	Dumai	Tembilahan	Kampar
UMUM	5,08	4,63	4,94	6,34	5,75
Makanan, Minuman, dan Tembakau	10,79	9,52	11,71	11,54	12,11
Pakaian dan Alas Kaki	1,96	0,77	1,08	0,69	4,99
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	0,90	0,52	0,43	0,45	1,74
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	(0,70)	(0,60)	0,30	0,84	(1,50)
Kesehatan	2,33	2,86	1,24	2,46	0,84
Transportasi	0,76	0,44	1,20	1,36	1,07
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	(0,19)	(0,25)	0,22	0,01	(0,24)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	(0,41)	(0,89)	1,12	(0,25)	(0,11)
Pendidikan	4,59	6,46	2,59	2,01	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,97	3,99	2,07	1,54	1,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	11,02	12,48	9,22	17,68	7,22

Sumber: BPS, diolah

Lebih tinggi dari inflasi Riau



3. TRACKING INFLASI TRIWULAN IV 2025

Pada triwulan IV 2025 (hingga Oktober 2025) inflasi Riau masih menunjukkan tren peningkatan tekanan inflasi. Pada Oktober 2025, inflasi Riau tercatat sebesar 4,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatatkan inflasi sebesar 5,08% (yoy), terutama dipengaruhi oleh inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mencatatkan inflasi 13,92% (yoy); Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatatkan inflasi 9,51% (yoy); serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang mencatatkan inflasi 3,34% (yoy).

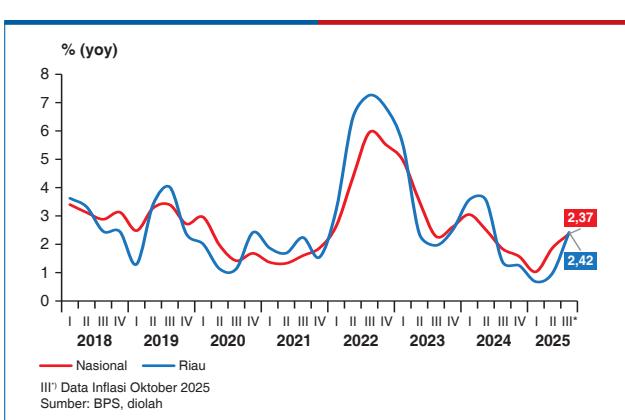
Di sisi lain, tekanan inflasi hingga Oktober 2025 ditahan oleh Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang mencatatkan deflasi sebesar 0,78% (yoy); Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,55% (yoy); serta Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mencatatkan deflasi sebesar 0,17% (yoy).

Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tembilahan sebesar 6,14% (yoy), diikuti Kota Pekanbaru sebesar 5,01% (yoy), Kota Dumai sebesar 4,4% (yoy), dan Kab. Kampar sebesar 4,68% (yoy).

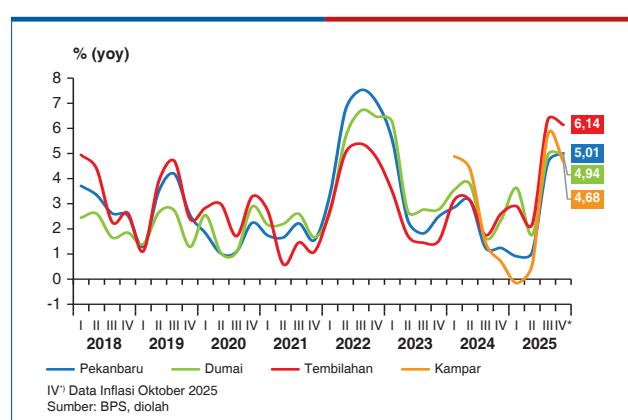
Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan pada bulan Oktober 2025 terutama didorong oleh kenaikan harga cabai merah, emas perhiasan, akademisi/perguruan tinggi, sigaret kretek mesin, ikan serai,

dan daging ayam ras seiring dengan (i) peningkatan harga cabai merah akibat minimnya produksi di tengah musim kemarau pada triwulan sebelumnya; (ii) peningkatan harga emas global sejalan dengan peningkatan ketidakpastian global dan kenaikan permintaan investor terhadap *safe-haven asset*, (iii) peningkatan permintaan daging ayam ras dan ayam hidup oleh masyarakat di tengah peningkatan biaya produksi akibat meningkatnya harga pakan ternak; serta (iv) transmisi kenaikan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok pada 1 Januari 2025 (PMK 97/2024 HJE Rokok dengan rata-rata kenaikan 9,53% dan PMK 96/2024 HJE Rokok Elektrik dengan rata-rata kenaikan 11,34% dan Harga Pengolahan Tembakau dengan rata-rata kenaikan 6,19%.

Ke depan, laju inflasi Riau masih menghadapi sejumlah tantangan seiring dengan beberapa *upside risks* yang membayangi perkembangan harga dan jasa, di antaranya peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pada periode *peak season* HBKN, peningkatan permintaan pangan oleh masyarakat, peningkatan Indeks Harga Imported Inflation (IHIM) Pangan, kenaikan tarif tol Pekanbaru – Bangkinang – Kota Kampar dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, serta peningkatan harga emas perhiasan pada tahun 2025. Meskipun terdapat sejumlah *upside risks*, inflasi Riau untuk tahun 2025 diperkirakan dapat terkendali, seiring dengan perbaikan produksi hortikultura dan beras dari sentra produksi tetangga Provinsi Riau di akhir



Grafik 3.6. Perkembangan Inflasi Bulanan Riau dan Nasional (%yoy)



Grafik 3.7. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota/Kabupaten IHK (%yoy)





Tabel 3.5.

Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Riau Oktober 2025 (%andil yoy)

Okt-25			
INFLASI		DEFLASI	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Cabai Merah	1,58	Bawang Putih	(0,04)
Emas Perhiasan	0,93	Sabun Cair/Cuci Piring	(0,03)
Akademik/Perguruan Tinggi	0,16	Tarif Parkir	(0,02)
Sigaret Kretek Mesin	0,14	Terong	(0,02)
Ikan Serai	0,13	Ikan Nila	(0,02)
Daging Ayam Ras	0,13	Jengkol	(0,02)

Sumber: BPS, diolah

tahun 2025, cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, prognosis peningkatan produksi jagung, kebijakan pemerintah untuk menjaga laju inflasi *administered prices* (a.l tarif angkutan udara, tarif parkir, tarif listrik), serta efektivitas penguatan sinergi TPIP dan TPID melalui Program GNPIP bersinergi dengan BUMD Pangan yang diharapkan dapat menjaga laju inflasi agar tetap berada pada rentang sasaran target inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoY).

4. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Sepanjang periode laporan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mengendalikan inflasi, terutama melalui Program GNPIP. Pengendalian inflasi yang dilakukan terus berfokus pada Kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), sebagai berikut:

a. Keterjangkauan Harga

TPID se-Provinsi Riau rutin menyelenggarakan pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan berbagai inovasi, di antaranya:

- Pengembangan gerai/toko pangan murah di Provinsi Riau, yaitu Hortimart, Kedai Puantipa, dan Kios Puan Berseri yang dikelola oleh TPID

Provinsi Riau dan TPID Kota Pekanbaru. Selain itu, BUMD Pangan Riau juga telah mengoperasikan 3 (tiga) kios pengendali inflasi di pasar pantauan Kota Pekanbaru, serta 1 (satu) kios pengendali inflasi di Kota Dumai.

- Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah oleh OPD, instansi vertikal, dan pelaku usaha, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau sebagai anggota TPID turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah, Makin Murah dengan QRIS. Selain itu, kolaborasi pasar murah turut melibatkan perusahaan, pelaku usaha, dan komunitas daerah untuk berpartisipasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
- Penguatan implementasi program inovatif yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, yaitu Mobil Pak Aman (Mobil Pangan Keliling Andalan, Murah, dan Amanah) atau dikenal juga dengan Mobil Pak Awan (Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan) yang rutin melaksanakan pasar murah ke titik rawan pangan di Kota Pekanbaru.
- Pelaksanaan Pasar Tani dengan skema melibatkan petani untuk berjualan langsung di pasar sehingga petani dapat menjual dengan harga di atas harga jual ke distributor atau pengepul, namun tetap lebih rendah dibandingkan harga pasar. Skema ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani di tengah deflasi komoditas hortikultura.
- Pada tahun 2025, TPID Provinsi Riau telah mencanangkan 127 titik pasar murah.

b. Ketersediaan Pasokan

Sebagai daerah yang defisit neraca pangan, pengendalian inflasi di Provinsi Riau cukup bergantung pada pasokan dari daerah penghasil, sehingga TPID Riau berkomitmen terus melakukan langkah sebagai berikut:



- Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang bersifat B2B antara BUMD Pangan Provinsi Riau (PT Riau Pangan Bertuah), PT Sarana Pangan Madani (PT SPM), dan Koperasi Propas Syariah dengan produsen beras, telur ayam ras, champion cabai merah, dan champion bawang merah di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, telah dilaksanakan juga KAD kepada produsen besar di Provinsi Lampung pada komoditas beras, jagung, dan telur ayam ras guna meningkatkan diversifikasi sumber pangan Provinsi Riau.
- TPID se-Provinsi Riau bersama Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung peningkatan produktivitas pertanian Riau, terutama beras dan aneka cabai melalui penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) serta alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani yang potensial di Riau. Kegiatan ini disertai dengan pelatihan *best practice* budidaya bersama petani.
- Optimalisasi pemanfaatan program bantuan mobilisasi pangan yang disediakan oleh BAPANAS untuk mendukung GPM tahun dan Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Bank Indonesia.
- Panen cabai merah di Kabupaten Kampar dan Beras di Rokan Hilir pada Februari 2025.
- Peluncuran Toko Pengendalian Inflasi (TOPAN) sebagai swalayan pertama di Pulau Sumatera yang menyediakan pasokan *volatile food* dengan harga murah sebagai hasil kerjasama antara TPID Provinsi Riau dan PT. Riau Pangan Bertuah (PT. RPB) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pangan Provinsi Riau.
- Pelaksanaan Festival FESPA UNIK (Festival Kampung Pangan Unggul dan Kreatif) yang menjadi inovasi program kerja TPID sekaligus sebagai bentuk kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dengan KPwBI Prov. Riau di dalam mendukung diversifikasi pangan yang bermuara pada pengendalian inflasi pangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada

komoditas pangan tertentu yang menyumbang inflasi, antara lain beras dan cabai segar yang dapat diganti dengan komoditas lain seperti sagu, singkong, dan komoditas turunan/olahan lainnya.

c. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjamin kelancaran distribusi pasokan, TPID di Provinsi Riau berupaya memberikan subsidi ongkos angkut untuk mengurangi biaya distribusi, serta terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran jalur distribusi, terutama akses ke daerah rawan pangan, kepulauan, dan setiap momen *peak season*.

- TPID Kab. Kuantan Singgingi berhasil mengembangkan <https://padi.kuansing.go.id/>, serta TPID Provinsi Riau memiliki WARUNG SEGAR yang merupakan pasar digital sederhana yang dapat menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen pangan secara digital.
- TPID se-Provinsi Riau melalui Dinas Perhubungan terus menjamin kelancaran distribusi pangan dan efisiensi rantai pasok, salah satunya melalui kebijakan di pelabuhan penyeberangan Riau untuk memprioritaskan kendaraan yang membawa komoditas pangan.
- TPID Riau telah menjalin KAD B2B dengan Provinsi Sumatera Barat melalui penandatanganan 12 MoU KAD. KAD ini juga telah ditindaklanjuti dengan transaksi sekitar 15.000 butir telur, 1.800 kg beras, dan 500 kg bawang merah untuk disalurkan langsung ke pasar murah selama Ramadan, dengan dukungan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) oleh Bank Indonesia.
- PT. RPB (BUMD Pangan Provinsi Riau) telah melaksanakan 2 MoU KAD untuk komoditas beras Sokan dan Anak Daro bersama dengan Huller Neraca dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat guna memastikan kelancaran distribusi dan pasokan ke Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN).



d. Komunikasi Efektif

Untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi TPID, serta menjalin komunikasi yang efektif baik internal TPID maupun dengan masyarakat, TPID Riau telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Komunikasi Efektif dan *Moral Suasion* dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga, kesediaan stok pangan, antisipasi spekulasi harga, serta himbauan berbelanja bijak kepada masyarakat.
- Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi rutin setiap minggunya bersama TPIP.
- HLM TPID se-Provinsi Riau dalam rangka HBKN Ramadan dan Idulfitri pada 11 Maret 2025.
- HLM TPID Bengkalis dalam rangka HBKN Idul Adha pada 28 Mei 2025.
- HLM TPID dan TP2DD se-Provinsi Riau tanggal 29 Agustus 2025.
- HLM TPID Kota Pekanbaru tanggal 15 Oktober 2025.
- Edukasi belanja bijak melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui TV Lokal dan melibatkan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat selama Ramadan.

Ke depan, koordinasi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui kerangka TPIP, TPID, dan program GNPIP menjadi kunci yang akan terus dioptimalkan sehingga inflasi Riau keseluruhan tahun 2025 tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau.





BOKS 2

Capacity Building Poktan dan Usaha Ponpes Binaan ke Balai Lelang Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi (PPHPM) Sleman, D.I.Yogyakarta

Pembentukan klaster cabai merah di Provinsi Riau oleh KPwBI Provinsi Riau didorong adanya kebutuhan untuk memperkuat produksi sekaligus memberdayakan petani lokal. Cabai merah dipilih karena merupakan salah satu komoditas pangan paling strategis dan sensitif terhadap gejolak harga. Dalam lima tahun terakhir, cabai merah secara konsisten muncul sebagai penyumbang utama inflasi pangan di Riau, terutama ketika terjadi gangguan pasokan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, ataupun penurunan produksi musiman. Untuk itu, KPwBI Provinsi Riau mengembangkan klaster cabai di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi, guna membangun basis produksi yang lebih stabil dan mampu menjawab tantangan pengendalian inflasi daerah.

Harga cabai di Riau kerap kali berfluktuasi, baik karena faktor produksi maupun rantai distribusi yang belum efisien. Pada beberapa waktu, seperti pada Oktober 2025, lonjakan harga cabai merah menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya inflasi di Riau. Namun, pada periode lain seperti Juni 2025, penurunan drastis harga cabai menyebabkan deflasi. Variabilitas yang ekstrem ini menunjukkan bahwa petani menghadapi risiko besar dalam menjaga pendapatan, sementara konsumen terpapar gejolak harga yang mengganggu kestabilan ekonomi rumah tangga. Situasi ini menguatkan urgensi pembangunan kapasitas bagi kelompok tani agar mereka dapat menghasilkan, mengelola, dan memasarkan cabai dengan lebih adaptif dan efisien.



Menjawab kebutuhan tersebut, KPwBI Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan *capacity building* untuk kelompok tani dan unit usaha pondok pesantren binaan, khususnya yang fokus pada budidaya cabai merah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 November 2025 melalui kunjungan langsung ke koperasi petani PPHPM di Sleman, D.I.Yogyakarta. Melalui kunjungan ini, petani dan perwakilan usaha ponpes



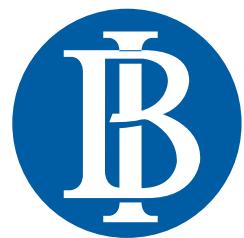
mendapat kesempatan untuk mempelajari model budidaya, manajemen pascapanen, serta strategi pemasaran yang terbukti berhasil membantu petani di Sleman dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok cabai.

Salah satu pengetahuan utama yang dipelajari adalah mekanisme lelang cabai yang telah dijalankan PPHPM. Skema ini telah berkembang sejak 2017 dan pada 2021 PPHPM telah bertransformasi menjadi koperasi yang mengelola lelang secara lebih profesional. Prosesnya meliputi pengumpulan dan penimbangan hasil panen, sortasi dan *grading*, kemudian *input* data ke *platform* digital seperti diPanen.id. Pedagang atau pembeli kemudian memasukkan penawaran harga secara terbuka melalui aplikasi, sehingga proses terbentuknya harga berlangsung lebih transparan, kompetitif, dan adil. Pengumuman pemenang lelang dilakukan setelah batas waktu tertentu, kemudian transaksi dilanjutkan dengan proses pembayaran serta distribusi yang terkoordinasi.

Keberhasilan PPHPM tidak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani anggota, pedagang (*bidder*), titik kumpul, koperasi, hingga pemerintah daerah. Dengan peran yang saling melengkapi, mekanisme lelang mampu menjawab masalah klasik petani terkait ketidakpastian harga dan panjangnya rantai distribusi. Meski demikian, model ini terus dikembangkan, termasuk dengan penyempurnaan fitur aplikasi digital, peningkatan kapasitas pengurus koperasi, hingga penataan kebijakan kontrak antara petani dan titik kumpul agar sistem berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan *capacity building* ini, klaster cabai binaan KPwBI Provinsi Riau diharapkan mampu mengadopsi praktik baik dari PPHPM, khususnya dalam hal transparansi harga dan efisiensi pemasaran. Dengan memperkuat manajemen rantai pasok dan memanfaatkan teknologi digital, petani di Riau dapat meningkatkan daya tawar, mengurangi fluktuasi harga ekstrem, dan pada akhirnya berkontribusi pada stabilisasi harga pangan di tingkat provinsi. Ke depan, KPwBI Provinsi Riau bersama pemangku kepentingan daerah berencana memperluas pendampingan dan membangun model pemasaran yang sesuai dengan konteks lokal Riau, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh petani dan masyarakat luas.





Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB 4

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Kinerja intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit kepada sektor korporasi, rumah tangga, maupun UMKM di Provinsi Riau tumbuh meyakinkan. Likuiditas perbankan terpantau turut berkontribusi mendorong kredit/pembiayaan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan di daerah. Terlebih lagi, kualitas kredit juga terpantau masih tetap terjaga dalam taraf risiko yang terkendali.



1. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN RIAU

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau relatif kuat, sejalan dengan bertumbuhnya perekonomian daerah. Penyaluran kredit konvensional kepada korporasi yang berlokasi proyek di Provinsi Riau tercatat meningkat pada triwulan III 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit yang sama kepada Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat.

Penyaluran kredit konvensional yang berlokasi proyek di Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp172,32 triliun, atau tumbuh 15,85% (yoY) yang lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,66% (yoY). Penyaluran kredit dengan lokasi proyek pada triwulan III 2025 dikontribusikan terutama oleh kredit produktif terutama Kredit Modal Kerja (KMK) dan kredit investasi yang mencatatkan perbaikan pertumbuhan. Sementara itu, pertumbuhan Kredit Konsumsi (KK) terpantau sedikit melambat dibandingkan triwulan II 2025.

Di sisi lain, berbeda dengan perkembangan pada sektor korporasi, kinerja intermediasi perbankan untuk sektor RT terpantau tumbuh melambat pada triwulan III 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perilaku *wait and see* masyarakat

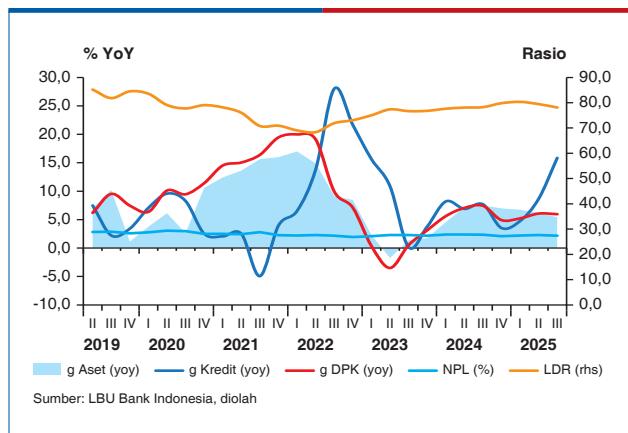
yang disebabkan ketidakpastian ekonomi yang dinilai masih berlangsung. Ditinjau lebih lanjut, menurut penggunaannya, perlambatan kredit RT terutama dipengaruhi oleh kredit kendaraan bermotor dan multiguna.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh Bank Indonesia untuk mendorong kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, preferensi risiko atau *risk appetite* perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang masih terjaga baik turut mendorong peningkatan penyaluran kredit terutama di wilayah Provinsi Riau.

Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat masih cukup baik, terindikasi dengan *Loan to Deposit ratio* perbankan Riau pada triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 78,11% (yoY), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 79,46% (yoY). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan laporan juga tercatat tumbuh positif namun lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja DPK pada triwulan III 2025 tumbuh 5,96% (yoY), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,07% (yoY). Kondisi ini ditengarai terjadi karena peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang tercermin dari peningkatan konsumsi RT pada PDRB Riau Triwulan III 2025.

Di sisi lain, di tengah peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III 2025, pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah terdeselerasi/mengalami perlambatan. Melambatnya penyaluran pembiayaan di Riau terlihat dari realisasi kredit syariah yang tumbuh 5,14% (yoY), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,30% (yoY). Lebih lanjut, perlambatan pada pembiayaan syariah tersebut terjadi pada semua jenis penggunaan, yaitu pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi.



Grafik 4.1. Perkembangan Indikator Perbankan Riau



1.1. Pembiayaan Korporasi

Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat masih tumbuh positif. Penyaluran kredit di Provinsi Riau pada triwulan laporan secara nominal tercatat mencapai Rp172,32 T atau tumbuh 15,85% (yo), meningkat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 167,88 triliun atau tumbuh 8,66% (yo). Berdasarkan jenis penggunaannya, kinerja penyaluran kredit ditopang oleh laju pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja. Di sisi lain, kredit konsumsi terpantau tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Percepatan kinerja kredit korporasi terindikasi dari peningkatan kinerja kredit produktif, yakni kredit modal kerja dan investasi. Pada triwulan III 2025, kinerja kredit produktif tercatat tumbuh positif 16,67% (yo), lebih tinggi dibandingkan 8,52% (yo) pada triwulan sebelumnya. Jika ditinjau lebih lanjut, kredit modal kerja dan investasi sama-sama berperan besar dalam percepatan pertumbuhan tersebut. Tercatat kredit modal kerja dan investasi masing-masing terealisasi sebesar Rp63,47 triliun dan Rp61,63 triliun, atau mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 24,12% (yo) dan 14,57% (yo). Realisasi tersebut lebih tinggi dari triwulan II 2025 yang sebesar Rp60,76 triliun dan Rp60,66 triliun, atau tumbuh 9,60% (yo) dan 7,45% (yo).

Berdasarkan pangsa penyalurannya, kredit korporasi terbesar di Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor industri pengolahan (24,34%); sektor

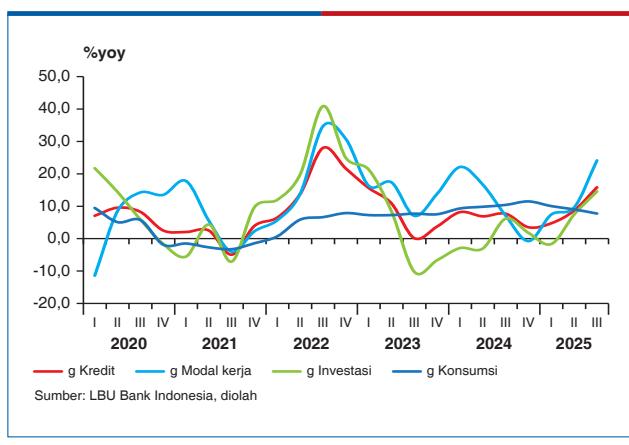
pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,27%); sektor pertambangan (11,24%); dan sektor perdagangan dan akomodasi (9,73%). Dari keempat sektor utama tersebut, percepatan kredit pada triwulan III 2025 disebabkan oleh percepatan pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Di sisi lain, sektor , serta pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor perdagangan mengalami perlambatan.

Lebih lanjut, penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan pada triwulan III 2025 secara nominal tercatat sebesar Rp41,94 triliun atau tumbuh 22,01% (yo) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp36,79 triliun yang terkontraksi 5,31% (yo). Pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada subsektor Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit sebesar 22% (yo) dengan pangsa 51,72% terhadap kredit Industri Pengolahan.

Di sisi lain, kinerja kredit pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat melemah dari pertumbuhan 7,42% (yo) pada triwulan II 2025 menjadi 3,10% (yo) pada triwulan III 2025. Perlambatan tersebut terutama terjadi pada subsektor Perkebunan Kepala Sawit dengan pangsa 91,46% serta Perkebunan Karet dan Getah Lainnya dengan pangsa 0,85% terhadap kredit Pertanian.

Selain itu, kinerja kredit perdagangan juga mengalami penurunan kinerja pada triwulan laporan dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Kredit perdagangan pada triwulan III 2025 dilaporkan senilai Rp16,76 triliun atau terkontraksi 2,59% (yo), berkinerja turun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,75% (yo).

Di tengah meningkatnya penyaluran kredit, risiko kredit korporasi tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari kualitas penyaluran kredit kepada korporasi, terutama pada sektor-sektor utama selama triwulan III 2025 yang tetap terjaga dalam level yang rendah. Hal ini terlihat pada rasio Non-Performing Loan (NPL) kredit pada sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan pada triwulan III 2025 masing-masing pada level 1,69%; 0,12%; dan 3,17% yang masih dalam batas aman yang ditetapkan sebesar, yaitu 5%.



Grafik 4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan





Tabel 4.1. Kredit Lokasi Proyek Menurut Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Rp Miliar	2023				2024				2025			Pangsa Tw III 2025	% YoY Tw III 2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III		
Pertanian	31,97	34,15	31,97	32,92	33,11	32,12	32,21	32,73	33,30	34,50	33,21	19,27	3,10
Pertambangan	12,21	11,12	10,87	11,00	11,23	9,96	6,69	8,70	11,95	17,65	19,38	11,24	189,69
Perindustrian	22,30	24,38	26,22	33,53	35,18	38,85	34,37	34,73	34,89	36,79	41,94	24,34	22,01
Listrik, gas dan air	0,98	0,83	0,73	0,64	0,49	0,43	0,35	0,30	0,23	0,16	0,11	0,06	-68,58
Konstruksi	11,08	11,36	4,03	4,00	3,94	4,23	4,29	4,58	4,32	4,44	2,79	1,62	-34,89
Perdagangan, restoran dan hotel	15,00	14,95	15,30	15,64	15,63	16,03	17,21	15,71	17,37	17,27	16,76	9,73	-2,59
Pengangkutan, pergudangan	2,68	2,81	3,10	3,28	3,57	3,70	3,09	3,49	3,89	3,59	3,70	2,15	19,69
Jasa	5,61	6,15	6,19	6,95	6,58	6,57	6,71	6,61	6,79	6,97	7,21	4,18	7,42
Rumah Tangga dan Lainnya	38,17	38,79	39,69	40,45	41,73	42,61	43,82	45,10	45,91	46,45	47,22	27,40	7,75
Total	140,00	144,54	138,12	148,41	151,47	154,50	148,75	151,95	158,66	167,82	172,32	100,00	15,85

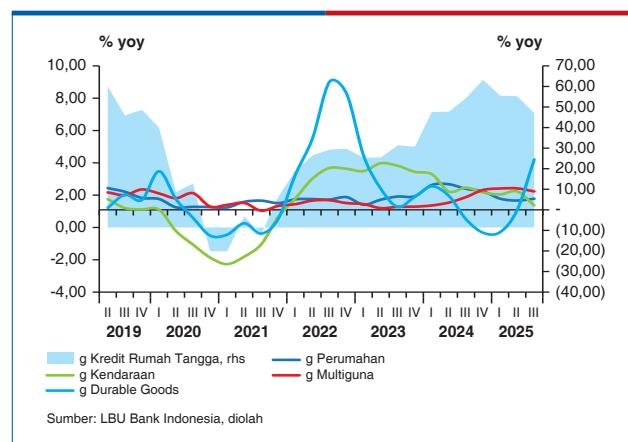
Sumber: Bank Indonesia, diolah

1.2. Pembiayaan Rumah Tangga

Perkembangan kinerja kredit rumah tangga sedikit melambat pada triwulan III 2025. Kinerja penyaluran kredit RT pada triwulan laporan tercatat tumbuh 7,09% (yoY), sedikit melambat dari 8,13% (yoY) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja penyaluran kredit RT terutama bersumber dari perlambatan kredit kendaraan dan multiguna. Di sisi lain, kredit perumahan dan *durable goods* mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga menahan penurunan yang lebih dalam. Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, kredit RT di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 masih didominasi oleh Kredit Multiguna (54%) dan Kredit Pemilikan Rumah/KPR (34,33%).

Penyaluran Kredit multiguna pada triwulan III 2025 tercatat mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit multiguna yang tumbuh 8,98% (yoY), menurun dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh 10,47% (yoY). Namun demikian, secara outstanding Kredit Multiguna tercatat mengalami peningkatan dari Rp22,18 triliun menjadi Rp22,61 triliun.

Selain itu, kinerja penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) juga mengalami perlambatan dari 9,01% (yoY) menjadi 2,17% (yoY). Di sisi lain, kinerja Kredit Perumahan dan *Durable Goods* mengalami



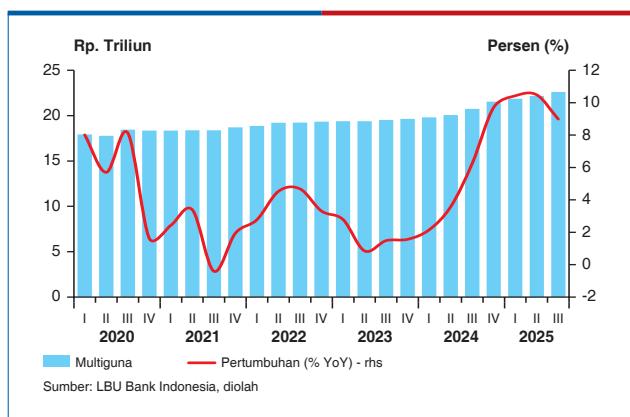
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3. Pertumbuhan Kredit RT

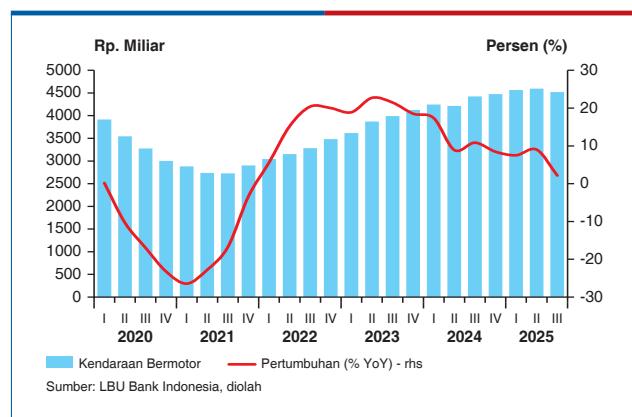
perbaikan triwulan III 2025 masing-masing menjadi 5,43% (yoY) dan 24,57% (yoY) dari 4,57% (yoY) dan -0,03% (yoY) pada triwulan sebelumnya.

Lebih lanjut, percepatan pertumbuhan Kredit Perumahan terjadi utamanya pada kelompok rumah tipe 22 s.d. 70 dan rumah mewah di atas tipe 70. Perumahan tipe 22 s.d. 70 pada triwulan laporan tercatat tumbuh 5,74% (yoY), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,44% (yoY). Sementara itu, rumah mewah di atas tipe 70 tercatat tumbuh 4,99% (yoY), lebih cepat daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,80% (yoY).

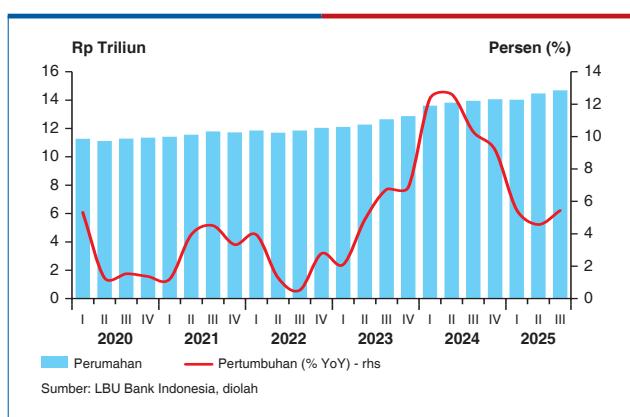




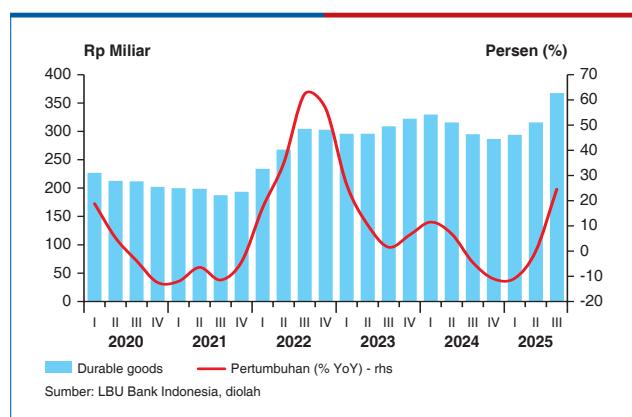
Grafik 4.4. Kredit Multiguna



Grafik 4.6. Kredit Kendaraan Bermotor



Grafik 4.5. Kredit Perumahan



Grafik 4.7. Kredit Durable Goods

Berbanding terbalik dengan kredit perumahan, kinerja penyaluran KKB tercatat tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kredit kendaraan bermotor pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 2,17% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,01% (yoY). Melambatnya pertumbuhan KKB tersebut disebabkan oleh melambatnya kredit kendaraan roda empat dan roda enam atau lebih, masing-masing dari 10,68% (yoY) dan -36,09% (yoY) menjadi 0,43% (yoY) dan -41,83% (yoY). Namun demikian, perlambatan tersebut tertahan oleh percepatan pertumbuhan kredit kendaraan roda dua dan kendaraan lainnya, masing-masing dari 1,20% (yoY) dan 199,21% (yoY) menjadi 22,18% (yoY) dan 269,24% (yoY).

Lebih lanjut, kinerja penyaluran kredit *durable goods* tercatat mengalami perbaikan dari semula mengalami kontraksi 0,03% (yoY) menjadi positif 24,57% (yoY). Berdasarkan nominalnya, penyaluran kredit kepemilikan *durable goods* meningkat dari Rp315,84 miliar menjadi Rp367,56 miliar. Perbaikan tersebut utamanya disebabkan oleh alokasi kredit furnitur dan peralatan rumah tangga (pangsa 5,64%), komputer dan alat komunikasi (pangsa 15,01%), serta peralatan lainnya (pangsa 78,96%).

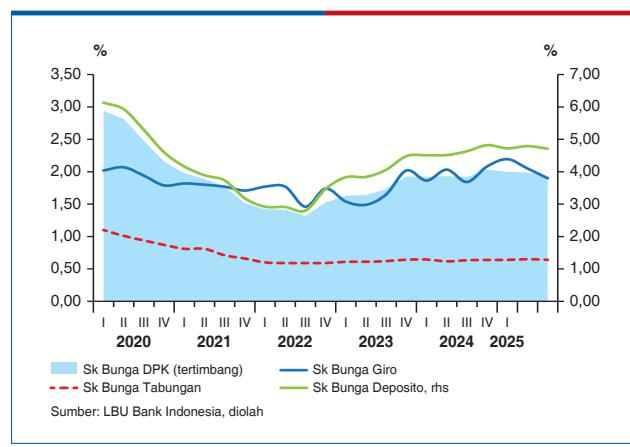
Dari sisi risiko kredit, pada triwulan III 2025, kualitas kredit konsumsi terpantau dalam level yang terjaga di bawah ambang batas (*threshold*) 5%. NPL kredit konsumsi sebesar 2,42%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya 2,31%.



1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada September 2025 memutuskan untuk menurunkan kembali BI Rate menjadi 4,75%, kebijakan ini melanjutkan tren penurunan suku bunga yang telah dilakukan sejak September 2024. Hal ini sejalan dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2025 yang terkendali dalam sasaran $2,5\pm1\%$, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, penurunan BI Rate memiliki efek domino terhadap penurunan suku bunga kredit dan suku bunga simpanan perbankan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, perkembangan suku bunga kredit bank umum di wilayah Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 8,69%, turun 5 basis poin (bps) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,74%. Likuiditas yang terbilang masih cukup baik dan didukung dengan persaingan industri yang cukup ketat, mendorong perbankan untuk melakukan penyesuaian suku bunga kredit guna mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Ditinjau dari jenis penggunaannya, penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan investasi, yang masing-masing turun 11 bps dari 8,61% menjadi 8,50% serta turun 8 bps dari 9,18% menjadi 9,10%. Sementara itu, suku bunga kredit konsumsi tercatat stabil 8,45%.

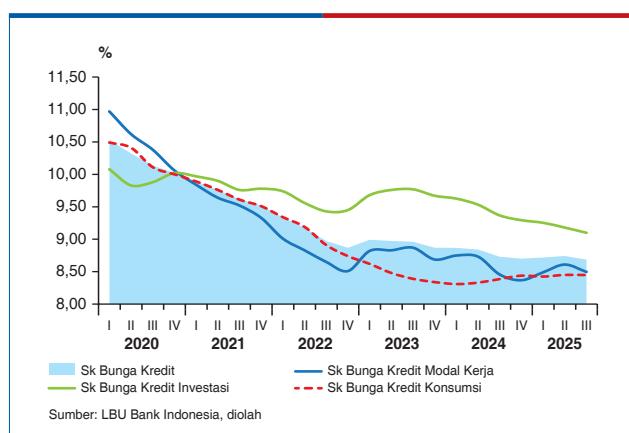


Grafik 4.9. Suku Bunga DPK Perbankan Riau

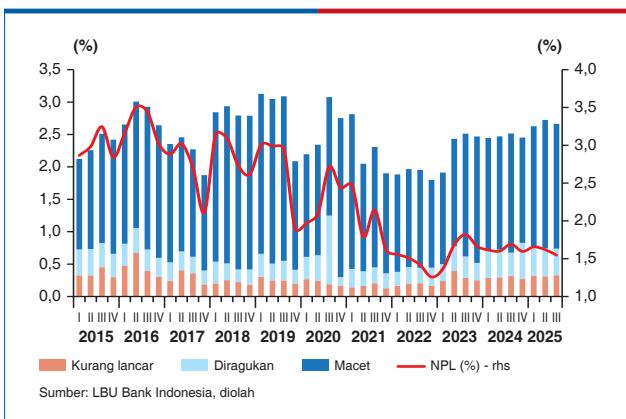
Di sisi penghimpunan DPK, rerata tertimbang suku bunga simpanan di perbankan di Provinsi Riau tercatat sebesar 2,02%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,03%. Penurunan suku bunga simpanan terjadi pada deposito, tabungan, dan giro. Suku bunga dalam bentuk deposito tercatat sebesar 4,71% pada triwulan III 2025, turun dari triwulan lalu yaitu 4,79%. Sementara itu, tingkat suku bunga tabungan dan giro juga tercatat turun menjadi 0,64 dan 1,90% dari 0,65% dan 2,05%.

1.4. Kualitas Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bank Umum

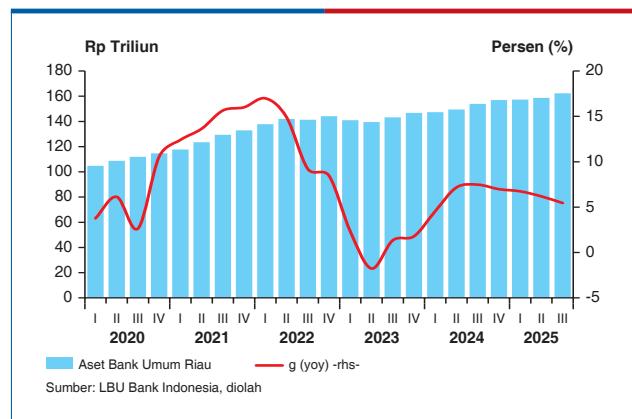
Kualitas kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 terjaga pada level yang rendah. NPL sebagai indikator kualitas kredit yang disalurkan pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,55%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,62%. Rasio kredit bermasalah tersebut masih jauh berada di bawah *threshold* yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%. Ditinjau lebih lanjut, penurunan jumlah kredit bermasalah terjadi pada seluruh kategori mulai dari "Kurang Lancar", "Diragukan", hingga "Macet".



Grafik 4.8. Suku Bunga Kredit Perbankan Riau



Grafik 4.10. Perkembangan NPL Kredit



Grafik 4.11. Perkembangan Aset Perbankan Riau

2. TOTAL ASET DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)

2.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset perbankan di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 5,45% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,18% (yoy). Dilihat dari nilainya, total aset bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan mencapai Rp162,35 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat Rp158,68 triliun.

Berdasarkan kelompok kepemilikan Bank, meningkatnya nilai aset perbankan di Provinsi Riau terjadi pada seluruh jenis bank baik BUMN/D maupun swasta. Nilai aset perbankan BUMN/D (pangsa 70,09%) pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp113,78 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp110,76 triliun. Sementara itu, nilai aset bank swasta (pangsa 29,91%) tercatat sebesar Rp48,56 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp47,92 triliun.

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, peningkatan nilai aset terjadi pada kegiatan bank konvensional dan syariah. Nilai aset bank konvensional (pangsa 73,18%) pada triwulan III 2025 terpantau sebesar Rp118,81 triliun, naik dari triwulan sebelumnya sebesar Rp115,52 triliun. Sementara itu, nilai aset bank syariah (pangsa 26,82%) terpantau sebesar Rp43,53 triliun, naik dari triwulan sebelumnya sebesar Rp43,16 triliun.

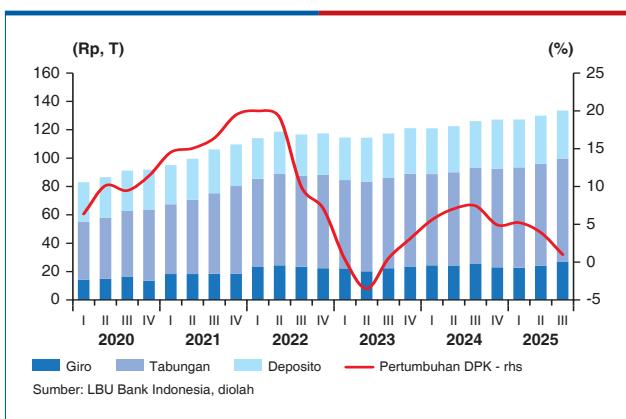
2.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan DPK perbankan di Provinsi Riau tercatat mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah DPK perbankan di Riau pada triwulan III 2025 secara nominal tercatat sebesar Rp133,56 triliun, tumbuh 5,96% (yoy) atau lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 6,07% (yoy) dengan nominal Rp129,96 triliun.

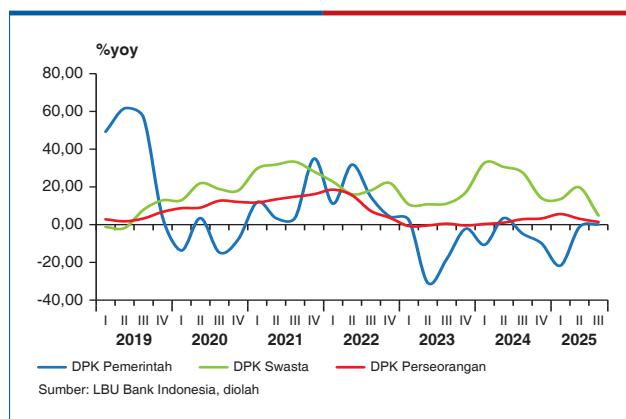
Berdasarkan kepemilikannya, DPK perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih didominasi oleh DPK perorangan (64,21%) dan swasta (24,84%). Sementara itu, DPK Pemerintah memiliki porsi sebesar 7,38%.

Berdasarkan golongan nasabah, perlambatan pertumbuhan DPK di triwulan laporan bersumber dari perlambatan pertumbuhan DPK swasta dan perorangan, masing-masing dari 19,79% (yoy) dan 3,10% (yoy) menjadi 4,87% (yoy) dan 1,41% (yoy). Di sisi lain, percepatan terjadi pada pertumbuhan DPK pemerintah yaitu dari kontraksi 1,25% (yoy) menjadi 0,15% (yoy).

Berdasarkan jenis simpanannya, DPK perbankan masih didominasi oleh tabungan dengan pangsa sebesar 54,60%, diikuti oleh deposito dan giro dengan pangsa masing-masing sebesar 25,3% dan 20,1%. Pada triwulan III 2025 perlambatan kinerja penghimpunan DPK terjadi karena melambatnya jenis DPK tabungan dan deposito. Sementara itu,



Grafik 4.12. Perkembangan DPK Perbankan Riau



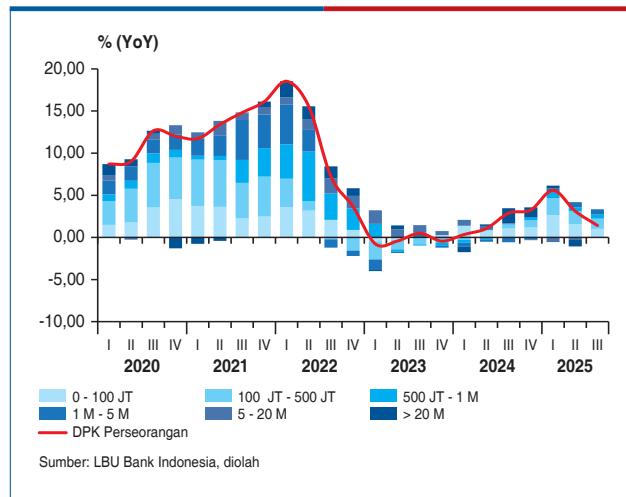
Grafik 4.13. DPK Berdasarkan Kepemilikan

penghimpunan DPK giro tercatat tumbuh lebih cepat sehingga menahan perlambatan DPK secara keseluruhan.

DPK tabungan tumbuh positif sebesar 7,86% (yoY) melambat dari triwulan sebelumnya yaitu 9,59% (yoY). Nominal DPK tabungan mengalami peningkatan dari Rp71,96 triliun menjadi Rp72,93 triliun. Sementara itu, DPK deposito secara nominal tercatat sebesar Rp33,83 triliun atau tumbuh 3,51% (yoY), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,11% (yoY). Sementara itu, nilai DPK giro tercatat sebesar Rp26,80 triliun meningkat dari triwulan lalu sebesar Rp24,15 triliun. Sejalan dengan peningkatan secara nominal, pertumbuhannya juga lebih cepat dari triwulan sebelumnya, yaitu 4,07% (yoY) dari -0,83% (yoY).

Lebih lanjut, berdasarkan nominal simpanan, pangsa DPK perorangan dengan nilai nominal di bawah Rp1 miliar memiliki pangsa terbesar mencapai 72,98%, diikuti dengan kelompok deposan dengan nominal di antara Rp1 miliar – Rp5 miliar, dan nominal di atas Rp 5 miliar dengan masing-masing pangsa sebesar 17,17% dan 9,85%.

Berdasarkan kelompok nominalnya, peningkatan pertumbuhan DPK terutama terjadi pada kategori



Grafik 4.14. DPK Perorangan per Kelompok Nominal

kelompok deposan dengan nominal simpanan antara Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar dengan simpanan mencapai Rp14,72 triliun, tumbuh lebih cepat dari triwulan sebelumnya yaitu dari 3,39% (yoY) menjadi 3,84% (yoY). Selanjutnya, kelompok deposan dengan nilai s.d. Rp1 miliar, nilai simpanannya justru terpantau berkurang dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok deposan dengan nilai simpanan di atas Rp5 miliar, nilainya tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



3. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN SECARA SPASIAL PENYALURAN KREDIT SPASIAL

Secara spasial, pangsa kredit terbesar terdapat di Kota Pekanbaru, diikuti Kota Dumai dan Kabupaten Kampar. Sejalan dengan percepatan penyaluran kredit Provinsi Riau di triwulan III 2025, pertumbuhan kredit pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tercatat lebih cepat, kecuali di Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kuantan Singgingi, dan Kep. Meranti.

Kota Pekanbaru yang memiliki pangsa kredit terbesar di Riau (28,62%) mengalami pertumbuhan 6,32% (yoy). Sementara itu, Kota Dumai yang memiliki pangsa kredit terbesar kedua di Riau (18,27%) juga tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dari 20,53% (yoy) menjadi 54,84% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, Kabupaten Kampar yang memiliki pangsa penyaluran kredit ketiga terbesar di Riau (10,44%) mencatatkan deselerasi pertumbuhan kredit dari 43,48% (yoy) menjadi 33,31% (yoy).

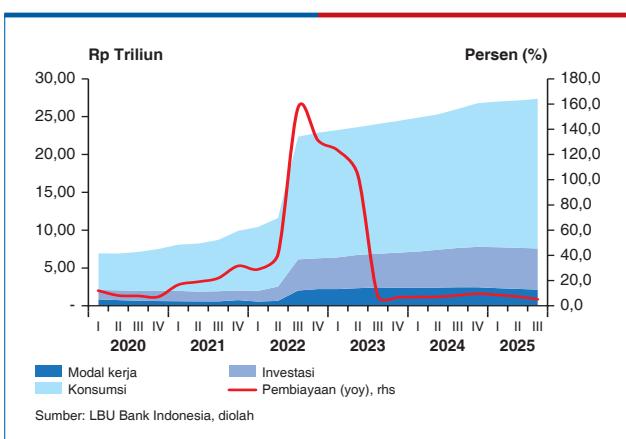
4. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Kinerja penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada triwulan III 2025 terpantau tumbuh melambat. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 5,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,30% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan kinerja pada pembiayaan konsumsi, investasi, dan modal kerja. Pembiayaan konsumsi (pangsa 72,28%) pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 7,64% (yoy), melambat dibandingkan triwulan lalu sebesar 8,80% (yoy). Selanjutnya dengan pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi (pangsa 19,88%) tercatat mengalami deselerasi pertumbuhan dari sebesar 8,45% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi 4,64% (yoy) pada triwulan laporan. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja (pangsa 7,84%) mengalami terkontraksi yang lebih dalam dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 6,38% (yoy) menjadi 12,56% (yoy).

Tabel 4.2. Perkembangan Kredit di Riau Secara Spasial

No	Kab/Kota	Kredit Tw.III 2025		g Tw.II 2025 (yoy)	g Tw.III 2025 (yoy)	Arah Pertumbuhan
		Rp (Miliar)	Pangsa (%)			
1	Kab. Kampar	17.990	10,44	43,48	33,31	↓
2	Kab. Bengkalis	7.955	4,62	12,42	8,03	↓
3	Kab. Indragiri Hulu	6.783	3,94	11,14	11,26	↑
4	Kab. Indragiri Hilir	8.893	5,16	1,51	-5,84	↓
5	Kab. Rokan Hulu	15.787	9,16	28,32	45,00	↑
6	Kab. Rokan Hilir	7.620	4,42	-0,32	6,44	↑
7	Kab. Pelalawan	9.538	5,53	-16,83	-13,35	↑
8	Kab. Siak	9.831	5,71	-14,08	-13,43	↑
9	KAb. Kuantan Singgingi	4.713	2,73	8,12	6,78	↓
10	Kab. Kepulauan Meranti	2.395	1,39	227,42	201,33	↓
11	Kota Pekanbaru	49.322	28,62	-1,26	6,32	↑
12	Kota Dumai	31.490	18,27	20,53	54,84	↑
	Provinsi Riau	172.317	100,00	8,66	15,85	↑

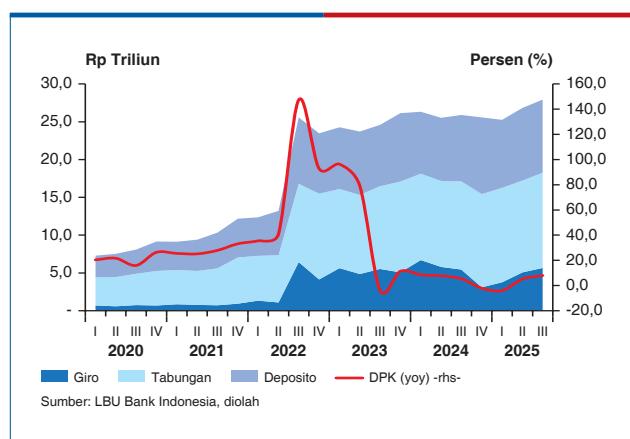
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah



Grafik 4.15. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan

Dari sisi kualitas pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah Riau tercatat sebesar 2,38%, relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Adapun likuiditas perbankan syariah Riau yang tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terpantau masih memiliki ruang pada triwulan III 2025 yaitu sebesar 97,92%, lebih longgar daripada triwulan II 2025 sebesar 101,18%. Rasio FDR yang berada dibawah 100% mengindikasikan bahwa perbankan syariah di Provinsi Riau masih memiliki potensi untuk lebih berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dengan mengandalkan sumber dana DPK-nya sendiri.

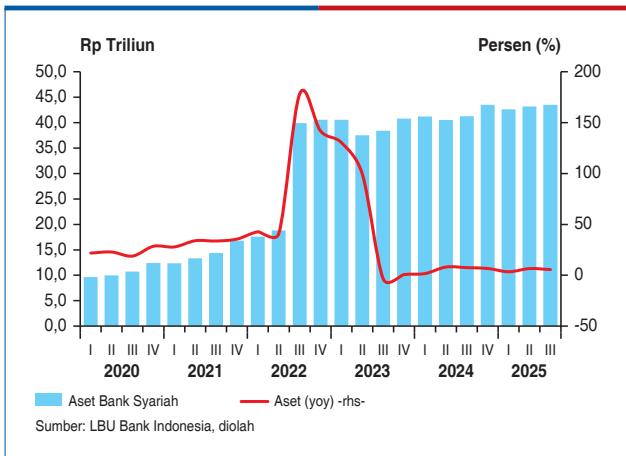
Sejalan dengan penyaluran pembiayaan, nilai aset perbankan syariah pada triwulan III 2025 mencatatkan tumbuh melambat. Pertumbuhan aset



Grafik 4.17. Perkembangan DPK Perbankan Syariah

perbankan syariah pada triwulan III 2025 sebesar 5,49% (yoy), lebih lambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,50% (yoy). Secara nominal, perkembangan aset tercatat meningkat dari Rp43,16 triliun menjadi Rp43,54 triliun. Lebih lanjut, kinerja DPK perbankan syariah mencatatkan percepatan pertumbuhan, yaitu sebesar 7,92% (yoy) lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,07% (yoy). Secara nominal, DPK Syariah pada triwulan III 2025 tercatat senilai Rp27,94 triliun, meningkat dari Rp26,82 triliun pada triwulan sebelumnya.

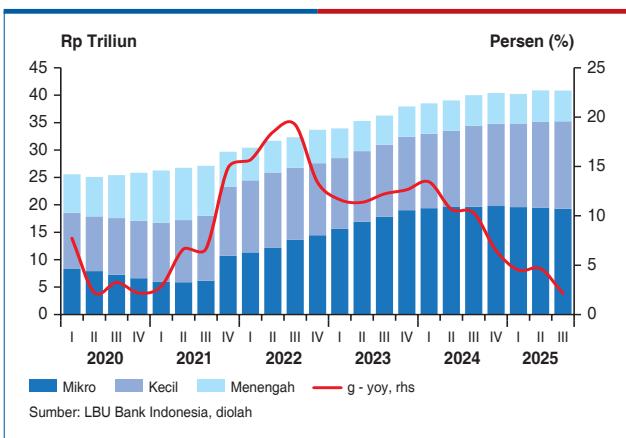
Ditinjau dari jenis simpanannya, tabungan masih mendominasi struktur DPK perbankan Syariah dengan pangsa sebesar 45,09%, diikuti oleh deposito dan giro dengan pangsa masing-masing sebesar 34,61% dan 20,30%.



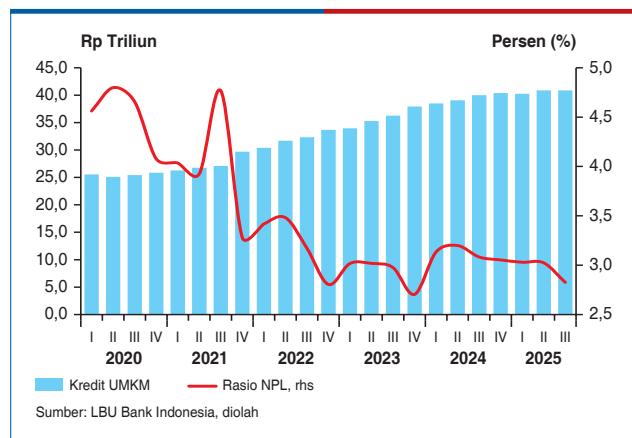
Grafik 4.16. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

5. PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Intermediasi UMKM tumbuh lebih lambat namun tetap disertai dengan persepsi risiko yang terjaga pada level rendah. Penyaluran kredit UMKM terpantau tumbuh 2,13% (yoy), lebih lambat dari triwulan sebelumnya yaitu 4,64% (yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, porsi kredit UMKM terhadap total kredit terpantau sedikit turun pada level 39,17% daripada triwulan sebelumnya yang tercatat 39,58%. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan



Grafik 4.18. Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM



Grafik 4.19. Perkembangan NPL Kredit UMKM

kredit UMKM, jumlah rekening kredit UMKM tercatat mengalami peningkatan. Jumlah rekening UMKM naik dari 437.593 rekening pada triwulan II 2025 menjadi 437.851 pada triwulan laporan. Secara nominal, *outstanding* pembiayaan UMKM mengalami sedikit penurunan yaitu dari Rp40,87 triliun menjadi Rp40,86 triliun.

Kinerja positif penyaluran kredit UMKM juga didukung oleh implementasi kebijakan penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM berupa penetapan proporsi kredit terhadap total kredit yang disalurkan perbankan. Berdasarkan kategori debitur, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Riau didominasi oleh usaha mikro dengan pangsa 47,17%, diikuti oleh usaha kecil dan menengah dengan pangsa masing-masing sebesar 39,08% dan 13,74% terhadap total kredit UMKM.

Walaupun memiliki pangsa terbesar, tetapi penyaluran kredit UMKM pada kelompok usaha mikro di triwulan III 2025 tercatat terkontraksi 1,94% (yoY) lebih dalam dari triwulan sebelumnya yaitu kontraksi 0,80% (yoY). Sementara itu, kredit UMKM pada kelompok usaha kecil dan menengah terpantau tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing dari 13,23% (yoY) dan 2,35% (yoY) menjadi 8,15% (yoY) dan 0,57% (yoY).

Berdasarkan sektor usahanya, melambatnya penyaluran kredit UMKM terutama disumbang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Penyaluran kredit UMKM pada sektor pertanian (pangsa 51,80%) tercatat tumbuh melambat dari 5,80% (yoY) menjadi 3,13% (yoY). Sejalan dengannya, kinerja kredit UMKM pada sektor perdagangan (pangsa 29,15%) juga tercatat melambat dari 2,92% (yoY) menjadi kontraksi 1,76% (yoY). Namun demikian, laju perlambatan kredit UMKM tertahan oleh peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor jasa (pangsa 8,13%) yang tumbuh lebih cepat dari 1,41% (yoY) menjadi 2,85% (yoY).

Kualitas kredit UMKM pada triwulan III 2025 terjaga pada level yang rendah serta di bawah ambang batas sebesar 5%. Kondisi ini merata terjadi pada UMKM Menengah, Kecil, dan Mikro. NPL kredit UMKM di Provinsi Riau pada triwulan laporan terpantau 2,83%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,02%.





Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB 5

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan III 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi *net-outflow* (lebih banyak uang keluar). Sementara itu, transaksi sistem pembayaran non-tunai melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), kartu debit, uang elektronik (UE), dan QRIS mencatatkan kinerja yang lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, transaksi sistem pembayaran menggunakan kartu kredit dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) masih lemah.



1. KONDISI UMUM

Pada triwulan III 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi *net-outflow* yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pergerakan *net-outflow* dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp4,52 triliun, lebih tinggi dibandingkan *net-outflow* triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp860,37 miliar.

Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan III 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui BI-RTGS, kartu debit, Uang Elektronik (UE), dan QRIS. Di sisi lain, kinerja transaksi melalui SKNBI dan kartu kredit menunjukkan perlambatan. Kinerja BI-RTGS di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat membaik, dari sisi nominal maupun volume transaksi yang masing-masing tumbuh 7,42% (yoY) dan -4,86% (yoY), dari yang sebelumnya tercatat 1,44% (yoY) dan -9,47% (yoY). Lebih lanjut, volume transaksi melalui APMK khususnya kartu debit menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2025. Selain itu, kinerja transaksi melalui UE tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume pada triwulan laporan. Berdasarkan kategorinya, transaksi untuk berbelanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE, yaitu senilai Rp1,57 triliun atau dengan pangsa sebesar 71,29%.

Di sisi lain, nominal transaksi SKNBI di Provinsi Riau masih mengalami kontraksi sebesar 7,90% (yoY), lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,20% (yoY).

2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

2.1. Aliran Uang Masuk ke (*Inflow*) dan Keluar dari (*Outflow*) Bank Indonesia

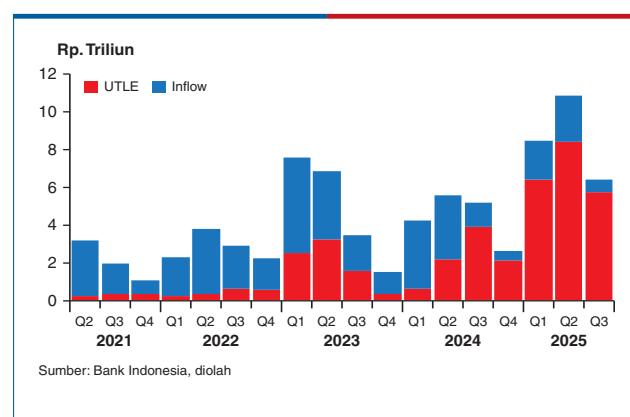
Aktivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) atau transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia tercermin dari beberapa indikator, di antaranya

(1) jumlah *outflow*, (2) jumlah *inflow*, (3) kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE), dan (4) jumlah temuan uang palsu.

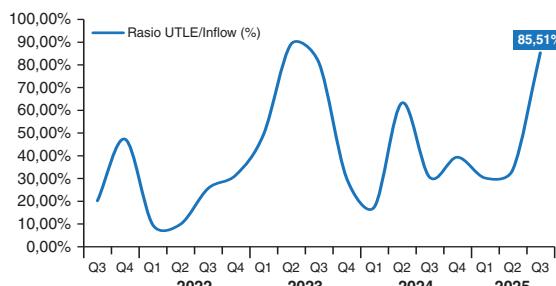
Pada triwulan III 2025, sistem pembayaran tunai di Provinsi Riau tercatat dalam posisi *net-outflow* sebesar Rp4,52 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp860,37 miliar. Secara triwulanan, nominal *outflow* pada triwulan III 2025 tumbuh 55,35% (qtq) dari Rp3,34 triliun menjadi Rp5,19 triliun, sedangkan nominal *inflow* terkontraksi sebesar 72,85% (qtq) dari Rp2,48 triliun menjadi Rp674,18 miliar. Tumbuhnya *outflow* pada triwulan III 2025 menjadi salah satu indikator tingginya kebutuhan uang kartal di Masyarakat Riau.

2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Dalam rangka menjamin kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, serta tepat waktu, dan layak edar (*fit for circulation*). Oleh sebab itu, Bank Indonesia Provinsi Riau secara berkala melakukan pelayanan penyediaan uang kartal layak edar kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perbankan). Pelayanan secara langsung dilakukan dalam bentuk penukaran UTLE melalui kas keliling yang diselenggarakan di dalam dan luar kota Pekanbaru. Sementara itu, pelayanan penyediaan

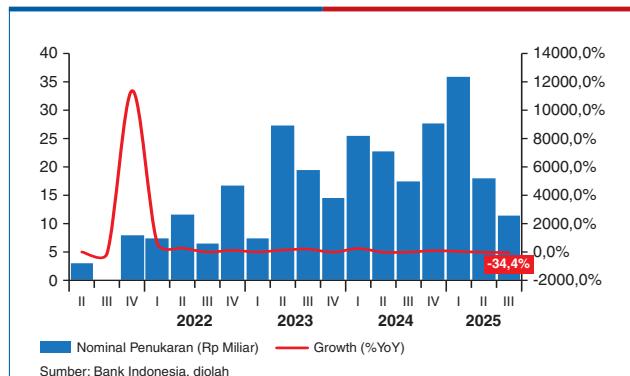


Grafik 5.1. Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2. Perkembangan Rasio UTLE terhadap Total Inflow



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3. Nominal Penukaran

uang kartal secara tidak langsung dilakukan melalui penarikan uang oleh perbankan dan kas titipan di beberapa daerah di Provinsi Riau.

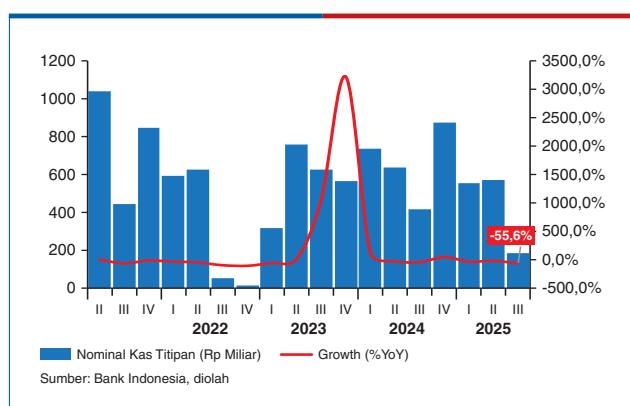
Selain itu, untuk menjamin terlaksananya *clean money policy*, pada triwulan III 2025, Bank Indonesia Provinsi Riau melakukan pemusnahan UTLE sebesar 85,51% dari *inflow*. Kegiatan pemusnahan UTLE tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat.

Guna memperkuat implementasi *clean money policy* dimaksud, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sebaran uang layak edar di seluruh wilayah Provinsi Riau. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 44 (empat puluh empat) kantor bank umum untuk menerima pelayanan penukaran UTLE dari masyarakat. Sementara itu, untuk layanan yang bersifat langsung, Bank Indonesia secara konsisten melakukan kegiatan kas keliling.

Pada triwulan III 2025 Bank Indonesia Provinsi Riau tercatat telah melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali kas keliling ritel baik di dalam kota maupun di luar kota Pekanbaru. Selain itu, Bank Indonesia tetap mendorong pelaksanaan penukaran uang pecahan kecil di kantor-kantor cabang perbankan di Riau. Saat ini, pemesanan layanan penukaran dilakukan melalui aplikasi PINTAR. Berdasarkan data dari aplikasi tersebut, Bank Indonesia Provinsi

Riau telah melaksanakan penukaran uang layak edar dengan nominal mencapai Rp11,48 miliar pada triwulan III 2025.

Sementara itu, kegiatan kas titipan di wilayah Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu untuk memperluas jaringan distribusi uang dan layanan kas ke seluruh wilayah Provinsi Riau tercatat mengalami perlambatan. Pada triwulan III 2025, volume kas titipan mencapai Rp185 miliar atau terkontraksi 67,72% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan volume kas titipan triwulan III 2025 juga lebih lambat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yaitu mencatatkan kontraksi 55,6% (yoY).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

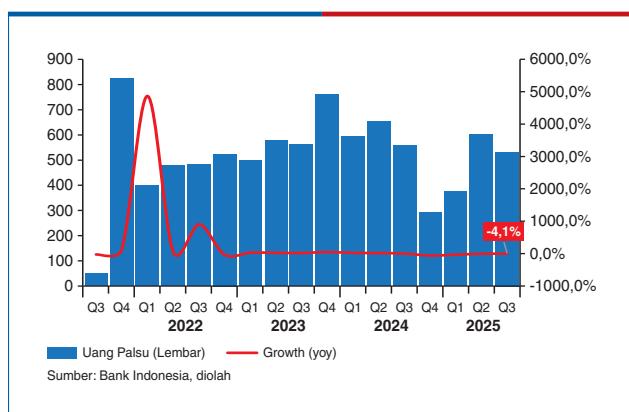
Grafik 5.4. Nominal Kas Titipan





2.3. Temuan Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya

Pada triwulan III 2025, temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, baik dari laporan perbankan maupun berdasarkan laporan masyarakat, tercatat sebanyak 533 lembar. Angka tersebut berkang jika dibandingkan dengan temuan pada triwulan II 2025, yaitu sebanyak 600 lembar. Bank Indonesia terus berupaya mengantisipasi penggunaan dan peredaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya di masyarakat dengan senantiasa melakukan berbagai langkah, di antaranya (1) memperluas keterjangkauan dan ketersediaan Uang Layak Edar di masyarakat, (2) meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang Rupiah, serta (3) optimalisasi transaksi non-tunai guna meminimalkan peluang pemalsuan uang.



Grafik 5.5. Perkembangan Temuan Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau

3. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI

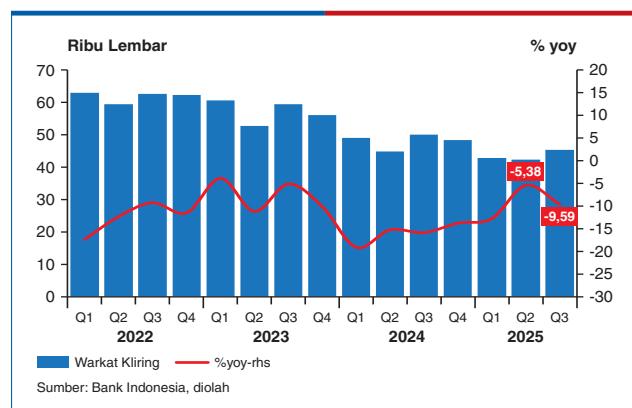
Kinerja sistem pembayaran non-tunai di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 khususnya melalui BI-RTGS, kartu debit, UE dan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, catatan transaksi melalui SKNBI dan kartu kredit masih terpantau lemah. Sementara itu, peningkatan mobilitas wisatawan yang keluar dari Provinsi Riau berimplikasi pada

pertumbuhan transaksi pembelian maupun penjualan valuta asing di Provinsi Riau.

3.1. Transaksi SKNBI

Volume transaksi non-tunai ritel di Riau yang diproses melalui SKNBI pada triwulan III 2025 mengalami kontraksi 9,59% (yoY), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi 5,38% (yoY). Berdasarkan nominalnya, transaksi kliring terkontraksi 7,90% (yoY). Kontraksi ini juga lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,20% (yoY). Secara spasial, masih terkontraksinya transaksi menggunakan SKNBI didominasi oleh aktivitas transaksi di wilayah Kota Pekanbaru dengan pangsa 97,00%, dan sisanya berasal dari Kota Dumai.

Penurunan tersebut terjadi seiring perluasan implementasi BI-FAST sehingga menggeser preferensi masyarakat dalam bertransaksi ritel dari semula menggunakan SKNBI ke BI-FAST. Sebagai informasi, BI-FAST menyediakan biaya transaksi yang lebih murah dan *real time*. Pada triwulan III 2025, volume dan nominal transaksi melalui BI-FAST tercatat tumbuh masing-masing sebesar 20,08% (yoY) dan 17,47% (yoY). Selain itu, penurunan transaksi melalui SKNBI juga terindikasi dari meningkatnya penggunaan mekanisme pembayaran lainnya seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan UE.



Grafik 5.6. Perkembangan Transaksi Kliring (SKNBI) di Provinsi Riau



Tabel 5.1. Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau

Rp Miliar	2022		2023		2024				2025				
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Nilai Transaksi (Rp miliar)	47.067	55.295	43.230	41.640	45.389	62.802	35.830	40.733,29	43.460,15	51.740,79	43.606,73	41.318,21	46.684,10
Volume Transaksi (lembar)	22.079	24.184	20.073	17.991	21.201	21.776	17.936	18.042,00	20.412,00	21.038,00	15.360,00	16.334,00	19.419,00
Growth Nilai Transaksi (% yoy)	10,12	-18,24	-4,45	-26,98	-3,57	13,58	-17,12	-2,18	-4,25	-17,61	21,71	1,44	7,42
Growth Volume Transaksi (% yoy)	-6,59	-12,54	-14,35	-24,76	-3,98	-9,96	-10,65	0,28	-3,72	-3,39	-14,36	-9,47	-4,86

Sumber: Bank Indonesia

3.2. Transaksi BI-RTGS

Pada triwulan III 2025, nominal transaksi melalui BI-RTGS mencatatkan pertumbuhan positif. Nominal transaksi melalui BI-RTGS tercatat senilai Rp46,68 triliun atau tumbuh 7,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh 1,44% (yoy). Pertumbuhan juga terlihat dari sisi volume transaksi yang tercatat tumbuh -4,86% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar -9,47% (yoy).

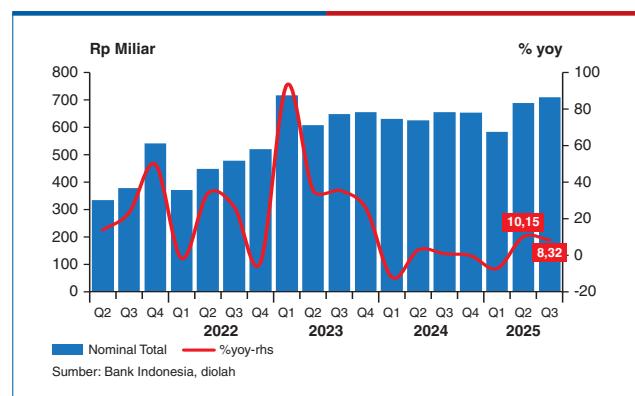


Grafik 5.7. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Riau

3.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Pada triwulan III 2025, volume transaksi menggunakan kartu kredit tumbuh lebih tinggi. Volume transaksi menggunakan kartu kredit tercatat sebanyak 697,65 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 12,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,49% (yoy). Namun demikian, dari sisi nominal transaksi kartu kredit pada triwulan III 2025 mencatatkan pertumbuhan yang melambat, yaitu sebesar 8,32% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 10,15% (yoy).

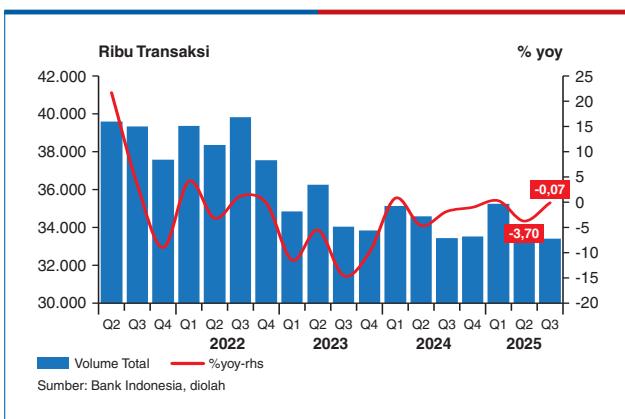
Sejalan dengan kartu kredit, volume transaksi melalui kartu debit juga mengalami pertumbuhan. Volume transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan III 2025 tercatat sebanyak 33,41 juta transaksi atau terkontraksi 0,07% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,70% (yoy). Dari sisi nominal transaksi, transaksi kartu debit pada



Grafik 5.8. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Riau

triwulan III 2025 tercatat senilai Rp47,86 triliun atau tumbuh sebesar 15,92% (yoy).

Tersedianya berbagai instrumen pembayaran yang lebih beragam, seperti QRIS, turut mengubah preferensi masyarakat dalam bertransaksi sehingga menyebabkan fluktuasi dalam volume maupun nilai transaksi menggunakan kartu di Provinsi Riau.



Grafik 5.9. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Debet di Riau



Grafik 5.10. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debet di Riau

3.4. Transaksi Uang Elektronik

Pada triwulan III 2025, transaksi menggunakan UE tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi UE yang digunakan untuk tujuan belanja tercatat tumbuh positif sebesar 13,27% (yoY) pada triwulan laporan. Lebih lanjut, nominal transaksi belanja masih mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE dengan nilai Rp1,57 triliun (pangsa 71,29%), diikuti oleh transaksi transfer dengan nominal Rp570,63 miliar (pangsa 25,91%), serta transaksi tarik tunai dengan nominal Rp61,69 miliar (pangsa 2,80%). Secara keseluruhan, nominal transaksi UE di Provinsi Riau pada triwulan III 2025

sebanyak Rp2,2 triliun atau tumbuh sebesar 17,54% (yoY). Sementara dari sisi volume, volume transaksi UE di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 sebanyak 21,39 juta transaksi atau tumbuh sebesar 26,59% (yoY).

Tren peningkatan nilai transaksi UE ditengarai didorong oleh peningkatan preferensi konsumen menggunakan UE berbasis server, sejalan dengan semakin banyaknya penyedia layanan tersebut. Hal ini selaras dengan pertumbuhan jumlah pengguna UE di Provinsi Riau yang tumbuh 183,0% (yoY) pada triwulan III 2025 dengan jumlah total pengguna UE sebanyak 15,56 juta.



Grafik 5.11. Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau



Grafik 5.12. Jumlah Uang Elektronik di Provinsi Riau



Tabel 5.2. Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau

Transaksi	2024								2025							
	Tw I		Tw II		Tw III		Tw IV		Tw I		Tw II		Tw III			
	Vol (Ribu)	Nominal (Rp Miliar)	Vol (Ribu)	Nominal (Rp Miliar)												
Belanja	12.904.056	1.212.304	13.621.329	1.278.147	14.689.371	1.386.065	16.137.861	1.424.188	16.362.234	1.451.399	17.417.577	1.463.544	19.006.439	1.570.031		
Transfer	2.034.986	418.975	2.201.599	417.645	2.053.669	434.676	2.037.968	452.213	2.043.143	495.830	2.012.681	504.379	2.197.752	570.637		
Tarik Tunai	162.297	53.810	145.499	42.360	158.412	53.022	158.480	55.021	156.180	58.245	146.274	52.863	191.943	61.692		
Total	15.101.339	1.685.089	15.968.427	1.738.152	16.901.452	1.873.763	18.334.309	1.931.422	18.561.557	2.005.475	19.576.532	2.020.786	21.396.134	2.202.360		

Sumber: Bank Indonesia

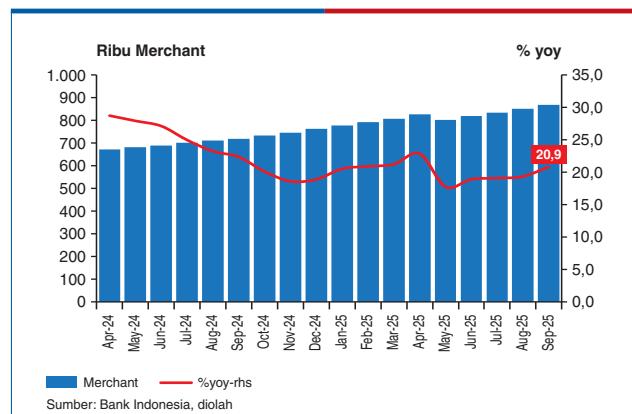
3.5. Pengembangan Layanan Keuangan Non-tunai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui transformasi digital sistem pembayaran, Bank Indonesia turut berperan aktif memfasilitasi berbagai program elektronifikasi untuk meningkatkan implementasi transaksi non-tunai dan inklusi keuangan. Beberapa program yang telah dilakukan hingga triwulan III 2025, di antaranya (1) memfasilitasi elektronifikasi transaksi Pemda, (2) monitoring penyaluran bantuan sosial non-tunai, serta (3) mendukung pengembangan elektronifikasi transaksi ritel di sektor lainnya khususnya perluasan penerimaan QRIS di berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, penggunaan QRIS di Riau terus meningkat. Hingga September 2025, jumlah merchant QRIS di Riau meningkat 20,9% (yoY) dari semula 718,75 ribu merchant pada bulan September 2024 menjadi 868,795 ribu merchant pada September 2025. Tren peningkatan jumlah merchant tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk selalu berupaya mendorong elektronifikasi transaksi masyarakat.

Lebih lanjut, secara spasial mayoritas merchant QRIS di Riau masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru (pangsa 45,9%), Kota Dumai (pangsa 12,2%), dan Kabupaten Kampar (pangsa 7,5%).

Jumlah transaksi melalui kanal pembayaran QRIS meningkat seiring peningkatan jumlah pengguna/user QRIS. Jumlah pengguna QRIS di Provinsi Riau hingga September 2025 tercatat sebanyak 1,14 juta



Grafik 5.13. Perkembangan Merchant QRIS di Riau

pengguna. Peningkatan jumlah pengguna juga diikuti oleh peningkatan volume dan nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS. Pada triwulan III 2025 volume transaksi QRIS di Provinsi Riau tercatat sebesar 26,35 juta transaksi atau tumbuh 105,14% (yoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, nominal transaksi juga tumbuh sebesar 73,24% (yoY) dari semula Rp1,68 triliun pada triwulan III 2024 menjadi Rp2,91 triliun pada triwulan III 2025. Berdasarkan perkembangan tersebut, diketahui bahwa rata-rata transaksi pengguna pada triwulan III 2025 yaitu sebesar Rp849,6 ribu, mengalami peningkatan nilai transaksi rata-rata per pengguna pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp748,4 ribu.

Dalam rangka mendorong transaksi digital, Bank Indonesia Provinsi Riau bersama stakeholders terkait telah melakukan berbagai program pada triwulan III





2025. Perluasan implementasi QRIS sebagai kanal transaksi digital, yang dilakukan melalui:

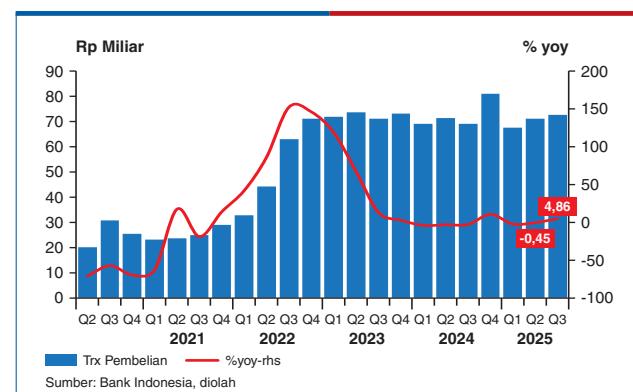
1. Sosialisasi dan *User Experience* QRIS Rp1,- kepada pelajar, mahasiswa, serta komunitas di Provinsi Riau.
2. SERINDIT x PQN 2025 (Semarak Rupiah dengan Transaksi Digital bersama QRIS) x Pekan QRIS Nasional 2025 di Provinsi Riau melalui beberapa rangkaian kegiatan a.l Penandatanganan Komitmen Edukasi Bersama antara BI dengan Forum Anak Riau melalui DP3AP2KB Riau; Edukasi QRIS, PeKA, serta CBP Rupiah melalui perlombaan dan kompetisi semarak HUT RI-80 yang diikuti oleh 6.245 orang dengan outcome 19.127 kali transaksi QRIS.
3. QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI) Wilayah Riau 2025 yang diselenggarakan tanggal 17, 20 s.d 22 Agustus 2025 di 3 (tiga) kota/kabupaten a.l Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singgingi yang mengangkat tema digitalisasi budaya daerah, terutama memperkenalkan salah satu wisata Provinsi Riau yaitu Pacu Jalur di Kuantan Singgingi yang dirangkai dengan perluasan QRIS Cross Border di daerah wisata.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga dilakukan terhadap transaksi pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam ekosistem pembayaran di lingkup Pemerintah Daerah.

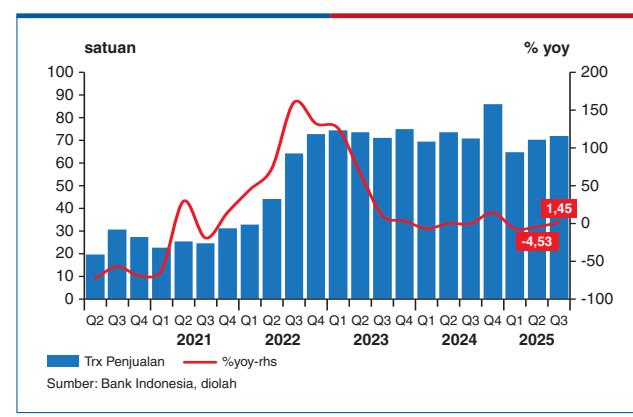
3.6. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

Pada triwulan III 2025, kinerja transaksi pembelian maupun penjualan valuta asing di Provinsi Riau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Dari 14 KUPVA-BB (Bukan Bank) yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, nominal transaksi pembelian pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp72,56 miliar, tumbuh sebesar 4,86% (yoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,45% (yoY). Sejalan dengan tren aktivitas pembelian, transaksi jual juga mengalami perbaikan dari yang sebelumnya terkontraksi 4,53% (yoY) dengan nilai Rp70,20 miliar pada triwulan II 2025 menjadi Rp72,03 miliar pada triwulan laporan, atau tumbuh 1,45% (yoY).



Grafik 5.14. Perkembangan Pembelian Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau



Grafik 5.15. Perkembangan Penjualan Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau



BANK INDONESIA



BAB 6

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kinerja ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2025 masih menunjukkan penurunan, melanjutkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan sektor lapangan usaha, penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor unggulan Riau seperti pertanian dan pertambangan. Di sisi lain, beberapa indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Petani masih menunjukkan kinerja yang relatif baik.



1. GAMBARAN UMUM

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2025 masih menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Agustus 2024 di tengah meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Rilis data BPS pada Agustus 2025 menunjukkan peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

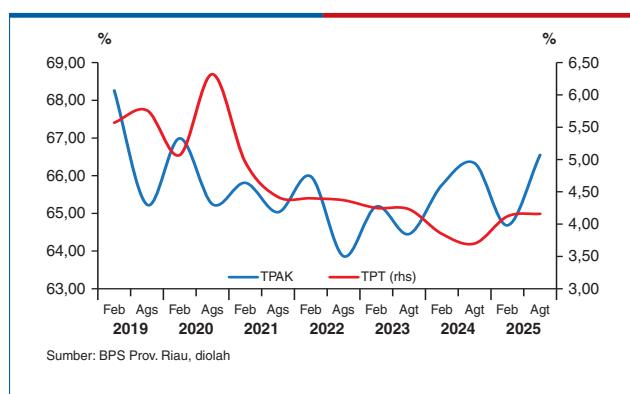
Peningkatan TPT dipengaruhi oleh turunnya serapan tenaga kerja di sektor lapangan usaha utama Riau, yaitu pertanian dan pertambangan. Hal ini ditengarai karena optimalisasi mekanisasi dan digitalisasi sektor pertanian serta perlambatan *output* sektor pertambangan yang masih didominasi sumur-sumur tua. Kondisi ini turut dikonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja dari 30,56 pada triwulan III 2024 menjadi 1,74 pada triwulan III 2025.

Meskipun demikian, indikator kemiskinan di Riau berdasarkan data terakhir dari BPS masih menunjukkan kondisi yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2025 yang tercatat menurun menjadi 6,16% dari 6,67% pada Maret 2024. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2025 tercatat meningkat sehingga semakin jauh berada di atas 100, yaitu dari 186,27 pada triwulan II 2025 menjadi 191,38 pada triwulan III 2025. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan NTP pada subsektor unggulan Riau seperti tanaman perkebunan rakyat, tanaman pangan, dan hortikultura.

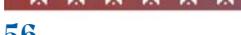
2. KONDISI KETENAGAKERJAAN DAERAH

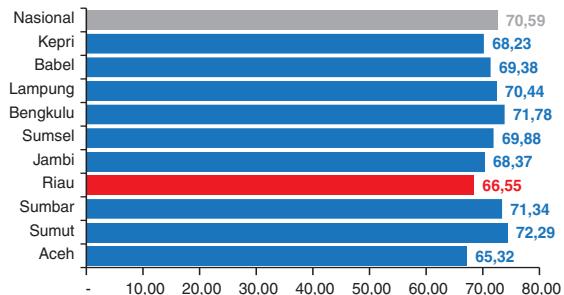
Merujuk pada rilis data ketenagakerjaan BPS per Agustus 2025, sebagaimana Tabel 6.1, terlihat bahwa jumlah PUK di Provinsi Riau mengalami peningkatan 1,78% (yoy). PUK merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (usia >15 tahun). Pada kenyataannya, penduduk usia tersebut tidak selalu dalam status bekerja atau aktif mencari kerja (status ini disebut Angkatan Kerja) tetapi ada pula yang berstatus Bukan Angkatan Kerja antara lain karena sedang menempuh pendidikan. Di Provinsi Riau, jumlah PUK pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 5,034 juta orang, meningkat 87,89 ribu orang dari Agustus 2024. Peningkatan jumlah PUK ini berkontribusi pada peningkatan jumlah Angkatan Kerja dari 3.280,73 ribu orang pada Agustus 2024 menjadi 3.350,14 ribu orang pada Agustus 2025, atau meningkat 2,12% (yoy). Sementara itu, jumlah Bukan Angkatan Kerja mengalami peningkatan yaitu dari 1.665,48 ribu orang pada Agustus 2024 menjadi 1.683,95 ribu orang, atau meningkat 1,11% (yoy).

Lebih lanjut mengenai kondisi Angkatan Kerja, secara umum pada triwulan III 2025 masih melanjutkan tren pelemahan dari periode sebelumnya. Hal ini terlihat pada Grafik 6.1 yang menunjukkan meningkatnya TPT. Lebih lanjut, sebagaimana Tabel 6.3, peningkatan TPT terindikasi dari kurangnya serapan tenaga kerja di sektor-sektor utama seperti pertanian dan pertambangan.



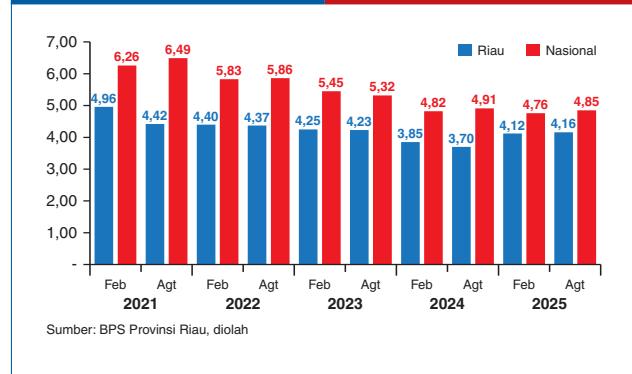
Grafik 6.1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau





Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatra (dalam %)



Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 6.3. Perkembangan TPT Nasional dan TPT Provinsi Riau

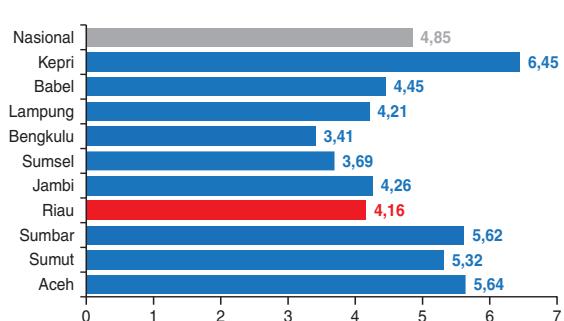
Selanjutnya, TPAK Riau pada Agustus 2025 tercatat sebesar 66,55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 66,33%. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK disumbang oleh peningkatan TPAK perempuan dari 47,05% menjadi 47,68%. Di sisi lain, peningkatan TPAK tersebut ditahan oleh penurunan TPAK laki-laki dari 84,80% pada Agustus 2024 menjadi 84,68% pada Agustus 2025. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, TPAK Riau tercatat paling rendah kedua dibandingkan provinsi lain dan rata-rata Nasional, sebagaimana Grafik 6.2.

Selanjutnya, TPT Riau mengalami peningkatan dari 3,70% pada Agustus 2024 menjadi 4,16% pada Agustus 2025. Peningkatan TPT tersebut mengindikasikan adanya tambahan jumlah pengangguran di Provinsi

Riau, termasuk mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan maupun mempersiapkan usaha. Walaupun meningkat, tingkat TPT Riau masih lebih rendah daripada TPT Nasional sebesar 4,85% (Grafik 6.3) maupun TPT sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera (Grafik 6.4).

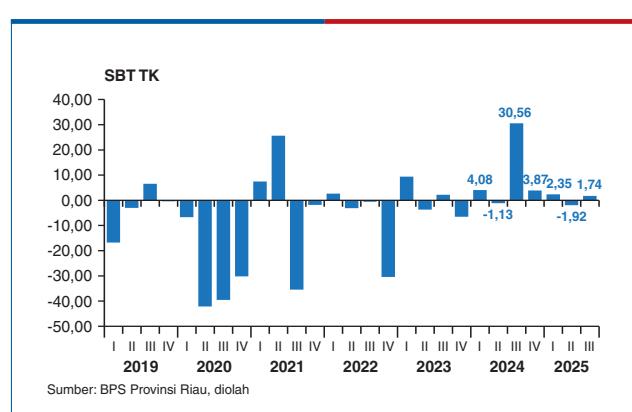
Kondisi peningkatan TPT ini dikonfirmasi oleh hasil SKDU Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan pertumbuhan serapan tenaga kerja dari 30,56 pada triwulan III 2024 menjadi 1,74 pada triwulan III 2025 sebagaimana Grafik 6.5.

Lebih lanjut pada Tabel 6.3, terlihat bahwa struktur penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Riau pada triwulan laporan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ditinjau secara sektoral, penyerapan tenaga kerja utama di Riau pada Agustus



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatra (dalam %)



Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

Grafik 6.5. Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Dunia Usaha di Provinsi Riau



Tabel 6.1. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Ribu Orang)

INDIKATOR	2022		2023		2024		2025		Agt '25 terhadap Agt '24	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Growth	Indikator
Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK)	4.766,90	5.189,24	4.873,51	4.863,74	4.901,47	4.946,20	4.986,08	5.034,09	1,78	↑
Angkatan Kerja	3.145,10	3.313,82	3.176,68	3.134,79	3.222,76	3.280,73	3.224,81	3.350,14	2,12	↑
Bekerja	3.006,59	3.168,93	3.041,63	3.002,33	3.098,76	3.159,37	3.091,84	3.210,93	1,63	↑
Pengangguran	138,51	144,89	135,05	132,45	124,00	121,36	132,97	139,21	14,71	↑
Bukan Angkatan Kerja	1.621,80	1.875,43	1.696,83	1.728,95	1.678,71	1.665,48	1.761,28	1.683,95	1,11	↑
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,98%	63,86%	65,18%	64,45%	65,75%	66,33%	64,68%	66,55%	0,22%	↑
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,40%	4,37%	4,25%	4,23%	3,85%	3,70%	4,12%	4,16%	0,46%	↑

Sumber: BPS Provinsi Riau (Agustus 2025), diolah

Tabel 6.2. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Ribu Orang)

PENDIDIKAN	2022		2023		2024		2025		Agt '25 terhadap Agt '24	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Pangsa	Indikator
SD ke bawah	1.007,22	1.079,84	1.006,06	906,22	928,55	932,90	894,67	906,62	28,24%	(2,82) ↓
SMP	570,27	560,71	508,04	541,78	565,80	543,76	517,90	541,17	16,85%	(0,48) ↓
SMA Umum	715,34	819,56	851,36	843,14	843,97	918,98	891,49	959,59	29,88%	4,42 ↑
SMA Kejuruan	315,90	289,34	325,93	311,62	311,76	294,20	296,53	320,12	9,97%	8,81 ↑
DI/II/III dan Universitas	84,16	83,13	66,26	70,78	78,00	76,99	72,33	67,94	2,12%	(11,75) ↓
Universitas	313,70	336,36	283,98	328,80	370,68	392,54	418,92	415,51	12,94%	5,85 ↑
Total	3.006,59	3.168,94	3.041,63	3.002,34	3.098,76	3.159,37	3.091,84	3.210,95	100%	1,63 ↑

Sumber: BPS Provinsi Riau (Agustus 2025), diolah

Tabel 6.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

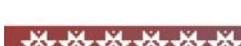
LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	Ribu Orang				Pangsa %	Agt '25 terhadap Agt '24	
	Agt '22	Agt '23	Agt '24	Agt '25		Agt '25	Growth
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.266,2	1.147,0	1.142,1	1.104,6	34,4%	-3,29	↓
Industri Pengolahan	230,1	236,9	256,7	261,0	8,1%	1,67	↑
Perdagangan	568,6	523,4	573,8	586,9	18,3%	2,27	↑
Konstruksi dan Real Estate	165,0	179,1	166,4	185,2	5,8%	11,32	↑
Pengangkutan dan Pergudangan	93,3	102,9	108,3	117,5	3,7%	8,51	↑
Pertambangan dan Penggalian	35,0	43,0	48,9	43,3	1,3%	-11,39	↓
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	31,0	27,0	25,3	31,4	1,0%	23,96	↑
Lainnya *	617,5	782,3	777,2	881,1	27,4%	13,36	↑
Total	3.006,6	3.041,6	3.098,8	3.210,9	100,0%	3,62	↑

* Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari Penyedia Akomodasi Mamin, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Kategori Lainnya

Sumber: BPS Provinsi Riau (Agustus 2025), diolah

masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha utama, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Secara kumulatif ketiga sektor ekonomi tersebut mampu menyerap 60,8% dari total tenaga kerja di Riau.

Sejalan dengan tingginya pangsa serapan tenaga kerja di ketiga sektor tersebut, penurunan penyerapan tenaga kerja pada 1 (satu) sektor, yaitu pertanian, mendorong peningkatan TPT Riau. Selain itu, peningkatan TPT juga didorong oleh turunnya

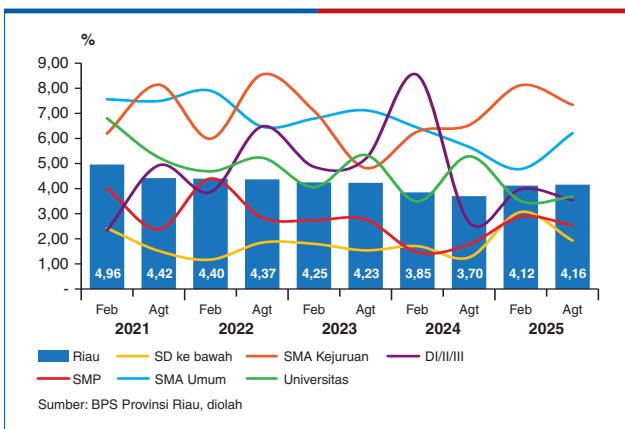




serapan tenaga kerja di beberapa sektor lain seperti pertambangan dan administrasi pemerintahan.

Di sisi lain, terdapat peningkatan serapan tenaga kerja di sektor utama lainnya yaitu industri pengolahan dan perdagangan yang meningkatkan secara terbatas masing-masing sebesar 1,67% (yoy) dan 2,27% (yoy). Selain itu, sektor lain seperti konstruksi dan real estate turut mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Indikator lain yang menarik untuk ditinjau adalah sebaran penduduk bekerja dan pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada Tabel 6.2, terlihat bahwa serapan jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, SMP, dan Diploma mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah pekerja dari tingkat pendidikan SMA, SMK, dan Universitas mengalami peningkatan pada Agustus 2025 dibandingkan Agustus 2024. Lebih dari itu, pangsa tenaga kerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/SMK ke bawah, yaitu 84,94%, sementara pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) masing-masing hanya berpangsa 2,12% dan 12,94%. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan rencana hilirisasi industri.



Grafik 6.6. Perkembangan TPT Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

3. KONDISI KESEJAHTERAAN DAERAH

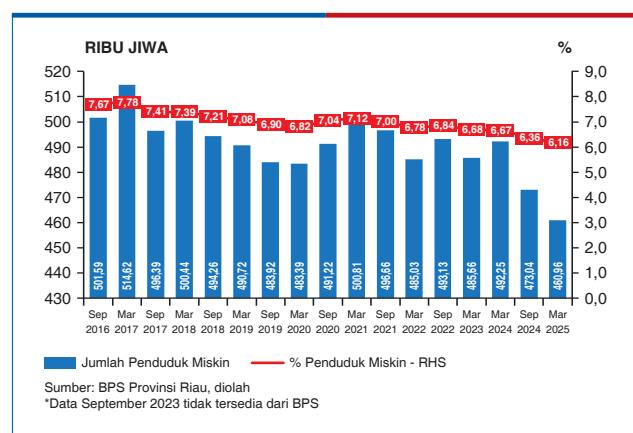
3.1. Kemiskinan

Berdasarkan data kemiskinan terkini, periode Maret 2025, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau terindikasi membaik, terlihat dari tingkat kemiskinan yang tercatat 6,16%, lebih rendah dari September dan Maret 2024 masing-masing 6,36% dan 6,67%. Penurunan kemiskinan ini melanjutkan tren penurunan sebelumnya, mengindikasikan kondisi kesejahteraan penduduk Riau terus membaik.

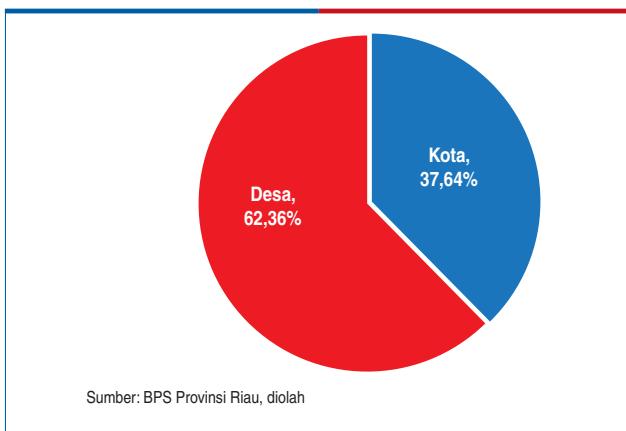
Dilihat dari data historisnya, angka kemiskinan Riau pada Maret 2025 merupakan yang terendah setidaknya sejak tahun 2016 sebagaimana Grafik 6.7. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2025 mencapai 460,96 ribu jiwa, menurun sebanyak 31,29 ribu jiwa dari Maret 2024.

Berdasarkan lokasinya, sebagaimana Grafik 6.8, sebaran penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan dengan pangsa 62,36%. Pangsa tersebut meningkat dari periode sebelumnya yaitu 59,19% pada Maret 2024. Sementara itu, pangsa penduduk miskin di perkotaan tercatat menurun menjadi 37,64% dari 40,81% pada Maret 2024.

Dengan sebaran kemiskinan tersebut, mengindikasikan bahwa nilai tambah dari kegiatan ekonomi di Riau masih lebih cepat dinikmati oleh penduduk di wilayah perkotaan. Memperhatikan hal



Grafik 6.7. Jumlah Penduduk Miskin di Riau



Grafik 6.8. Sebaran Penduduk Miskin di Riau

itu, penguatan program pemerataan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan investasi dibutuhkan untuk memperkecil gap antara wilayah perdesaan dan perkotaan sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Dengan demikian, laju urbanisasi pun juga dapat semakin dikendalikan.

Terlepas dari pangannya, tingkat kemiskinan di perdesaan dan perkotaan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penduduk miskin di perdesaan menurun menjadi 287,45 ribu orang pada Maret 2025 dari 291,34 ribu orang pada Maret 2024, atau turun 1,34% (yoy). Turunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan ini sejalan dengan membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu dari 196,72 pada triwulan IV 2024 menjadi 197,13 pada triwulan I 2025 sebagaimana Grafik 11. Membaiknya NTP ini didorong oleh peningkatan NTP pada subsektor utama yaitu perkebunan rakyat dan hortikultura. Sementara itu, kemiskinan di perkotaan juga tercatat turun dari 200,91 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 173,52 ribu orang pada Maret 2025, atau turun 13,63%. Pesatnya penurunan tingkat kemiskinan perkotaan ini sejalan dengan meningkatnya output sektor ekonomi utama yang menyerap banyak tenaga kerja pada triwulan I 2025 seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

3.2. Garis Kemiskinan

Pada Maret 2025, angka Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan, baik di perdesaan maupun perkotaan. Angka GK mencerminkan pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam 1 bulan yang dibagi dalam GK Makanan (GKM) dan GK Non Makanan (GKNM). Dilihat dari Tabel 6.4, GK di Riau pada Maret 2025 tercatat tumbuh 2,27% menjadi Rp713.117 per kapita/bulan, yang terdiri dari Rp525.806 GKM dan Rp187.311 GKNM.

Peningkatan GK Riau mayoritas bersumber dari kenaikan GKM (73,73%), sedangkan GKNM seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan hanya berkontribusi sekitar 26,27%. Kontribusi komoditas makanan yang masih dominan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut masih berperan penting dalam penentuan tingkat kemiskinan di Riau. Berdasarkan data BPS pada Maret 2025, terdapat 5 (lima) komoditas makanan dengan andil terbesar terhadap GK, baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu: (1) beras, (2) rokok kretek filter, (3) daging ayam ras, (4) telur ayam ras, dan (5) cabe merah. Sedangkan pada komoditas non-makanan, penyumbang GK didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Salah satu penyebab relatif meningkatnya GK adalah kenaikan harga komoditas pangan yang tercermin dari tingkat inflasi komoditas, seperti beras, daging ayam ras, dan rokok kretek. Peningkatan harga komoditas pangan di Riau kerap disebabkan oleh *supply shock* seperti gangguan produksi dan pergeseran periode tanam akibat gangguan cuaca, bencana alam, kenaikan HET, serta transmisi kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan untuk menahan laju peningkatan GKM, diperlukan penguatan program pengendalian inflasi untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.

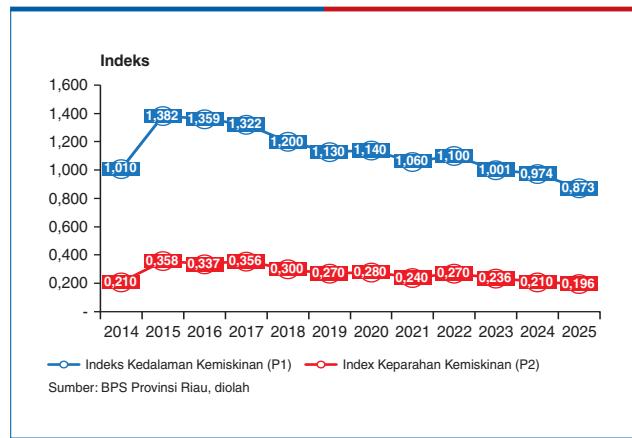


Tabel 6.4. Garis Kemiskinan Provinsi Riau

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Mar-17	318.174	145.074	463.248
Mar-18	342.425	148.954	491.379
Mar-19	361.135	152.604	513.739
Mar-20	400.297	170.165	570.462
Mar-21	419.858	175.412	595.270
Mar-22	450.681	191.327	642.008
Mar-23	495.115	203.126	698.241
Mar-24	529.025	211.197	740.222
Mar-25	542.999	215.175	758.174
Perdesaan			
Mar-17	346.208	104.373	450.581
Mar-18	357.685	114.001	471.686
Mar-19	368.149	23.242	391.391
Mar-20	394.776	131.654	526.430
Mar-21	409.818	136.989	546.807
Mar-22	435.905	146.319	582.224
Mar-23	475.721	156.983	632.704
Mar-24	501.450	167.924	669.374
Mar-25	514.581	168.483	683.064
Kota + Desa			
Mar-17	335.922	120.571	456.493
Mar-18	351.845	128.099	479.944
Mar-19	365.515	135.097	500.612
Mar-20	396.883	147.175	544.058
Mar-21	413.593	152.344	565.937
Mar-22	441.535	164.377	605.912
Mar-23	483.092	175.519	658.611
Mar-24	511.959	185.337	697.296
Mar-25	525.806	187.311	713.117

Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah

Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Riau pada periode Maret 2025 mengalami penurunan, begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menurun dari 0,974 pada Maret 2024 menjadi 0,873 pada Maret 2025. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan representasi rata-rata ukuran kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Riau semakin dekat dengan GK atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Riau semakin rendah.

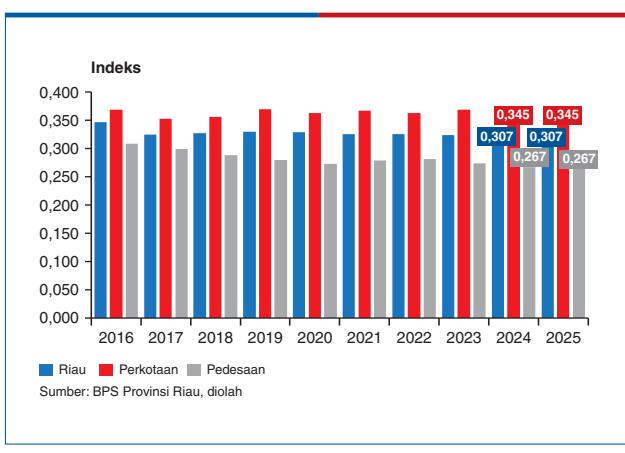


Grafik 6.9. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sedikit menurut. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) tercatat dari 0,21 pada Maret 2024 menjadi 0,196 pada Maret 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Riau sedikit menurun, atau sebaran pengeluaran penduduk miskin di Riau sedikit menyempit.

3.3. Tingkat Ketimpangan (Ratio Gini)

Dimensi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah selain indeks P_1 dan P_2 adalah rasio gini yang terlihat stabil. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio gini yang tercatat sebesar 0,307 pada Maret 2025, sama dengan kondisi Maret 2024. Ketimpangan atau pemerataan pendapatan di Riau masih dapat dijaga untuk tetap berada di kategori sedang ($0,30 \leq G \leq 0,50$) dan rendah ($G < 0,30$). Secara spasial, apabila dibandingkan dengan posisi Maret 2024, rasio gini perkotaan dan perdesaan tidak mengalami perubahan, masing-masing adalah 0,345 dan 0,267.



Grafik 6.10. Perkembangan Rasio Gini (Periode September)

3.4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Indikator kesejahteraan lainnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif petani. Tingkat kesejahteraan petani di Riau pada triwulan III 2025 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

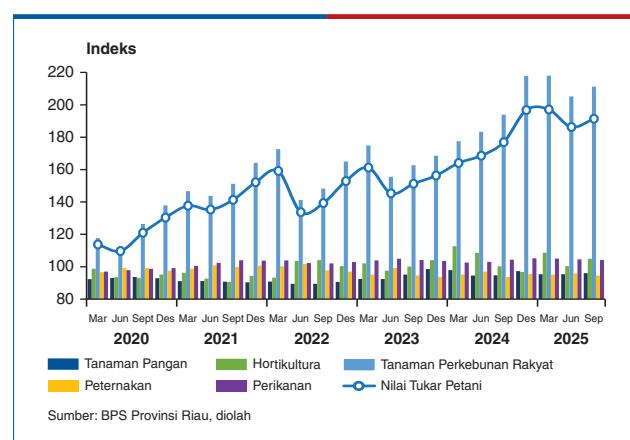
Indikator NTP pada triwulan III 2025 tercatat meningkat sebesar 2,74% (qtq), atau tercatat sebesar 191,38 pada September 2025 dari 186,27 pada Juni 2025. Peningkatan NTP Riau terjadi karena peningkatan indeks harga yang diterima oleh petani (It) lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada indeks harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) meningkat dari 222,44 menjadi 231,28, atau naik sebesar 3,97% (qtq). Di saat yang bersamaan, indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga meningkat dari 119,42 menjadi 120,85 atau meningkat 1,20% (qtq). Secara umum, hal ini mengindikasikan adanya penerimaan yang lebih tinggi dari komoditas yang diproduksi daripada kenaikan harga yang harus dibayar dalam rangka memproduksi komoditas tersebut ditambah kebutuhan konsumsi rumah tangga petani. Secara umum, NTP Riau masih berada di atas 100 yang artinya tingkat kesejahteraan petani relatif terjaga.

Lebih lanjut, peningkatan NTP terjadi di hampir seluruh subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan rakyat.

Hanya subsektor peternakan dan perikanan yang mencatatkan penurunan NTP. Penurunan NTP dari subsektor peternakan dan perikanan menahan peningkatan NTP Riau secara umum pada triwulan III 2025. Penurunan NTP pada kedua subsektor tersebut masing-masing sebesar 1,34% (qtq) dan 0,31% (qtq) atau secara indeks dari 95,84 menjadi 94,56 dan dari 104,54 menjadi 104,22.

Secara lebih rinci, NTP berdasarkan subsektor di Riau masih berada di atas 100 kecuali untuk subsektor tanaman pangan dan peternakan sehingga tingkat kesejahteraan petani mayoritas relatif masih terjaga. Namun demikian, para pemangku kepentingan di daerah tetap perlu memberikan perhatian lebih pada subsektor dengan NTP di bawah 100 tersebut agar net income petani pada subsektor dimaksud juga dapat segera menjadi positif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para petani serta juga dapat mencegah urbanisasi.

Secara spasial dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, NTP Riau tercatat sebagai yang tertinggi kedua di wilayah Sumatera, setelah Bengkulu dengan angka 208,73. Sementara terhadap nasional, hampir seluruh provinsi di wilayah Sumatera berada di atas NTP nasional yaitu sebesar 124,36 serta berada di atas indeks dasar (=100). Hal tersebut mengindikasikan kesejahteraan petani di Riau relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di Sumatera dan Nasional.



Grafik 6.11. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau



BAB 7

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Riau pada 2025 diperkirakan tumbuh positif dalam kisaran 4,20% – 5,00% ditopang oleh perbaikan net ekspor. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau ditopang oleh kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) utama yang membaik pada tahun 2025, di antaranya Industri Pengolahan dan LU Pertanian yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Selain itu, sektor tersier (jasa-jasa) diperkirakan juga akan membaik seiring pemulihan permintaan terutama permintaan domestik. Lebih lanjut, inflasi Provinsi Riau pada tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, serta berada pada batas atas sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan dominan didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Transportasi; dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.



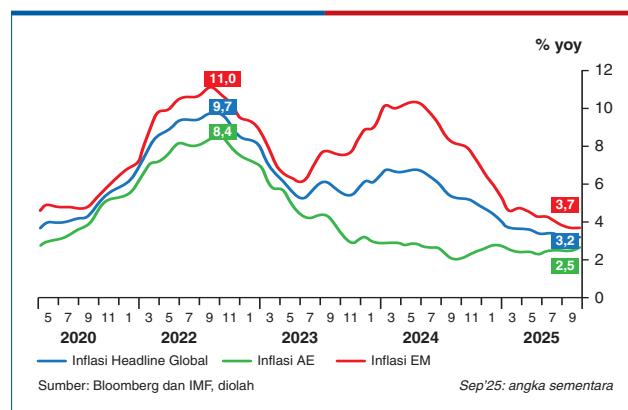
1. PROSPEK EKONOMI GLOBAL 2025 & 2026

Ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda namun dengan risiko yang masih perlu diwaspadai. Ekonomi global pada 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rilis sebelumnya pada Juli 2025. Dengan demikian, ekonomi global diprakirakan relatif lebih lambat dibandingkan tahun 2024, yakni dari sebelumnya 3,3% menjadi 3,2% pada tahun 2025 dan 3,1% pada tahun 2026¹.

Pertumbuhan ekonomi negara maju diprakirakan tumbuh melambat, yaitu dari sebelumnya sebesar 1,8% (yoj) pada tahun 2024 menjadi 1,3% (yoj) pada tahun 2025 disebabkan oleh estimasi kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang masing-masing tumbuh dari 2,8% (yoj) dan 0,9% (yoj) pada tahun 2024 menjadi masing-masing tumbuh sebesar 2,0% dan 1,2% (yoj) pada tahun 2025. Lebih kuatnya kinerja ekonomi kawasan Eropa sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, termasuk fiskal akomodatif, dan kenaikan ekspor.

Sementara itu, kinerja ekonomi negara berkembang diprakirakan melambat dari 4,3% (yoj) pada tahun 2024 menjadi 4,2% (yoj) pada tahun 2025. Tertahannya kinerja ekonomi global dipengaruhi oleh tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian global meningkat.

Divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi AS masih melambat akibat berlanjutnya dampak tarif dagang AS dan sempat berhentinya aktivitas Pemerintah AS yang terlama sepanjang sejarah yang berdampak pada tetap lemahnya kondisi ketenagakerjaan AS. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Jepang, Tiongkok, dan India akibat



Grafik 7.1. Perkembangan Inflasi Global

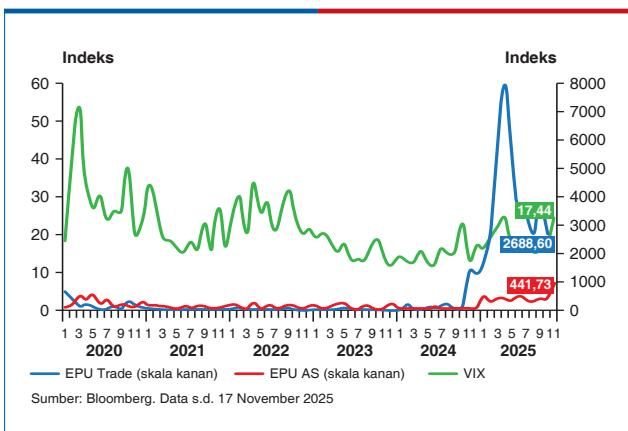
permintaan domestik yang belum kuat. Sementara itu, ekonomi Eropa tumbuh lebih tinggi dari prakiraan akibat realisasi pertumbuhan di triwulan III 2025 yang ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi seiring pelonggaran kebijakan moneter.

Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat di tengah terjadinya *temporary government shutdown* dan arah suku bunga kebijakan moneter AS. Dari pasar keuangan, ketidakpastian kembali meningkat dipengaruhi oleh penurunan suku bunga kebijakan bank sentral AS yang dinilai pasar lebih berhati-hati (*less dovish*). Sebagai dampaknya, aliran modal global ke komoditas emas dan aset keuangan AS sebagai *safe haven* terus berlanjut sehingga mendorong peningkatan harga emas dan penguatan indeks mata uang dolar AS (DXY). Sementara itu, aliran modal ke *Emerging Market* (EM) lebih terbatas ke pasar saham.

Sementara itu, penurunan inflasi dunia terus berlanjut dengan penurunan inflasi negara-negara maju relatif lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang. Pada triwulan III 2025 (hingga Oktober 2025), inflasi global dan negara-negara maju menunjukkan tren penurunan. Di sisi lain, negara-negara berkembang terpantau mengalami pelambatan. Ke depan, inflasi global diprakirakan melandai ke 4,2% (yoj) pada tahun 2025 dan 3,7% pada 2026².

1. IMF *World Economic Outlook October 2025*

2. IMF *World Economic Outlook October 2025*



Grafik 7.2. Indeks Ketidakpastian Global

Fragmentasi geopolitik-geoekonomi juga berpengaruh pada divergensi aliran perdagangan dan investasi antarnegara yang lebih menguntungkan negara-negara maju, khususnya AS. Pertumbuhan perdagangan dunia diprakirakan turun dari 3,5% pada 2024 menjadi 2,6% pada 2025, lebih rendah dari rata-rata satu dekade sebelum Covid-19 sebesar 4,9%. Di samping karena perbedaan pola peningkatan permintaan antarnegara, penurunan perdagangan ini juga disebabkan restriksi perdagangan yang berasal dari peningkatan tarif.

Di tengah prospek masih tertahannya ekonomi global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan tetap kuat seperti tahun 2024, didukung oleh peningkatan investasi dan inflasi yang terkendali dalam target sasaran. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berada dalam kisaran 4,6–5,4% dan akan meningkat di tahun 2026. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang baik didukung terjadinya daya beli seiring meredanya tekanan inflasi yang diprakirakan kembali pada kisaran sasaran $2,5\%\pm1\%$ di 2025 dan 2026.

Kinerja permintaan domestik diprakirakan tetap kuat sepanjang 2025, ditopang oleh terjadinya komponen

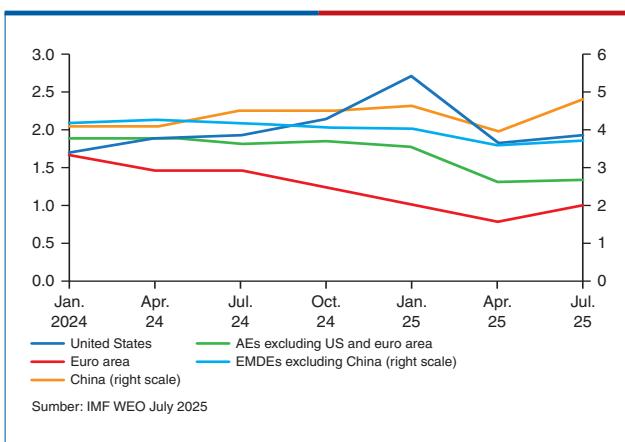
konsumsi RT sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan penyelenggaraan event internasional. Sementara itu, prospek investasi lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama pada investasi bangunan. Peran fiskal daerah diprakirakan berlanjut, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi. Adapun kinerja ekspor diprakirakan terjaga meski lebih rendah dari prakiraan, sejalan dengan pelambatan perekonomian global.

Perekonomian Provinsi Riau pada 2025 diprakirakan tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Riau tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,20% – 5,00% (yoY). Dari sisi penawaran, percepatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh percepatan kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Dari sisi permintaan, percepatan ekonomi Riau pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan net ekspor LN.

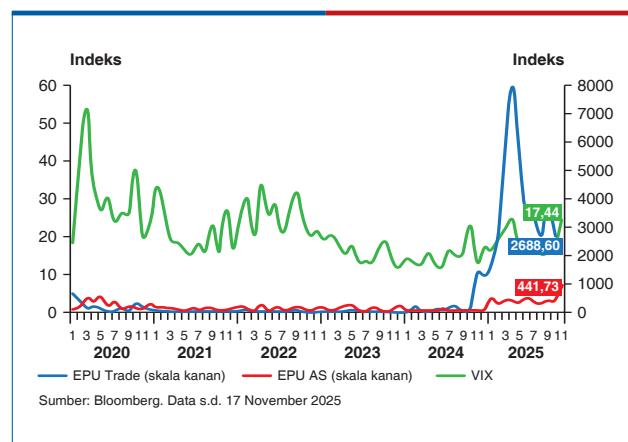
Hilirisasi menjadi kunci utama pertumbuhan perekonomian Riau. Peningkatan nilai tambah dari hilirisasi dapat mendukung pertumbuhan ekspor luar negeri Provinsi Riau. Perdagangan antardaerah Riau juga diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Kinerja sektor pertanian diprakirakan meningkat, sementara kinerja Industri Pengolahan diprakirakan juga tumbuh sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik CPO dan produksi pulp and paper dan ekspor yang meningkat. Potensi perbaikan negara ASEAN, serta negara tujuan ekspor LN non-tradisional diprakirakan menjaga tetap positifnya ekspor LN Riau pada tahun 2025. Ekonomi India diperkirakan tumbuh stabil di angka 6,6% di tahun 2025, serta akan relatif stabil pada tahun 2026. Kawasan ASEAN-5 diperkirakan juga tetap terjaga sejalan sebagaimana tercermin pada perkiraan pertumbuhan dari sebelumnya 4,6% pada tahun 2024 menjadi 4,4% pada tahun 2025.





Grafik 7.3. Tren PDB Global



Grafik 7.4. Indeks Ketidakpastian dan Volatilitas Global

Akan tetapi, volume perdagangan dunia pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan 2024. Volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% (yoY) pada tahun 2024, menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 3,6% (yoY). Hal tersebut disebabkan oleh perilaku *front-loading* perdagangan dihadapan tarif berdasarkan laporan *World Economic Outlook* dari *Internasional Monetary Fund*.

Sejalan dengan peningkatan perdagangan internasional, harga komoditas global non-BBM diperkirakan meningkat. Hal tersebut diperkirakan turut menjaga kinerja eksport utama Provinsi Riau.

Di tahun 2026, perekonomian Riau diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2025. Dengan stimulus pemerintah yang mendukung konsumsi domestik dan peningkatan kepercayaan pengusaha untuk berinvestasi, diprakirakan pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2026 akan membaik.

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Sejumlah Negara Maju dan Berkembang (% yoY)

Negara	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Dunia	-2,8	6,3	3,5	3,3	3,3	3,1
Negara Maju	-4,2	5,6	2,6	1,7	1,8	1,7
Amerika Serikat	-2,8	5,9	1,9	2,8	2,8	2,0
Kawasan Eropa	-6,1	5,6	3,4	0,4	0,9	1,3
Jepang	-4,2	2,2	1,0	1,5	0,1	1,0
Negara Berkembang	-1,8	6,9	4,1	4,4	4,3	4,0
Tiongkok	2,2	8,4	3,0	5,2	5,0	4,8
India	-6,6	8,3	6,8	7,7	6,5	6,6
ASEAN-5	-4,4	4,0	5,5	4,0	4,6	4,4
Amerika Latin	-7,0	7,4	4,2	2,4	2,4	1,9
1 Negara Berkembang Eropa	-1,6	7,3	1,2	3,3	3,4	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	-2,6	4,3	5,4	2,0	2,4	3,4

Sumber: IMF WEO. * Proyeksi Bank Indonesia



Tabel 7.2. Perkembangan Harga Komoditas Ekspor Indonesia (% yoy)

KOMODITAS	2022					2023					2024					2025				
	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD*
Tembaga	17,4	-1,8	-17,7	-16,4	-5,2	-10,2	-11,0	8,6	3,1	-3,3	-4,7	16,8	11,2	12,8	8,8	10,3	-4,3	5,6	15,6	5,4
Batu Bara	94,1	73,2	11,1	-1,6	32,3	-2,9	-27,7	-35,7	-35,8	-25,9	-27,7	-16,3	0,2	-11,3	-15,3	-14,4	-16,8	-20,2	-12,1	-16,1
CPO	56,7	55,5	-12,2	-24,9	15,3	-35,6	-42,0	-3,2	5,9	-25,9	0,5	6,2	5,2	31,3	10,5	17,1	0,3	6,9	-11,7	3,1
Karet	1,7	2,2	-6,0	-19,8	-4,9	-21,1	-27,3	-8,0	11,5	-13,5	17,9	44,3	40,6	40,0	35,3	9,3	-9,2	-7,6	-13,4	-4,7
Nikel	59,4	66,7	16,0	30,3	42,1	-6,7	-22,6	-7,0	-31,8	-17,3	-35,7	-16,9	-19,9	-7,2	-21,3	-6,3	-17,7	-7,8	-6,5	-9,7
Timah	80,6	25,3	-30,3	-43,1	0,0	-38,6	-29,4	13,8	14,6	-16,8	0,2	25,3	185	23,4	16,7	21,0	0,5	7,0	18,8	10,3
Alumunium	54,3	20,2	-11,0	-14,7	9,4	-24,9	-21,3	-6,6	-5,5	-15,7	-8,2	12,3	10,0	16,9	7,4	17,1	-3,9	8,1	8,0	6,1
Kopi	82,5	50,8	18,3	-21,2	24,6	-26,4	-19,3	-28,6	-2,1	-20,1	7,1	19,9	55,9	65,7	36,4	100,7	63,9	36,9	33,0	46,2
Lainnya	5,2	6,4	7,3	6,3	6,3	-1,5	-1,7	-2,2	-3,1	-2,1	-1,0	-0,2	0,3	0,1	-0,2	-0,2	1,1	1,7	-0,6	0,5
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	47,0	37,7	1,3	-6,8	15,3	-12,7	-21,7	-12,2	-12,0	-16,0	-8,2	1,7	6,1	8,7	1,5	2,9	-5,0	-3,5	-5,1	-3,1
Minyak (Brent)**	101	113	101	88	101	81	78	87	84	83	83	85	80	75	81	76	68	69	64	70

** Minyak dalam USD/barel, komoditas lain (% , yoy)
Sumber: Bloomberg. Data sampai 18 November 2025

2. PROSPEK EKONOMI REGIONAL 2025

2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2025

Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,20 – 5,00% (yoY), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoY). Percepatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja net ekspor LN. Namun demikian, potensi disruptif perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan prospek ekonomi nasional, kinerja positif konsumsi swasta diperkirakan menjadi penopang utama ekonomi Riau di tahun 2025. Terjaganya daya beli masyarakat, yang didukung oleh peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga terjaganya harga kelapa sawit mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. Selain konsumsi swasta, ekspor dan perdagangan antardaerah Riau juga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Secara sektoral, prospek ekonomi Riau yang lebih tinggi disebabkan oleh perbaikan kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi

tertahan oleh kinerja pada LU Pertambangan. Prospek ekonomi yang tetap positif juga mendorong kinerja LU sektor tersier, antara lain Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

2.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Permintaan

Untuk keseluruhan tahun 2025, kinerja ekonomi Riau dari sisi permintaan diperkirakan mengalami peningkatan, ditopang oleh perbaikan konsumsi swasta serta ekspor luar negeri. Terjaganya kinerja konsumsi swasta yang bersumber dari konsumsi Rumah Tangga diperkirakan tumbuh tetap kuat. Akan tetapi, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) diperkirakan melambat dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu, Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024).

Sementara itu, kinerja ekspor LN Riau diperkirakan masih tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025. Meskipun demikian, dengan adanya pergeseran ekspor antar daerah untuk memenuhi kebutuhan luar negeri, Net Ekspor Antar Daerah pada tahun 2025 diperkirakan terkontraksi. Sejalan dengan peningkatan ekspor luar negeri tersebut, impor Riau juga diperkirakan akan mengalami percepatan.



KONSUMSI SWASTA

Prospek konsumsi swasta pada 2025 diprakirakan tumbuh terbatas, akan tetapi masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Riau. Kinerja konsumsi swasta Provinsi Riau diperkirakan tetap tumbuh positif ditopang oleh tetap kuatnya konsumsi RT. Perbaikan pendapatan masyarakat diprakirakan sejalan dengan penyesuaian UMP sebesar 6,5%. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen (SK) pada Triwulan III 2025, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dalam 6 (enam) bulan mendatang masih berada pada rentang level optimis. Akan tetapi, konsumsi LNPRT diprakirakan melambat sehubungan dengan selesainya pesta demokrasi di tahun 2024.

Prospek positif konsumsi swasta juga didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia, antara lain insentif PPNDTP 11% rumah tapak dan rumah susun, serta berlanjutnya pelonggaran kebijakan *loan/financing to value* (LTV/FTV) kredit properti dan uang muka kredit/pembayaran kendaraan bermotor bagi bank yang memenuhi syarat *Non-Performing Loan* (NPL) agar dapat memberikan pinjaman uang muka hingga 0%, diharapkan dapat memberikan insentif penyaluran kredit ke masyarakat. Selain itu, pertumbuhan konsumsi swasta pada keseluruhan tahun 2025 juga didukung oleh inflasi yang terjaga pada kisaran sasaran.

Meskipun demikian, konsumsi swasta Provinsi Riau pada tahun 2025 diprakirakan masih dibayangi perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang tertahan, serta prospek pelambatan ekonomi global pada tahun 2025 yang berdampak pada penurunan lapangan pekerjaan yang terindikasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 yang pada 4,16%, meningkat dari Agustus 2024 yang berada di 3,70% menahan pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi.

INVESTASI

Kedepan, kinerja investasi diprakirakan tetap kuat dan tumbuh positif pada tahun 2025 terutama ditopang oleh investasi non-bangunan. Pertumbuhan investasi diperkirakan terutama bersumber dari investasi non-bangunan, investasi korporasi swasta di sektor industri pengolahan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi oleh perusahaan sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik dan peningkatan ekspor luar negeri, terutama pada industri pengolahan CPO, serta peningkatan kapasitas industri pengolahan *pulp* dan kertas. Investasi korporasi swasta di sektor industri pengolahan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi. Peningkatan kapasitas produksi oleh perusahaan sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik, terutama pada industri pengolahan CPO, serta peningkatan kapasitas industri pengolahan *pulp* dan kertas.

Namun demikian, kinerja investasi bangunan diprakirakan melambat seiring dengan penyelesaian proyek pembangunan seperti penyelesaian ruas Tol Bangkinang-Pangkalan di Provinsi Riau dan juga penundaan penyelesaian penghubung dengan ruas tol seksi XIII Koto Kampar – Pangkalan. Hal ini terkonfirmasi dari penyaluran kredit konstruksi pada triwulan III 2025 yang berada di -34,89% (yoy), lebih rendah dari triwulan II 2025 yang berada di 5,18% (yoy).

KONSUMSI PEMERINTAH – FISKAL DAERAH

Pada tahun 2025, kinerja fiskal melambat seiring penurunan pagu belanja APBD. Pelambatan realisasi diprakirakan sejalan dengan penurunan pagu belanja daerah APBD dari Rp11,02 triliun menjadi Rp9,69 triliun pada tahun 2025, serta penurunan pagu APBN Provinsi Riau dari Rp33,87 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp32,78 triliun di tahun 2025. Penurunan APBD disebabkan *readjustment* pagu belanja sesuai dengan perkiraan pendapatan berdasarkan kondisi terkini.



Akselerasi program elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan realisasi belanja di daerah.

EKSPOR DAN IMPOR BARANG DAN JASA

Di tengah prospek pelambatan ekonomi global, kinerja ekspor dan impor Riau diprakirakan tetap tumbuh. Dari sisi eksternal, potensi perbaikan ekonomi ASEAN, salah satu mitra dagang utama Riau, serta potensi kenaikan ekspor komoditas olahan *pulp* dan kertas Riau diprakirakan berkontribusi tetap kuatnya ekspor LN Riau pada tahun 2025. Sementara itu, prospek net ekspor juga ditopang oleh tetap pertumbuhan ekspor CPO dan hilirisasi nya seperti *oleochemical* yang memberikan nilai tambah lebih tinggi bagi ekspor luar negeri. Secara keseluruhan, prospek net ekspor di Riau berpotensi lebih tinggi dengan pemulihian permintaan negara mitra dagang utama. Hal tersebut juga diimbangi peningkatan impor kebutuhan bahan baku pada industri pengolahan. Akan tetapi, dari sisi domestik, perdagangan antardaerah Riau diprakirakan terkontraksi sejalan dengan prospek pergeseran pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri yang tinggi mengurangi porsi penjualan domestik.

Impor luar negeri diperkirakan mengalami percepatan. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan impor barang antara untuk memenuhi kebutuhan LU Industri Pengolahan. Akan tetapi, impor barang modal dan impor barang konsumsi diprakirakan mengalami perlambatan.

Net Ekspor Antar Daerah diperkirakan terkontraksi di tahun 2025. Dengan peningkatan permintaan ekspor LN atas komoditas CPO dan turunannya, diprakirakan akan ada *shifting* pangsa ekspor antar daerah untuk memenuhi kebutuhan ekspor LN.

2.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), untuk keseluruhan tahun 2025, seluruh LU diprakirakan tumbuh positif. Sumber pertumbuhan ekonomi Riau pada 2025 berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor ekonomi tersier. Peningkatan kinerja LU tersebut utamanya ditopang oleh kinerja LU yang berorientasi ekspor. Namun demikian, kinerja sektor pertambangan diprakirakan melambat pada tahun 2025 sehingga diprakirakan menahan pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian diprakirakan meningkat pada tahun 2025, terutama bersumber dari subsektor perkebunan kelapa sawit. Produktivitas perkebunan Riau yang tetap karena upaya peremajaan yang telah dilakukan 5 tahun lalu sebesar 160 ribu hektar atau 5,62% dari total luas lahan kelapa sawit di Riau, diprakirakan menopang pertumbuhan LU Pertanian pada tahun 2025. Membaiknya kinerja perkebunan kelapa sawit tersebut ditopang oleh kondisi cuaca yang mendukung dan meningkatnya harga TBS. Peningkatan ini terutama sejalan dengan berakhirnya periode El-Nino sehingga mendorong capaian panen sub LU tabama dan hortikultura. Produksi padi diprakirakan membaik, mendorong peningkatan kinerja LU Pertanian di seluruh wilayah seiring dengan dampak El-Nino yang lebih lemah, terutama pada masa puncak panen awal tahun. Di samping faktor perbaikan cuaca, implementasi sejumlah program intensifikasi dan peningkatan produksi juga mendukung capaian produksi pertanian pada 2025.

Program *replanting* 5 tahun lalu yang sebesar 160 ribu hektar atau sekitar 5,62% dari luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau, lebih tinggi dari periode sebelumnya, diprakirakan akan mendorong peningkatan produktivitas komoditas kelapa sawit.



Lebih lanjut, meningkatnya luas tanaman yang menghasilkan setelah *replanting* dan intensifikasi lahan turut mendorong tumbuh tingginya kinerja LU Pertanian. Kinerja LU Pertanian juga diprakirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan kebutuhan produksi CPO dan biodiesel yang akan mendorong produksi TBS menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan di Riau pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh lebih kuat. Kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan akan tetap ditopang oleh industri berbasis CPO seiring peningkatan permintaan ekspor dan hilirisasi menuju produk turunan seperti *oleochemical*. Selain itu, tingginya permintaan domestik, seiring berlanjutnya program B40 yang diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dan menargetkan Indonesia bebas impor Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2027, diprakirakan akan menopang permintaan CPO.

LU Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian diprakirakan tumbuh melambat di tahun 2025. Berlanjutnya *natural declining* migas, serta *unplanned shut down* yang terjadi menahan pertumbuhan yang lebih tinggi. *Natural declining* migas yang diprakirakan sekitar 10% setiap tahunnya dan *unplanned shutdown* ditengarai menahan pertumbuhan LU Pertambangan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan kegiatan eksplorasi & produksi sejak tahun 2024 diharapkan akan menahan pelambatan LU Pertambangan yang lebih dalam.

LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh positif. LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh

positif sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta proyek swasta korporasi, maupun rumah tangga. Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis oleh Pemerintah, serta proyek pembangunan oleh Pemda. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Akan tetapi, penurunan APBD pemerintah daerah dapat menghambat pertumbuhan LU konstruksi terkait proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah.

LU Perdagangan

Secara keseluruhan tahun 2025, kinerja LU Perdagangan diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Termoderasinya pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan dipengaruhi oleh konsumsi yang belum setinggi prakiraan, seiring tertahannya pertumbuhan harga komoditas seperti karet. Di samping itu, penyesuaian stimulus fiskal berupa insentif pajak yang lebih rendah juga diperkirakan berkontribusi pada melambatnya LU perdagangan pada tahun 2025.

Namun demikian, terjaganya daya beli masyarakat yang sejalan dengan kenaikan pendapatan, masih tingginya permintaan, peningkatan UMP, serta berlanjutnya program insentif kendaraan listrik dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP), dan optimalisasi MBG di semester kedua diprakirakan menjadi faktor utama tetap tumbuh positifnya kinerja LU Perdagangan di tahun 2025.

LU Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmin)

LU Penyedia Akomodasi dan Makan Minum pada 2025 diprakirakan tetap kuat. Kinerja LU Akomodasi dan Makan Minum pada 2025 diprakirakan tetap kuat, meskipun akan melambat dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan *Meeting, Incentive, Conferences, and Exhibition* (MICE) berskala besar yang terus





bertambah, serta rencana penambahan rute dan frekuensi penerbangan domestik.

Di sisi lain, efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat menahan pertumbuhan LU Akmamin. Pemotongan anggaran belanja untuk kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan perjalanan dinas dapat menghambat pertumbuhan LU Akmamin di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Akan tetapi, terdapat potensi perbaikan pada Semester II 2025 yang terindikasi dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang yang lebih tinggi pada Triwulan III 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2026

Pada tahun 2026, konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat. Dengan terjaganya NTP dan pendapatan masyarakat, di tengah peningkatan keyakinan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh program stimulus pemerintah yaitu 8 program akselerasi 2025 + 4 program dilanjutkan 2026 + 5 program penyerapan tenaga kerja (program 8+4+5), akan mengakselerasi konsumsi di tahun 2026.

Target percepatan pembangunan Riau terus diupayakan. Capaian Riau sebagai provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Sumatera, mendorong Riau menjadi salah satu sasaran investasi. Berbagai pembangunan proyek strategis nasional akan berlanjut pada tahun 2026, diantaranya: 1) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II yang meliputi ruas Pekanbaru – Rengat dan Rengat – Pekanbaru; 2) Pipa Gas Dumai – Sei Mangke dengan nilai proyek mencapai Rp6,6 triliun (target selesai 2027).

Eksport Luar Negeri Provinsi Riau diperkirakan tetap tumbuh positif. Sejalan dengan proyeksi *International Monetary Fund* mengenai *World Trade Volume* tahun 2026 yang melambat menjadi 2,3% dari perkiraan tahun 2025 sebesar 3,6%, permintaan global atas komoditas utama Riau diperkirakan melambat.

Akan tetapi, perkembangan hilirisasi *oleochemical* dan juga kebutuhan akan CPO yang tidak mudah disubstitusikan akan menjaga kinerja sektor eksternal Provinsi Riau tetap positif.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor ekonomi berbasis SDA masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2025. Pada LU Pertanian, produksi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanam industri diprakirakan stabil seiring dengan permintaan bahan baku industri terkait yang tetap kuat. Kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan akan tetap ditopang oleh industri berbasis CPO seiring peningkatan permintaan domestik, khususnya industri minyak goreng dan penguatan program energi terbarukan. Berlanjutnya implementasi program *biodiesel* sebagai dukungan terhadap upaya Pemerintah RI dalam menargetkan Indonesia bebas impor bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2027 diprakirakan akan menopang permintaan CPO. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas produksi komoditas pulp dan kertas diprakirakan turut berkontribusi dalam mendorong kinerja industri pengolahan. Sementara itu, pada LU Pertambangan, Pertamina terus menggenjot produksi minyak dalam negeri, termasuk di Blok Rokan, untuk mencapai target *lifting* 1 juta barel per hari dengan menggelontorkan investasi sebesar USD 2 miliar hingga tahun 2025. Sebagai upaya peningkatan produktivitas lifting minyak di Blok Rokan, PHR juga berencana melakukan pengembangan teknologi *chemical enhanced oil recovery* (CEOR) di Lapangan Minas pada tahun 2025. Dengan kondisi tersebut, kami memprakirakan perekonomian Riau pada tahun 2026.

2.3. Prospek Inflasi Provinsi Riau 2025

Inflasi global diprakirakan akan lebih terkendali pada tahun 2025. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2025 memprakirakan inflasi global akan menurun dari 5,7% pada tahun 2024 menjadi 4,2% pada tahun 2024 dan 3,5% pada tahun 2026. Penurunan inflasi pada negara





maju diprakirakan dapat lebih cepat dibandingkan negara berkembang di topang oleh inflasi inti secara umum diprakirakan akan menurun secara bertahap.

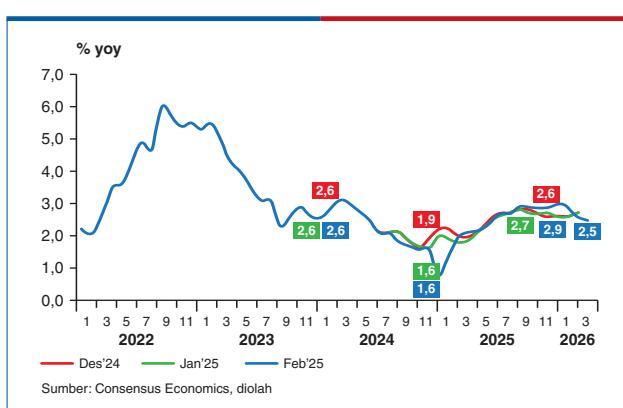
Sejalan dengan perkembangan inflasi global, Pemerintah dan Bank Indonesia turut menyakini inflasi Nasional pada tahun 2025 dan 2026 tetap terkendali dengan rentang target sasaran $2,5\pm 1\%$ (yoY). Terkendalinya inflasi nasional turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Selain itu, efektivitas upaya perbaikan pasokan dan distribusi pangan, ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif digitalisasi.

Sejalan dengan prakiraan inflasi Nasional, inflasi Riau tahun 2025 diprakirakan turut terkendali dalam sasaran inflasi Nasional, didukung oleh inflasi komponen *Volatile Food* (VF) dan *Core Inflation* (CI) yang lebih terkendali di tengah kenaikan tekanan inflasi kelompok *Administered Prices* (AP). Prospek tersebut didasari oleh hal-hal sebagai berikut: (i) Inflasi komponen VF diprakirakan terkendali pada rentang sasaran seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat atas barang pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN),

Peningkatan Indeks Harga *Imported Inflation* (IHIM) Pangan yg memengaruhi *imported inflation*, penguatan stabilisasi harga dan pasokan pangan terus dilakukan TPIP/TPID melalui GNPIP 2025. (ii) inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau, serta (iii) inflasi AP yang mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilisasi tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respons kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.

3. RISIKO

Kondisi perekonomian Riau masih dibayangi beberapa risiko (*downside risk*), di antaranya diperkirakan berasal dari: (i) komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang dipengaruhi oleh prospek harga komoditas internasional yang mengalami pelambatan, volume perdagangan dunia yang termoderasi lebih dalam, serta eskalasi ketegangan geopolitik yang memengaruhi transaksi perdagangan dan harga komoditas global; (ii) Faktor cuaca ekstrim yang memengaruhi produksi komoditas di Riau, (iii) Peningkatan biaya *freight* kapal untuk pengiriman komoditas internasional akibat pemutaran jalur rute kapal sebagai dampak perang Timur, serta (iv) Penurunan produksi karet yang disebabkan berkurangnya pasokan bahan baku karena banyaknya petani dan perusahaan yang melakukan konversi lahan karet menjadi kelapa sawit.



Grafik 7.5. Ekspektasi Inflasi



Bank Indonesia juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih baik, khususnya dari sisi permintaan, dengan terus mendorong stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang cepat, aman, dan handal, serta bersinergi erat dengan Pemerintah Daerah dan otoritas terkait. Beberapa upaya akan terus dilakukan dalam mendorong kinerja ekonomi Riau, antara lain:

1. **Penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait untuk mendorong penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha.** Hal ini dilakukan agar investasi pada produk turunan komoditas utama Riau dapat lebih beragam dan mengarah pada produk konsumsi yang bernilai tambah tinggi.
2. **Dukungan atas penguatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas dan ketersediaan energi, terutama pada kawasan industri, yang ditopang oleh instrumen tata ruang, perizinan, dan insentif pajak daerah.** Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan peningkatan alokasi belanja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.
3. **Optimalisasi anggaran melalui percepatan realisasi anggaran yang tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.** Aktivitas konsumsi pemerintah akan berdampak luas terhadap elemen perekonomian di Riau. Alokasi anggaran yang tepat guna dapat mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor produksi. Selain itu, pentingnya mendorong pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah seperti melalui program wakaf produktif terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis.
4. **Mengembangkan sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada sektor pariwisata dan UMKM.** Pengembangan sektor pariwisata dan UMKM dapat dilakukan melalui (i) pengembangan desa wisata; (ii) penguatan dan integrasi database pelaku UMKM; (iii) penguatan

dan korporatisasi UMKM; (iv) pengembangan model bisnis UMKM berbasis halal *value chain*; (v) Pelatihan dan pendampingan digitilisasi bagi UMKM agar dapat naik kelas; serta (vi) pendampingan dan fasilitasi UMKM melalui *business matching* dan promosi perdagangan di dalam dan/atau luar negeri.

5. **Meningkatkan transaksi ekonomi melalui sistem pembayaran nontunai.** Tren digitalisasi yang meningkat harus dimanfaatkan dalam menciptakan perekonomian yang lebih efisien, termasuk dalam lingkup pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong elektronifikasi dan transaksi digital, yaitu pemanfaatan kanal pembayaran digital pada pembayaran pajak dan retribusi untuk mendorong pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Dari sisi inflasi, koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan mitra strategis lainnya melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali dalam sasarannya pada tahun 2025.

Upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat oleh TPID Riau pada tahun 2025, melalui:

1. **Program OPSI PADI Riau Dukungan Ketahanan Pangan Riau**

Dalam rangka mendukung Program Swasembada Pangan Nasional (SPN), serta upaya mengatasi defisit neraca pangan di Provinsi Riau, TPID Riau mencanangkan Program Optimalisasi Produksi Padi (OPSI) Riau Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan Riau. OPSI PADI Riau 2025 mencanangkan Peningkatan Produksi Padi seluas 50.000 Ha terdiri dari Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) seluas 30.000 ha, Peningkatan Produktivitas seluas 10.000 ha, Rehabilitasi Sawah Terlantar (RST) seluas 5.000 ha, dan Cetak Sawah Baru (CSB) seluas 5.000 Ha. Target





akhir luas area tanam pada tahun 2029 akan menjadi 112.493 Ha dan produksi padi Riau menjadi 493.566 ton GKP atau setara dengan 252.267 ton beras.

2. Peran BUMD Pangan Riau

Mendorong peran kelembagaan melalui BUMD melalui **Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN)** pada tanggal 8 Juli 2025 dan Korporasi Petani sehingga dapat menjadi off-taker pasokan. Seluruh OPD terkait dapat mendorong optimalisasi peran off-taker lokal termasuk memfasilitasi *linkage* kemitraan dengan industri, serta pemanfaatan *cold storage* untuk penyimpanan komoditas pangan.

3. Penguatan kerjasama antardaerah (KAD) yang ditindaklanjuti dengan transaksi berkelanjutan setelah adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS),

baik yang bersifat *Government to Government* (G2G) maupun *Business to Business* (B2B), serta disinergikan dengan Fasilitasi Distribusi Pangan dan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/SPHP.

4. Pembentukan dan Perluasan Kios Pangan Pengendali Inflasi

TPID Riau akan menambah Kios Pengendalian Inflasi Terkendali. Selain itu, memperkuat skema Pasar Tani yang melibatkan petani untuk langsung berjualan di Pasar Murah, dengan harga jual di atas harga jual ke distributor/pengepul namun masih di bawah harga jual pasar.

Secara umum, terdapat sejumlah faktor pendorong dan penahan inflasi tahun 2025 yang perlu dicermati sebagai berikut:

Tabel 7.3. Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Riau Tahun 2025

Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2025	Faktor Penahan Inflasi Tahun 2025
<p>VOLATILE FOOD (VF)</p> <ul style="list-style-type: none"> Defisit neraca pangan mendorong tingginya ketergantungan pada pasokan daerah lain Peningkatan permintaan masyarakat atas barang pangan menjelang HBKN Peningkatan Indeks Harga <i>Imported Inflation</i> (IHIM) Pangan yg memengaruhi imported inflation Kegagalan panen di beberapa sentra produksi akibat pengaruh cuaca yang menyebabkan penurunan jumlah pasokan komoditas <p>CORE INFLATION (CI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, harga komoditas global (a.l CPO dan emas perhiasan). Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2025 sebesar 6,5% dibandingkan 2024 Tren peningkatan permintaan pada momen HBKN Pola musiman kenaikan sewa rumah, kontrak rumah, pendidikan, mobil <p>ADMINISTERED PRICES (AP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian skema subsidi pemerintah terkait energi Pembatasan penyaluran BBM subsidi Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Kenaikan tarif tol Pekanbaru-Bangkinang-Kota Kampar 	<p>VOLATILE FOOD (VF)</p> <ul style="list-style-type: none"> Efektivitas program TPID dalam perbaikan produksi dan pengelolaan pasokan komoditas pangan yang lebih efisien. Program OPSI PADI RIAU untuk meningkatkan produksi padi Riau 2025 Pembentukan BUMD Pangan Riau 2025 dan Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN) <p>CORE INFLATION (CI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan moneter yang bersifat <i>pre-emptive</i> dan <i>forward looking</i> guna menjaga inflasi inti ke dalam target sasaran Ekspektasi inflasi yang terjaga <p>ADMINISTERED PRICES (AP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diskon tarif listrik 50% pada Jan-Feb 2025 Penurunan tarif parkir Kota Pekanbaru sejak Februari 2025 Diskon tarif angkutan udara pada periode HBKN Nataru 2024/2025 dan HBKN Idulfitri 2025 Diskon tarif angkutan udara 13%-14% & tarif tol 20% pada HBKN Idulfitri '25 dan HBKN NATARU 2025.



PROSPEK INFLASI PROVINSI RIAU 2026

Inflasi global diprakirakan akan lebih terkendali pada tahun 2026. International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Juli 2025 memprakirakan inflasi global akan menurun dari 4,2% pada tahun 2025 menjadi 3,6% pada tahun 2026. Penurunan inflasi pada negara maju diprakirakan dapat lebih cepat dibandingkan negara berkembang di topang oleh inflasi inti secara umum diprakirakan akan menurun secara bertahap.

Sejalan dengan perkembangan inflasi global, Pemerintah dan Bank Indonesia turut menyakini inflasi Nasional pada tahun 2025 tetap terkendali dengan rentang target sasaran $2,5\pm1\%$ (yoy). Terkendalinya inflasi nasional turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Selain itu, efektivitas upaya perbaikan pasokan dan distribusi pangan, outlook perkembangan harga minyak global yang terkendali, penguatan nilai tukar rupiah, serta ekspektasi inflasi yang terjaga turut mendukung prakiraan terkendalinya inflasi Nasional ke depan.

Selanjutnya, inflasi Riau tahun 2026 juga diprakirakan terkendali dibandingkan 2025 dan terjaga pada rentang sasaran $2,5\pm1\%$ (yoy), didukung oleh komponen *Volatile Food* (VF) dan *Core Inflation* (CI), sementara komponen *Administered Prices* (AP) diprakirakan mengalami peningkatan inflasi terbatas. Hal tersebut didasari oleh hal-hal sebagai berikut: (i) Inflasi komponen VF diprakirakan membaik seiring dengan perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perbaikan sistem irigasi, optimalisasi pengolahan pasca panen, penggunaan bibit unggul, program dukungan penyediaan sarana produksi (saprodi) dan alat mesin pertanian (alsintan), serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani melalui penyuluhan dan pelatihan petani di Provinsi Riau, (ii) inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, *imported*

inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau, serta (iii) inflasi AP yang mengalami peningkatan terbatas. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, penyesuaian tarif dan kebijakan perpajakan, serta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respons kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.





Halaman ini sengaja dikosongkan





Daftar Istilah

Administered Price

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol.

Base Effect

Efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup rendah/tinggi.

BEC

Pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut.

Barang Modal (*Capital Goods*)

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.

BI 7 Day Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

CPO (*Crude Palm Oil*)

Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.



Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang diterima perbankan dari masyarakat, berupa giro, tabungan atau deposito.

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

Inflasi Inti

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat dan permintaan agregat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat.

Inflow

Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin

Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.





Kredit Konsumsi

Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang memiliki prospek bisnis yang baik (*feasible*) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (*bankable*). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.

Kliring

Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kliring Debet

Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggaraan kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di Kantor Pusat Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Kliring Kredit

Kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di Kantor Pusat Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (paperless).

Liaison

Suatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan, dan deposito).

Net Interest Income (NTI)

Pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.





Nilai Tukar Petani (NTP)

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

Non Core Deposit (NCD)

Dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan, dan 10% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

PDRB Riil

Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

Quarter to quarter (qtq)

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi triwulan tertentu terhadap posisi triwulan sebelumnya.

Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Ls terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Ls, semakin baik kondisi bank yang bersangkutan.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) - Net

Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit.





Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Survei Konsumen

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

Survei Penjualan Eceran

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Uang Kartal

Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam.

Volatile Food

Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (*volatile*).

Year on year (yoY)

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Pembandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal Hari Besar Keagamaan Nasional, tahun ajaran baru, dsb).



Pengarah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau:

Panji Achmad

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau:

Sudiro Pambudi

Editor

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi Sumatera Utara

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi:

Franciskus Arnold Sitanggang

Kontributor

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi:

Hafidh Jati Husodo
Naufal Muhammad
Yusnitafili Harefa
Akbar Harahap Hidayat
Acnaf Djamal Syaus
Annatasya Putri Salsabila



Jl. Jend. Sudirman No. 464
Pekanbaru - Riau